

PROSIDING LOKAKARYA

PENGALAMAN EMPIRIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
BOGOR, 10 JULI 1993



IPB20010360



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
1993

KATA PENGANTAR

Prosiding ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Lokakarya Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang berkaitan dengan pengalaman empirik LPM IPB pada khususnya dan Institut Pertanian Bogor pada umumnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Isi prosiding antara lain memuat materi lokakarya serta rumusan hasil lokakarya. Harapan kami prosiding ini dapat bermanfaat bagi para sivitas akademika IPB pada khususnya serta kalangan perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun lembaga-pembaga lain yang terkait dengan pembangunan pertanian terutama yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Akhirnya atas peranserta semua pihak yang telah ikut serta dalam lokakarya ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Demikian pula kepada Pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor serta peran sponsor yang telah ikut serta membantu terbitnya buku prosiding ini.

Penyusun,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Dasar Pemikiran	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Tema	2
II. HASIL RUMUSAN LOKAKARYA	
2.1. Permasalahan Pengentasan Kemiskinan	3
2.2. Implikasi program	4
2.3. Tindak Lanjut	5
III. MATERI LOKAKARYA	
A. <u>Makalah Undangan</u>	
Topik: Model Pendekatan Pengentasan Kemiskinan	6
(Oleh: Dr.Ir. H. Sjafri Mangkuprawira)	
B. <u>Makalah Session I</u>	
Topik: 1.1. Proyek Pengembangan Sistem Agribisnis Terpadu di Wilayah Lingkar Kampus IPB Darmaga.	17
(Oleh: Dr.Ir.Aida Vitayala S.Hubeis)	
1.2. Pengembangan Desa Pantai secara Terpadu di Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten DT. II Sukabumi.	31
(Oleh: Ir. Sunatmo Sardono)	
1.3. Pengembangan Pasar Lelang Lokal Salah Satu Pengalaman IPB dalam Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan.	47
(Oleh:Ir. Yayok Bayu Krisnamurthi, MS)	
Diskusi I.	
C. <u>Makalah Session II</u>	
Topik: 2.1. Pengembangan sistem pertanian terpadu di daerah lahan kering (kasus Kabupaten Sukabumi.	57
(Oleh: Ir. Moentoha Selari, MS)	

2.2.	Pembinaan Pengusaha Industri Kecil melalui Sistem Inkubator.	73
	(Oleh: Dr.Ir.Rizal Sarief, DESS	
2.3.	Peranan Proyek Makanan Jajanan IPB dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.....	79
	(Oleh:Dr.Ir. Aida V. S. Hubeis dan Tim)	
Diskusi II.		
D. <u>Makalah Session III</u>		
Topik: 3.1.	Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN).	102
	(Oleh: Dr.Ir. H. Surdiding Ruhendi MSc. dan Dr.Ir. Oteng Haridjaja, MSc)	
3.2.	Identifikasi masalah dan Pendekatan Pengentasan Kemiskinan: Suatu Restrospeksi.	110
	(Oleh: Dr.Ir. H. Lutfi I. Nasution)	
3.3.	Peluang Bisnis melalui Usaha Ternak Ayam Bukan Ras (Kasus Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan).	121
	(Oleh: Drh. R.Kurnia Achyadi, MS; Drh. Abdulgani A. Siregar, MS dan Ir. Amiruddin Saleh, MS)	
Diskusi III.		
E. <u>Makalah Sumbangan</u>		
Topik: 1.	Pendapatan Penduduk Kabupaten Tangerang (Evaluasi Keadaan Tahun 1976 s/d 1986)	131
	(Oleh: H. Arie Lestario K/Univ. Nusa Bangsa)	
2.	Keuntungan Penerapan Kandang Sistem Baterai Untuk Memelihara Ayam Buras di desa sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat.....	144
	(Oleh: Drs. Ghozie Zein/IKIP Surabaya)	
IV. LAMPIRAN - LAMPIRAN		
I.	Sambutan-sambutan	155
	- Ketua Panitia	
	- Direktur BINLITABMAS, DIKTI	
	- Rektor IPB	
II.	Peserta Lokakarya	164
III.	Foto-foto Kegiatan Lokakarya	169
IV.	Kliping Koran dan Siaran RRI	173
V.	Jadwal Acara Lokakarya	174

LOKAKARYA

PENGALAMAN EMPIRIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Dalam era pembangunan yang sedang giatnya dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, penduduk miskin dan pengentasan kemiskinan merupakan dua buah isu yang akhir-akhir ini cukup banyak mendapat perhatian, baik dari pandangan para pakar pembangunan, maupun dari pihak pemerintah. Berbagai pemikiran, program, maupun proyek telah disiapkan dan dilaksanakan untuk menindaklanjuti perhatian terhadap isu tersebut.

Institut Pertanian Bogor, salah satu perguruan tinggi pertanian terkemuka di tanah air melalui Dharma Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) secara langsung maupun tidak langsung telah menanggapi dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan pertanian, khususnya di daerah pedesaan yang masyarakatnya pada umumnya adalah miskin atau tergo-long miskin. Berbagai program dan kegiatan PPM telah disusun dan dilaksanakan oleh IPB bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dengan masyarakat terutama di desa-desa wilayah Kabupaten Kerjasama. Pengalaman empirik IPB ini akan sangat besar artinya apabila disebarluaskan dan memperoleh umpan balik dari berbagai pihak sehingga diperoleh pemikiran atau program yang lebih terintegrasi dan lebih dapat memberikan dayaguna maupun hasilguna yang lebih tinggi.

Dalam hal pemanfaatan lahan kering, misalnya, IPB telah mempunyai pengalaman selama tiga tahun di Kabupaten Sukabu-mi. Juga pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan

sistem pertanian terpadu telah dicoba di Kabupaten Bogor. Begitu pula pembinaan pengusaha Kaki Lima (makanan jajanan) dan Industri Rumah Tangga di Kotamadya Bogor adalah juga contoh kegiatan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan oleh IPB.

Kegiatan-kegiatan di atas hanyalah sebagian saja dari program-program PPM untuk menunjukkan besarnya perhatian dan kepedulian IPB terhadap masyarakat yang tergolong miskin. Namun pertanyaan yang muncul kemudian adalah :

- (1) Sejauh mana sebenarnya konsep, program, maupun kegiatan yang telah IPB laksanakan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang tergolong miskin ?
- (2) Faktor-faktor pendorong dan pembatas apa yang dihadapi dalam penyusunan program maupun pada pelaksanaan program PPM sehingga diperoleh hasil yang optimal ?
- (3) Sejauh mana program-program atau proyek yang telah dilaksanakan memberikan dorongan terhadap keikutsertaan khalayak sasaran dalam proses pembangunan?
- (4) Sejauh mana sistem kelembagaan yang ada terlibat aktif bagi kelancaran jalannya program terkait ?

Pada Lokakarya ini diharapkan dapat digali informasi secara mendalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

1.2. Tujuan

Lokakarya yang difokuskan pada tukar menukar informasi, pengalaman empirik antar peserta didalam kegiatan pengentasan kemiskinan ini bertujuan :

1. Mengidentifikasi dan merumuskan konsep, program, maupun proyek dan peranan kelembagaan yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

2. Merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk menciptakan iklim kondusif termasuk sistem kelembagaan penunjang yang diperlukan bagi peningkatan efektivitas upaya pengentasan kemiskinan yang mengacu pada kesesuaian kondisi-kondisi setempat.

1.3. Tema

"Peranserta Institut Pertanian Bogor dan Masyarakat dalam upaya Pengentasan Kemiskinan".

II. RUMUSAN HASIL LOKAKARYA

Isu perencanaan pembangunan pada lima tahun terakhir dititikberatkan pada upaya pengentasan kemiskinan. Berbagai lembaga, baik formal maupun informal, pemerintah atau swasta menjadikan isu ini sebagai dasar penyusunan program sesuai dengan garis kebijakan instansi masing-masing. Bentuk-bentuk program khusus sengaja diciptakan untuk mengentaskan kemiskinan, baik berupa teknologi, rekayasa sosial ekonomi melalui pendekatan lintas sektoral.

Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan bukan suatu hal yang mudah, tetapi merupakan persoalan yang kompleks: Pertama, dimensi kemiskinan itu sendiri cukup beragam, ada kemiskinan kapital, kemiskinan informasi, kemiskinan kesempatan dan kemiskinan ilmu yang berimplikasi pada keterbelakangan dan kebodohan. Kedua, sulitnya menentukan khalayak sasaran karena secara budaya orang masih sulit mengakui "dirinya miskin" sehingga sulit menerima bantuan orang lain untuk mengentaskannya.

Keragaman dimensi kemiskinan berimplikasi pada keragaman program keberhasilannya. Secara umum keberhasilan

program pengentasan kemiskinan dapat diukur dari perubahan pendapatan sasaran, tumbuhnya kelembagaan swadaya yang kuat dan mandiri yang didasari dari felt need mereka, peningkatan berupa modal kerja dan perubahan pengetahuan, sikap serta keterampilan sasaran dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

2.1. Permasalahan Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan pengentasan kemiskinan tidak hanya terletak pada apa, bagaimana, siapa dan dimana program dijalankan, tetapi juga pada aspek kesinambungan program yang sudah dijalankan. Berbagai permasalahan program pengentasan kemiskinan yaitu:

1. Koordinasi (manajemen) program, menyangkut kemantapan koordinasi belum terlaksana dengan baik mengingat belum adanya kesamaan pengetahuan dan persepsi antar para pelaksana.
2. Hambatan teknis, menyangkut keterbatasan fasilitas penunjang, aplikasi teknologi yang tepatguna (sederhana, murah dan mudah dijangkau sasaran), serta keterbatasan tenaga yang mempunyai kemauan tinggi dan kemampuan yang handal, waktu serta dana.
3. Hambatan sosial, menyangkut adanya kecemburuan sosial, sikap mental sasaran (apatis dan pesimis).
4. Ekonomi, menyangkut persoalan perluasan usaha, kesinambungan usaha, permodalan, pemasaran dan dukungan lembaga-lembaga keuangan (perbankan).

2.2. Implikasi Program

Berdasarkan permasalahan yang sudah teridentifikasi, perlu disusun langkah-langkah metoda pelaksanaan program pengentasan kemiskinan: (a) menentukan deskripsi kemiskinan, (b) menentukan sasaran, (c) melakukan pendekatan program

berdasarkan disiplin ilmu dan pengetahuan, (d) identifikasi permasalahan mendasar, (e) merumuskan alternatif program dan strategi, (f) menyusun rencana operasional, (g) melaksanakan dan mengendalikan program, (h) evaluasi dan (i) melakukan umpan balik.

Program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan: (a) pendidikan dan pelayanan, (b) satuan kawasan ekonomi dan administrasi pembangunan, (c) sektoral pembangunan nasional, (d) disiplin ilmu dan (e) khalayak sasaran secara sistemik.

* Langkah-langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan hambatan teknis pengentasan kemiskinan adalah dilakukan komunikasi intensif antara lembaga perguruan tinggi, pemerintah dan sasaran untuk menginformasikan hasil-hasil penelitian (perguruan tinggi) yang dapat diaplikasikan oleh khalayak sasaran di bawah koordinasi instansi terkait. Hambatan keterbatasan dana dapat diatasi dengan penumbuhan motivasi dan kemampuan sasaran untuk meneruskan program secara swadaya. Permasalahan sosial yang menyangkut sikap mental dapat diatasi melalui kesepakatan dengan sasaran dalam merancang program dan melaksanakan kerjasama secara bersama. Sedangkan dalam hal koordinasi pelaksanaan program, berbagai bentuk pelatihan dapat dilaksanakan sebagai pembekalan pengetahuan untuk memperoleh kesamaan sikap para pelaksana. Untuk melancarkan manajemen koordinasi, para pelaksana perlu memperoleh rewards (insentif), baik insentif ekonomi maupun sosial. Akhirnya yang sangat diperlukan adalah tumbuhnya koordinasi yang mantap, tidak saja diantara para pelaksana tetapi juga antar sasaran maupun antara sasaran dan pelaksana.

2.3. Tindak Lanjut

1. Bagaimana menjembatani teknologi hasil rekayasa lembaga perguruan tinggi dengan sasaran kepada masyarakat pengguna sesuai dengan daya serap dan nalar sasaran yang bersangkutan.

2. Perlunya upaya-upaya pemantapan kemandirian sasaran
3. Pemantapan koordinasi Perguruan Tinggi-Pemda-Swasta dengan lembaga non formal untuk melanjutkan program
4. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan perguruan tinggi perlu dibicarakan secara bersinambung untuk mampu melihat proses perubahan dan upaya untuk terus menerus diadakan perbaikan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

III. MATERI LOKAKARYA

**PENDEKATAN PENGENTASAN KEMISKINAN
OLEH PERGURUAN TINGGI¹⁾**

Sjafri Mangkuprawira²⁾

MENGAPA MISKIN ?

Pada tahun 1970 ada sebanyak 60 orang penduduk Indonesia miskin dari setiap 100 orang penduduk atau sekitar 70 juta orang. Dengan adanya pembangunan selama orde baru maka pada tahun 1990 tinggal 15 orang yang masih hidup miskin dari setiap 100 orang. Namun, secara absolut angkanya masih cukup besar yaitu sekitar 27 juta orang. Sebagian besar hidup di daerah pedesaan termasuk di daerah-daerah terpencil dan di daerah kumuh perkotaan.

Kemiskinan
Kemiskinan sering disebut pula ketidakberdayaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok baik materi maupun bukan materi: Materi dapat berupa pangan, pakaian, kesehatan dan papan. Sedang bukan materi berbentuk kemerdekaan, kebebasan hak asasi, kasih sayang, solidaritas, sikap hidup pesimistik, rasa syukur dan sebagainya.

Masalah kemiskinan identik dengan keterbatasan dalam pemilihan dan penguasaan sumberdaya fisik dan non fisik. Akibat kemiskinan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat konsumsi pangan-gizi, produktivitas kerja rendah, tingginya angka kematian bayi, anak dan ibu hamil, rendahnya usia hidup dan pendidikan yang rendah. Dengan perkataan lain kemiskinan dicirikan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat berbentuk kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural (6). Kemiskinan alamiah tumbuh karena rendahnya jumlah dan kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Akibatnya peluang produksi atau usaha menjadi relatif kecil. Kemudian timbulah kasus-kasus pengangguran, urbanisasi, kriminalitas, dan sebagainya. Sedangkan kemiskinan struktural timbul secara langsung/tidak langsung disebabkan oleh sistem nilai seperti ketimpangan ekonomi, pemusatan kekayaan pada segolongan kecil, dan ketidakadilan sosial. Bersamaan dengan itu

1) Disampaikan pada Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, LPM IPB, 10 Juli 1993

2) Staf Pengajar Fakultas Pertanian, Program Pascasarjana IPB dan Ketua LPM IPB

kemiskinan dapat pula karena adanya budaya miskin yaitu berbentuk kemalasan, fatalistik, cepat menyerah dan sangat pesimistik terhadap kehidupan. Dengan perkataan lain kemiskinan timbul dibuat oleh dirinya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa kategori manusia yang miskin apakah miskin materi maupun bukan materi. Adakalanya seseorang berkecukupan bahkan berlebihan dalam hal materi tetapi miskin dalam hal bukan materi, seperti ketidakpedulian sosial, dholim, rakus, hidup gelisah, keluarga tidak harmonis, dan sebagainya. Sebaliknya ada yang miskin materi tetapi kaya dengan bukan materi seperti ketegaran hidup, kasih sayang, ridha, solidaritas sosial, dan sebagainya. Yang paling parah adalah jika miskin dalam hal materi dan bukan materi. Sebaliknya yang paling ideal adalah mereka yang kaya materi sekaligus pula kaya bukan materi seperti keluarga harmonis, solidaritas sosial yang tinggi, rasa bersyukur yang tinggi dan sebagainya.

Masalah yang dihadapi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia adalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Ketiga masalah tersebut saling mengait yang muncul dari berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti faktor sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, modal, kelembagaan, akses prasarana-sarana transportasi/komunikasi, dan lapangan kerja.

Kemiskinan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dicirikan oleh orang yang tidak punya harta milik, pendidikan yang rendah, kesehatan yang kurang, tidak punya pengaruh kekuasaan, dan sebagainya. Fenomena tersebut merupakan suatu sindrome yaitu jalinan fenomena yang relatif sulit diberantas khususnya di daerah pedesaan.

Keterbelakangan masyarakat yang diungkapkan dalam bentuk kemampuan berpartisipasi sebenarnya tidak luput pula berkaitan dengan kemiskinan dan kebodohan. Keterbelakangan masyarakat yang terjadi di daerah pedesaan misalnya, diasumsikan karena teknologi yang digunakan masih primitif. Karena itulah beberapa kebijakan modernisasi telah diterapkan. Namun sudahkah sepenuhnya masyarakat terjangkau? Jika sudah terjangkau pada golongan yang mana? Apakah ada dampaknya terhadap kemiskinan?

Kelompok masyarakat miskin dan keterbelakangan pada dasarnya dapat dicirikan oleh rendahnya kebutuhan gizi minimal per kapita, pemilikan lahan yang sempit, pendapatan per kapita yang rendah, kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin, serta partisipasi rakyat yang minim di dalam pembangunan. Beberapa faktor penyebab antara lain adalah kurangnya modal bagi pengembalian usaha dan sumberdaya

alam, kurangnya pengembangan usaha, langkanya lapangan kerja serta struktur masyarakat yang menghambat. Walaupun pembangunan nasional sudah dilakukan Pelita demi Pelita namun masalah-masalah tersebut belum sepenuhnya terpecahkan.

Munculnya kemiskinan itu sendiri dapat bermula dari pemilikan aset atau modal bagi usaha untuk membangun diri dan keluarga. Di daerah pedesaan aset-modal ini dicirikan oleh lahan usaha yang sempit akibat dari sistem warisan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Rendahnya modal yang berakibat pendapatannya yang makin rendah menyebabkan berkurangnya kesempatan anggota keluarga dalam meningkatkan kemampuan pendidikan, keahlian dan ketrampilannya. Rendahnya kemampuan dalam berbagai perspektif tersebut dari tiap keluarga mencerminkan seberapa jauh kemampuan masyarakat dalam membangun desanya.

Keterbelakangan masyarakat dalam partisipasi pembangunan dicirikan oleh penguasaan modal dan pengetahuan yang rendah. Sedangkan pengetahuan yang rendah mencerminkan adanya masalah kebodohan akibat kekurangan maupun dalam mendapatkan pendidikan latihan, ketrampilan dan informasi yang antara lain disebabkan karena kemiskinannya. Selain itu dapat disebabkan karena struktur sosial yang tidak mendukung kelompok ini berpartisipasi misalnya karena hubungan kerja sifatnya eksploitatif. Kondisi demikian tercermin antara lain dalam kemampuan menganalisis situasi yang rendah, kurang mengajukan gagasan-gagasan pembangunan, kedudukan atau posisi yang rendah dalam pengambilan keputusan. Dengan ungkapan lain, keterbelakangan telah menjadi penghambat utama untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk maju.

TANGGUNG JAWAB SIAPA ?

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan mendasar adalah tanggung jawab siapakah jika ada fenomena kemiskinan ? Permasalahan kemiskinan adalah suatu permasalahan sosial walaupun yang menderita kemiskinan adalah perorangan. Mereka mau tidak mau miskin karena timbul dari proses produk sosial. Dengan demikian, pemecahannya tidak tepat diserahkan sepenuhnya kepada "alam" tetapi harus melalui proses perubahan teknologi, sikap masyarakat dan sumberdaya manusia dengan mekanisme yang terprogram dan terencana dengan baik.

Manusia disamping sebagai perorangan juga sekaligus sebagai bagian dari masyarakat. Artinya kita jangan terjebak ke dalam pemikiran bahwa tiap individu bebas satu sama lainnya dan saling tidak peduli. Di sini ditekankan bahwa

kemiskinan perlu dipandang dari sudut dimensi sosial ketimbang hanya sebagai kasus perorangan.

Sebagai konsekuensi logis dari hal di atas maka penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya semata-mata didasarkan pada kebaikan hati seseorang saja. Tetapi seyogyanya lebih didasarkan pada panggilan moral kewajiban sosial dan dilakukan oleh masyarakat keseluruhan. Masyarakat di sini diartikan sebagai suatu kesatuan dengan batas-batasnya apakah secara universal atautkah pada lingkungan yang lebih sempit dan khusus.

Sebagai rangkuman dari uraian di atas maka mengatasi kemiskinan memiliki arti diperlukannya penanaman nilai-nilai moral yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat termasuk perguruan tinggi mengingat penanggulangan kemiskinan pada dasarnya adalah tanggung jawab masyarakat.

Program mengatasi kemiskinan tentunya tidak semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga masyarakat keseluruhan. Alasannya adalah bahwa dalam konteks masyarakat, kemiskinan yang meluas bukan hanya tidak dapat diterima secara moral, tetapi juga dengan sendirinya akan menurunkan kapasitas sosial-ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan.

Apabila fenonema masalah pokok di atas terjadi maka perguruan tinggi dihadapkan pada pertanyaan : apa yang dapat dilakukan perguruan tinggi untuk ikut membantu memecahkan masalah tersebut. Karena statusnya maka keterlibatan perguruan tinggi agaknya dapat dilakukan dengan pendekatan intervensi pendidikan dan peningkatan pendapatan dari kelompok-kelompok strategis tertentu.

DIPERLUKAN METODA CERMAT

Permasalahan kemiskinan selain mencakup aspek positif (what is) juga sarat akan dimensi nilai (7). Siapa yang digolongkan miskin sebagian ditentukan oleh bagaimana kemiskinan didefinisikan. Karakteristik/profil kemiskinan sekilas tampaknya merupakan persoalan analisis positif atau rasional. Tetapi dalam prakteknya ia sarat akan nilai. Artinya karakteristik dari kelompok yang tergolong miskin akan tergantung dari standar variabel atau standar absolut yang digunakan. Dengan kata lain analisis tentang karakteristik kemiskinan tidak hanya tergantung pada dimana garis kemiskinan diletakkan tetapi juga tergantung dari bagaimana kita mengukurnya. Jadi bukan semata-mata masalah teknis

saja tetapi juga bersifat politis dan tergantung pada nilai yang berlaku pada sistem sosial masyarakat tert

Secara metodologis sering kita dibuat bingung analisis fenomena kemiskinan. Misalnya kemiskinan berhubungan erat dengan produktivitas. Ada kalangan berpendapat bahwa produktivitas seseorang rendah karena memang ia miskin. Tetapi pihak lain berpendapat sebaliknya. Tampak bahwa proposisi sebab-akibat dari fenomena tersebut tergantung dari nilai yang dianut oleh nilai dari seseorang. Namun demikian fenomena tersebut tetap dipandang sebagai suatu masalah nyata dan bukan bersifat abstrak. Implikasinya apabila berbicara tentang kemiskinan sebagai suatu masalah nyata maka apabila ditunda pengentasannya maka akan banyak berakibat fatal. Di sinilah kalangan akademisi/ilmuwan perguruan tinggi/lembaga-lembaga penelitian di Indonesia dengan karakteristiknya yang peduli pada lingkungan, menelaah masalah kemiskinan tidak saja dikaitkan dengan telaahan ilmu pengetahuan positif dan normatif tetapi juga menggunakan pengetahuan tersebut untuk mencari resep yang tepat dalam pengentasan kemiskinan (7).

Dalam konteks dengan nilai, misalnya, kita harus memiliki pengetahuan tentang perilaku sosial-ekonomi, tatanan nilai dari suatu masyarakat-masyarakat miskin dimana kita akan berupaya untuk memperbaikinya.

Langkah-langkah dalam pengentasan kemiskinan adalah (a) menetapkan apa yang dimaksud dengan kemiskinan dan apa saja kriteria dan indikator-indikatornya; (b) menetapkan siapa yang disebut golongan miskin menurut standar yang disepakati; (c) memahami apa yang terjadi di balik fenomena kemiskinan tersebut atas dasar pendekatan teori/disiplin ilmu dan pengalaman; (d) mengidentifikasi permasalahan yang mendasar, bukan mengidentifikasi gejala yang tampak di permukaan; (e) merumuskan berbagai alternatif program dan strategi serta menilai kelemahan dan keunggulannya dilanjutkan dengan menentukan pilihan yang terbaik (layak, dapat dipraktekan, dapat dikelola); (f) menyusun rencana operasional; (g) melaksanakan dan mengendalikan program; (h) menentukan dan menilai; dan (i) melakukan umpan balik. Secara keseluruhan maka diperlukan suatu intervensi program.

Intervensi pengentasan kemiskinan dapat dalam bentuk intervensi psikologis-sosial (perangkat lunak) dan intervensi perangkat keras (1). Intervensi lunak dapat berbentuk pendidikan (formal, non formal, informal) dan penerangan yang bertujuan mendorong khalayak sasaran untuk (a) beretos kerja keras, semangat hidup, dan mandiri; (b) untuk mampu mengembangkan cara-cara hidup sosial-ekonomi yang efektif dan efisien (perilaku produksi, konsumsi dan distribusi); dan (c) untuk lebih meningkatkan harkat kemanusiaannya (hak-

kewajiban) dalam kehidupan yang kompleks ini. Ciri dari intervensi ini adalah suatu program yang tidak langsung berpengaruh pada pengurangan derajat kemiskinan sedangkan intervensi perangkat keras memiliki ciri langsung dan tidak langsung.

Contoh intervensi perangkat keras adalah penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan memperoleh pangan dan keterjaminan pangan; seperti penyediaan kredit, benih, pupuk, prasarana dan sarana ekonomi dan sebagainya.

Sementara itu kita perlu menentukan siapa khalayak sasarannya. Di sektor pertanian (8), karakteristik pokok golongan miskin dapat berupa (a) buruh tani dan petani berlahan sangat sempit; (b) petani yang bertempat tinggal di daerah miskin sumberdaya dan akses yang sulit; (c) tidak terjangkau irigasi teknis; dan (d) lapangan kerja non pertanian hampir tidak ada; (e) tingkat pendidikan dan ketrampilan rendah; (f) peternak gurem; dan (g) nelayan berskala kecil.

ARTI PEMECAHAN MASALAH KEMISKINAN

Pemecahan masalah kemiskinan adalah proses pengambilan keputusan yang mencakup tindakan yang akan datang atau yang diharapkan dapat merubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam pelaksanaannya, paling kurang ada tingkat keputusan yang relatif berbeda yang didasarkan pada luasnya implikasi-implikasi atau lingkup dari pemecahan masalah tersebut. Jenis keputusan yang pertama adalah pemecahan masalah yang relatif bersifat sederhana dan berulang mengenai tindakan rutin yang hampir dibuat setiap hari. Pada keputusan tingkat kedua, pemecahan masalah relatif cenderung lebih kompleks. Dia memiliki jangkauan yang lebih luas dan sudah mulai membutuhkan tingkat nalar atau analisis tertentu yang keputusannya berupa taktik. Tingkat keputusan yang ketiga adalah pemecahan masalah yang memiliki dimensi ruang dan waktu yang sangat luas dan umumnya memerlukan informasi dan kontemplasi yang terbanyak.

Batasan pengertian di atas mengidentifikasi tiga ciri proses pemecahan masalah kemiskinan, yaitu (a) mencakup suatu tindakan yang diharapkan, (b) terdapat variasi tindakan sesuai dengan di tingkat mana pemecahan masalah diputuskan, dan (c) adanya kombinasi pertimbangan mengenai implikasi-implikasi yang kompleks yang diantisipasi dari tindakan yang diharapkan.

Identifikasi tersebut mengacu pada pertimbangan bahwa masalah kemiskinan adalah sedemikian rupa kompleksnya. Hal demikian dapat ditinjau dari ragam kebutuhan, potensi daerah, sosial budaya dan sebagainya. Sejak manusia berada dalam sistem sosial, sejak itu pulalah proses pemecahan masalah telah timbul. Dalam masyarakat yang masih sederhana/tradisional, proses pemecahan masalah relatif akan sederhana pula. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan maka cenderung semakin rumitlah proses pengambilan keputusan atau pemecahan masalahnya.

Apabila berbicara tentang pembangunan masyarakat maka pusat perhatian kita adalah pada masyarakat yang masih mengalami kemiskinan, ketidaktahuan, dan keterbelakangan. Tantangan pembangunan bukan hanya membangun masyarakat dalam arti seperti di atas, tetapi juga membangun dunia industri dengan segala aspek teknologi, sosial dan ekonominya.

Pembangunan masyarakat dan industri dapat diartikan sebagai proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk dalam menguasai lingkungannya yang disertai dengan meningkatnya tingkat hidup sebagai akibat dari penguasaan tersebut. Lingkungan sosial ekonomi tersebut berupa kemampuan menganalisis situasi dan masalah, mengembangkan gagasan-gagasan pembangunan, penguasaan teknologi dan modal, keahlian dan ketrampilan serta kepemimpinan yang mendukung pembangunan.

Namun demikian, belum sepenuhnya masyarakat menguasai lingkungan tersebut. Berbagai faktor pembatas seperti keahlian dan ketrampilan serta penguasaan teknologi yang kurang, menyebabkan masih adanya masalah-masalah kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan di kalangan masyarakat. Mereka masih memerlukan bantuan dari berbagai pihak agar mereka tidak tertinggal dalam mencapai taraf hidup yang layak.

Sesuai dengan kedudukannya, perguruan tinggi di Indonesia dapat berperan dalam proses pemecahan masalah kemiskinan. Dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh perguruan tinggi mereka dapat membantu masyarakat dari tahap analisis situasi masyarakat, melahirkan gagasan-gagasan pembangunan masyarakat, sampai pada mengembangkan berbagai jenis teknologi. Dengan demikian tugas perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan sarjana tetapi juga aktif didalam menunjang dan menggerakkan pembangunan masyarakat.

MODEL PENDEKATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Dalam langkah-langkah pemecahan masalah kemiskinan antara lain telah diungkapkan langkah pemilihan tindakan alternatif. Dengan langkah tersebut ingin dilakukan mana usaha yang dianggap paling efektif dalam mencapai tujuan pemecahan masalah kemiskinan. Namun uraian langkah-langkah tersebut merupakan prinsip-prinsip pokok bagi usaha pemecahan masalah pada umumnya. Tergantung pada status, peranan dan status lembaga yang terlibat dalam pemecahan masalah maka metoda pendekatannya pun diduga akan bervariasi.

Dalam upaya ikut memecahkan masalah kemiskinan maka digunakan pendekatan berwawasan yang berakar pada masyarakat. Karakteristik Indonesia dengan kebhinekaannya menuntut perguruan tinggi untuk sekaligus menggunakan pendekatan sosial dan pendekatan struktural. Dengan kata lain bahwa pemecahan masalah kemiskinan harus bertumpu pada kemampuan masyarakat dan perguruan tinggi itu sendiri.

Ditinjau dari kepentingan masyarakat maka segala upaya pembangunan masyarakat hendaknya dapat ditumbuhkan menjadi milik masyarakat sehingga kelangsungan hidup proyeknya terjamin. Sedangkan ditinjau dari kedudukan dan peranan perguruan tinggi upaya pendekatan masalahnya dapat dilakukan dengan cara pendidikan dan kemanusiaan. Pendekatan dari bawah (masyarakat) dan dari atas (struktural) perlu diselenggarakan agar lebih menjamin keberhasilan usaha pemecahan masalah. Perguruan tinggi sebagai agen pembaharu seyogyanya bertindak sebagai jembatan (komunikator) antara dua kepentingan tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan di atas dapat dipakai sebagai dasar dalam menerapkan pendekatan-pendekatan pemecahan masalah kemiskinan. Berdasarkan masalah, tujuan dan sasaran pengabdian kepada masyarakat maka beberapa pendekatan pemecahan masalah dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Pendekatan pendidikan dan pelayanan pada masyarakat

Kedua pendekatan pengentasan kemiskinan ini adalah paling hakiki ditinjau dari kedudukan dan peranan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran PPM diberikan pengetahuan dan ketrampilan agar pada gilirannya mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri. Sedangkan pelayanan pada masyarakat diharapkan dapat menunjang pendekatan pendidikan tersebut.

2. Pendekatan yang mengacu pada satuan kawasan ekonomi dan administrasi pembangunan

Sesuai dengan lingkup potensi dan situasi dari lokasi tertentu maka pendekatan kemiskinan dapat berbentuk pendekatan nasional, regional dan lokal. Dengan demikian jenis tindakan alternatif pemecahan masalah oleh perguruan tinggi dapat dalam bentuk pemikiran/gagasan perencanaan di tingkat nasional sampai pada implementasi tindakan di tingkat lokal. Orientasi pengentasan kemiskinan dalam tipe pendekatan ini agaknya lebih tepat berkaitan dengan pola ilmiah pokok perguruan tinggi masing-masing dan kondisi sosial, ekonomi, fisik daerah sasaran.

3. Pendekatan yang mengacu pada aspek sektor pembangunan nasional

Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa disiplin ilmu seperti fakultas atau jurusan di perguruan tinggi mempunyai kaitan dengan tugas dan lingkup departemen sektoral tertentu. Di segi lain tampak pula permasalahan yang ada di masyarakat pun dapat berlingkup sektoral dan dapat lintas sektoral. Dengan demikian dalam pemecahan masalah kemiskinan oleh perguruan tinggi dapat digunakan dengan dua cara yaitu pendekatan sektoral dan lintas sektoral. Instansi teknis (pusat dan daerah) bekerja bersama dengan perguruan tinggi.

4. Pendekatan yang mengacu pada disiplin Ilmu

Tergantung pada bobot dan luas lingkup masalah kemiskinan maka pendekatan pemecahan masalahnya dapat dilakukan secara monodisiplin. Namun ada kecenderungan karena masalah kemiskinan begitu kompleksnya maka pendekatan yang dianggap efektif adalah yang bersifat interdisipliner dan multidisipliner.

5. Pendekatan yang mengacu pada khalayak sasaran secara sistemik

Pendekatan ini lebih ditekankan pada usaha menggunakan cara pemecahan masalah berdasarkan masalah, kebutuhan dan kemampuan khalayak sasaran itu sendiri. Tergantung pada tujuan dan luas lingkup masalah kemiskinan maka pendekatan pemecahan masalahnya dapat ditujukan pada individual, kelompok, lembaga dan komunitas. Secara keseluruhannya pendekatan yang dilakukan sebaiknya diterapkan secara sistemik dimana peran dari setiap komponen yang terlibat dalam pemecahan masalah ini sudah ditentukan, begitu pula mekanisme antara komponen-komponen tersebut.

Untuk sampai pada pemilihan metoda pendekatan pemecahan masalah di atas maka beberapa hal perlu diungkapkan sebagai berikut: (a) masih tampak adanya kesenjangan antara kompleksitas ilmu dan teknologi yang diterapkan dengan kemampuan atau daya serap masyarakat, (b) masih adanya kecenderungan masyarakat bertindak lebih sebagai pelaku penerima atau pemakai pasif dibandingkan sebagai pelaku yang mencoba untuk mengembangkan dan bahkan menghasilkan sendiri, (c) masyarakat Indonesia sangat beragam dalam aspek sosio-kultur, dan (d) tingkat layanan pembangunan terhadap masyarakat belum merata. Dengan kata lain pendekatan-pendekatan masalah di atas tidak selalu berdiri sendiri dan dia selalu berkaitan dengan permasalahan yang beragam.

Tidak ada satu pun program/kegiatan pengentasan kemiskinan yang segera menghasilkan peningkatan pendapatan dan bahkan kesejahteraan dalam waktu singkat. Yang terpenting, program tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan serta terus menerus dikaji-kembangkan.

KEPUSTAKAAN

1. Darwin, K. dan Djoko S. 1991. Masalah Kemiskinan: Beberapa Pokok Persoalan dalam Prosiding Penanggulangan Kemiskinan: Fakultas Pertanian IPB.
2. Mangkuprawira, S. 1986. Metoda Analisis Situasi Masyarakat dalam Margono Slamet, Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat. Badan Penerbit UNILA.
3. ----- . 1986. Metoda Pemecahan Masalah Masyarakat dalam Margono Slamet, Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat. Badan Penerbit UNILA.
4. ----- . 1991. Poverty, "Coping Mechanisms and Social Solidarity." Makalah Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia ke IV, Kuala Lumpur, Malaysia.
5. ----- . 1993. Kemiskinan dan Solidaritas Sosial. Makalah pada Pelatihan Sumberdaya Manusia. Yayasan Pendidikan Al-Azhar. Jakarta.
6. Nasoetion, L.I. 1991. Taksonomi Kemiskinan di Indonesia: Suatu Kajian Eksploratif, dalam Prosiding Penanggulangan Kemiskinan: Fakultas Pertanian IPB.
7. Pakpahan, Agus. 1991. Prinsip Dasar, Metodologi dan Upaya Penanggulangannya, dalam Prosiding Penanggulangan Kemiskinan: Fakultas Pertanian IPB.
8. Sajogyo, 1991. Menanggulangi Kemiskinan: Beberapa Pokok Persoalan, dalam Prosiding Penanggulangan Kemiskinan: Fakultas Pertanian IPB.

**PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM AGRIBISNIS TERPADU
DI WILAYAH LINGKAR KAMPUS DARMAGA
1992 - 1994 ¹⁾**

Oleh:
Aida Vitayala S. Hubeis dan Tim ²⁾

I. LATAR BELAKANG

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM) oleh perguruan tinggi merupakan aplikasi kegiatan tridarma Perguruan Tinggi. Dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) di sektor pengembangan pertanian berlanjut (sustainable agricultural development) IPB telah berupaya mengembangkan beberapa program dalam rangka pengentasan kemiskinan seperti peningkatan gizi keluarga, pengembangan pola-pola usaha peningkatan pendapatan petani dan nelayan miskin serta membina pengusaha kecil (PKK), pengembangan pola pembangunan lahan kering, peningkatan mutu program pembangunan desa terpadu melalui kegiatan KKN dan kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dan berbagai pelayanan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelompok miskin.

Rencana pembangunan Kampus IPB Darmaga pada tahun 2000 diperkirakan akan menambah jumlah warga kampus sebanyak 15.000 orang yang terdiri dari mahasiswa, staf dan karyawan serta keluarganya. Kondisi ini diperkirakan akan membawa berbagai dampak perubahan, dalam kehidupan warga desa di sekitar kampus positif dan/atau negatif. Dampak positifnya adalah bertambahnya warga kampus yang akan merupakan konsumen potensial dalam memanfaatkan berbagai produk warga desa di sekitar kampus, misalnya: (1) hasil produksi pertanian untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, (2) jasa tenaga kerja yang berkualitas, dan (3) permukiman untuk mahasiswa. Sedangkan dampak negatifnya diduga akan menimbulkan kesenjangan sosial antara warga desa dan warga kampus yang perlu diantisipasi sejak awal.

-
- 1) Makalah disajikan dalam "Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan", LPM IPB, 10 Juli 1993
 - 2) Staf Pengajar Jurusan Sosek, Faperta IPB/Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan LPM IPB/Ketua Tim Proyek Pengembangan Sistem Agribisnis terpadu di Wilayah Lingkar Kampus Darmaga (Daftar Tim terlampir).

Hasil analisis potensi wilayah di desa-desa Lingkar Kampus IPB Darmaga menunjukkan bahwa potensi sumberdaya desa setempat sangat potensial untuk dapat memenuhi kebutuhan tambahan warga kampus itu. Namun kelangsungan produk dan kesempatan ekonomi yang tersedia tidak hanya menyangkut aspek pengolahan usaha (produksi) pertanian (pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan) tetapi juga akan terkait pada aspek produk penunjang kegiatan pra dan pascapanen seperti industri penghasil pupuk, pestisida, bibit unggul, alat-alat pertanian, dan industri pengolahan hasil pertanian. Sedangkan aspek lainnya adalah perbankan, pemasaran, penyuluhan, dan penelitian. Dengan kata lain pemenuhan kebutuhan tersebut terkait dengan kegiatan agribisnis terpadu.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada pendekatan Kaji Tindak (Action Research) dalam konteks sistem agribisnis terpadu untuk meningkatkan daya pasok desa terhadap kesempatan ekonomi tersebut di atas yang sekaligus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan desa, merupakan salahsatu upaya jalan keluar. Dengan demikian, upaya meningkatkan kondisi desa-desa di Lingkar Kampus Darmaga sebagai model sistem pengembangan wilayah agribisnis terpadu menjadi sangat penting dalam rangka mengintegrasikan masyarakat setempat dengan warga kampus.

II. MASALAH

- 2.1 Kualitas sumberdaya manusia di desa-desa lingkar kampus Darmaga relatif masih rendah dan belum sepenuhnya mendukung program percepatan pembangunan pedesaan.
- 2.2 Potensi pertanian lahan sawah, pekarangan, peternakan, perikanan, dan ladang belum diupayakan secara optimal. Kegiatan usahatani tersebut diupayakan secara sambilan dengan penekanan pada aspek budidaya dan belum mengarah pada skala usaha ekonomis. Masalah yang umum ditemukan adalah pada aspek kegiatan pra dan pascapanen.
- 2.3 Kebutuhan warga masyarakat sekitar Kampus Darmaga akan bahan bakar yang relatif tinggi belum dapat dipenuhi secara mandiri.
- 2.4 Makanan jajanan sebagai salahsatu sumber konsumsi masyarakat dan warga kampus Darmaga belum dikelola dengan bersih dan sehat serta ekonomis.
- 2.5 Limbah rumahtangga dan industri yang belum ditanggulangi secara baik menimbulkan pencemaran lingkungan di desa-desa sekitar kampus.

- 2.6 Kelembagaan sosial yang eksis di masyarakat belum terkoordinasi dan dimanfaatkan secara optimal khususnya untuk kepentingan peningkatan usaha produktif menuju pengembangan wilayah agribisnis terpadu.

III. TUJUAN

3.1 *Tingkat Masyarakat*

- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan keterampilan dan sikap warga desa di sekitar Kampus Darmaga dalam pengelolaan agribisnis, penanganan limbah dan lingkungan.
- b. Meningkatkan kegiatan bisnis masyarakat melalui kegiatan usaha bersama (KUB).
- c. Meningkatkan peran kelembagaan pembangunan pedesaan menuju aspek kemandirian.

3.2 *Tingkat Produksi*

- a. Peningkatan produktivitas lahan pertanian desa-desa di Lingkar Kampus Darmaga dengan orientasi pada komoditas pertanian unggulan yang komersial dan terpadu dalam konteks sistem agribisnis.
- b. Pengendalian dan penertiban pemanfaatan lahan melalui pendekatan kelestarian sumberdaya alam.
- c. Peningkatan populasi dan genetika ternak domba dan ayam buras.
- d. Peningkatan nilai tambah produk dengan diversifikasi usaha dan pengolahan produk hasil pertanian.
- e. Pengendalian kebersihan dan kesehatan lingkungan

3.3 *Tingkat Wilayah*

- a. Peningkatan pendapatan masyarakat.
- b. Peningkatan pendapatan daerah.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

Program pengabdian kepada masyarakat di desa-desa Lingkar Kampus Darmaga diharapkan dapat menghasilkan "***konsep pendekatan model pengembangan sistem agribisnis terpadu dalam menumbuhkembangkan kesempatan ekonomi yang menunjang pembangunan pedesaan, pembinaan kelembagaan desa, dan kesejahteraan masyarakat***".

V. KERANGKA PEMIKIRAN

Pembangunan sebagai satu bentuk perubahan berencana dan direncanakan selalu diharapkan untuk melibatkan masyarakat. Semakin intens keterlibatan masyarakat dan semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati hasilnya adalah ciri keberhasilan pembangunan. Namun harapan ini tidak selalu terjadi, karena acapkali masyarakat hanya menjadi objek pembangunan yang lebih banyak dirancang dan diturunkan dari atas sehingga tidak mengakar dalam kebutuhan masyarakat. Karena itulah pembangunan harus memiliki keswadayaan bersama antara kelompok sasaran dan kelompok pelaksana pembangunan.

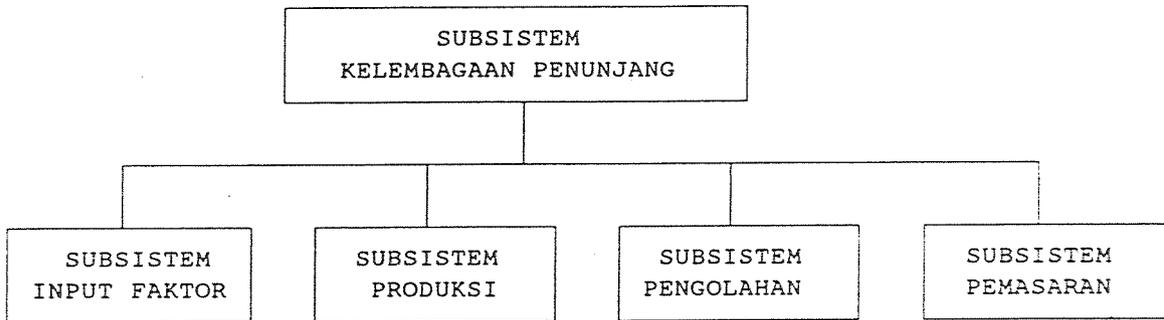
Seperti diketahui, Perguruan Tinggi dengan kampusnya merupakan pusat pengembangan ilmu dan teknologi yang diharapkan mampu untuk diterapkan dalam pembangunan masyarakat. Hal tersebut juga menjadi harapan masyarakat dalam mengembangkan diri dan lingkungannya. Institut Pertanian Bogor dengan dharma pengabdian kepada masyarakatnya telah mencoba menekuni kegiatan pedesaan yang terencana sejak tahun 1963 dan melahirkan beberapa konsep pemikiran pembangunan pedesaan yang kemudian diangkat menjadi program nasional.

Rencana pengembangan kampus Darmaga dengan memfokuskan semua kegiatan IPB di satu lokasi dimaksudkan untuk mentralisasi kegiatan belajar dalam satu lingkungan belajar yang lebih tenang. Namun, karena lokasi ini terletak atau dikitari oleh berbagai desa maka sudah sepatutnya pula IPB mempersiapkan desa-desa tersebut untuk dapat bersama-sama membina lingkungan kampus, tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga sebagai ajang kegiatan pengabdian pada masyarakat yang mendorong percepatan pembangunan di desa-desa tersebut.

Aplikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekitar kampus Darmaga akan menempatkan IPB sebagai agen pembangunan (Agent of Development) yang diharapkan dapat merekayasa inovasi-inovasi pembangunan untuk ditransfer ke masyarakat. Ciri utama kegiatan ini akan terkait dengan

keserasian pengelolaan sumberdaya alam dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan eksistensi teknologi. Dalam kaitannya dengan pengembangan kampus, maka peran sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama sebahagian besar masyarakat di desa-desa Lingkar Kampus IPB Darmaga akan mulai dianekaragamkan oleh perkembangan ekonomi selain pertanian sebagai ujud awal kegiatan menuju pola agribisnis.

Bagan 1. Pendekatan sistem pengembangan wilayah agribisnis terpadu di Lingkar Kampus Darmaga



Sistem agribisnis mengandung pengertian beberapa sub sistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Subsistem-subsistem tersebut adalah subsistem faktor input pertanian, subsistem produksi pertanian, subsistem hasil pengolahan pertanian, subsistem pemasaran (baik untuk faktor produksi, hasil produksi maupun hasil olahannya) dan subsistem kelembagaan penunjang.

Kondisi perubahan ini memerlukan intensifikasi atau ekstensifikasi kesempatan kerja produktif terhadap warga desa di sekitar kampus. Namun, upaya penumbuhan sikap partisipatif mereka terhadap peluang kerja tersebut perlu diimbangi dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang juga berkualitas. Hal ini mensyaratkan pemahaman mekanisme sosial masyarakat, mencakup kesadaran mereka menghadapi prospek kerja yang perlu dideteksi dari berbagai perspektif (mencakup teori, metodologi atau pendekatan model pembangunan) dan kegiatan produksi yang telah eksis di masyarakat, baik di bidang pertanian, industri, dan jasa.

Identifikasi model pendekatan pembangunan dengan orientasi pada peningkatan kualitas sumberdaya warga desa di sekitar kampus diacu pada upaya peningkatan kemampuan mereka untuk berfungsi sebagai *motor penggerak pembangunan* (engine of development) yang dapat mengelola dan mengalokasikan sumberdaya setempat dengan lebih sangkil dan mangkus. Peningkatan kualitas sumberdaya lainnya, yaitu teknologi,

modal, kelembagaan, dan lingkungan merupakan gabungan kekuatan yang perlu diantisipasi keserentakannya. Dalam hal ini, dukungan dan partisipasi seluruh warga kampus dan masyarakat di sekitar kampus (joint participative) merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dan harus ditumbuhkan secara kontinu dalam semangat kebersamaan menuju keswadayaan.

Dalam konteks ini, peran IPB sebagai agen pembangunan akan menentukan keinginan warga desa di sekitar kampus darmaga untuk menggali sumberdaya potensial yang menguntungkan orang banyak. Peran ini akan menjadi mungkin dan dapat dikondisi jika warga desa tidak diperlakukan sebagai obyek (penderita) tetapi juga sebagai subyek (pelaku) program pengabdian pada masyarakat yang akan dilakukan oleh IPB. Karena itu, pendekatan partisipasi (participatory approach) menjadi landasan utama kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, berbagai kegiatan pengabdian yang dirumuskan akan digerakkan dan diarahkan pada solusi keperluan dan masalah masyarakat (bottom-up approach) dan bukan hanya pada kepentingan IPB (top down approach).

VI. METODOLOGI

6.1. Pendekatan Program

Program pengabdian pada masyarakat di desa-desa Lingkar Kampus Darmaga dilakukan dalam bentuk kegiatan kaji tindak partisipatori (Participatory Action Research) dengan membuka kesempatan bagi warga desa setempat (khalayak sasaran) untuk berpartisipasi aktif untuk setiap pelaksanaan program. Pelaksanaan kaji tindak partisipatori ini bervariasi dari satu desa ke desa lainnya disesuaikan dengan situasi setempat dan jenis kegiatan.

6.2. Pelaksanaan Program

Program-program yang akan dilaksanakan merupakan program jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (5 tahun). Pelaksanaan kegiatan jangka pendek disesuaikan dengan prioritas program dan dana yang tersedia, sedangkan program jangka panjang akan dikaitkan dengan upaya perumusan pendekatan model pembangunan pedesaan.

Pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat di wilayah Lingkar Kampus Darmaga bersifat interdisiplin, yang melibatkan para staf pengajar dari berbagai fakultas di lingkungan IPB (Fakultas Pertanian, Peternakan, Kedokteran Hewan, Perikanan, Kehutanan, dan Teknologi Pertanian) di bawah koordinasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM).

Pelaksanaan program di lapangan dilakukan dengan menggunakan sistem koordinasi per jenis kegiatan yang merupakan modifikasi dari tahun lalu yang menggunakan sistem koordinasi per desa lokasi proyek. Setiap jenis kegiatan dikoordinasi oleh seorang koordinator lapangan menurut bidang keahlian yang cocok dengan kegiatan tersebut akan dilakukan dengan penyuluhan masalah, pelatihan kelompok spesifik, dan transformasi teknologi-teknologi produksi.

6.3. Evaluasi Program

Sesuai dengan tujuan Proyek Pengembangan Sistem Agribisnis Terpadu di Wilayah Lingkar Kampus Darmaga, evaluasi proyek akan dilakukan baik yang berkaitan dengan evaluasi proses, evaluasi hasil maupun evaluasi dampak.

Evaluasi tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring dan supervisi Pimpinan Proyek dan para Koordinator Program.

Pelaksanaan proyek ini pada tahun lalu (1992/1993) merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan hanya oleh dosen-dosen dari berbagai Fakultas di lingkungan IPB langsung kepada khalayak sasaran, yaitu warga desa di Kampus Darmaga. Pada tahun ini, program dilakukan bekerjasama dengan pihak Pemda/Bappeda Kabupaten Bogor, Lembaga Penelitian IPB selain Fakultas, Jurusan, Swasta dan warga desa di Lingkar Kampus Darmaga.

6.4. Lokasi dan Jenis Kegiatan

Lokasi kaji tindak partisipasi tahun 1992/1993 di 12 desa lingkar kampus Darmaga ditentukan berdasarkan hasil studi penjajagan awal yang dilakukan oleh Tim Inti Proyek LKD. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan identifikasi masalah dalam soal produksi (pertanian-peternakan, perikanan, kehutanan, dan teknologi pertanian), desa padat penduduk, dan pembinaan kelembagaan usaha. Jenis kegiatan yang dilakukan pada tahun 1992/1993 (program jangka pendek tahun pertama) terdiri dari 11 program.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan PPM di LKD tahun 1992/1993 dan masukan dari pihak Pemda DT II Kabupaten Bogor, lokasi kegiatan PPM tahun 1993/1994 di 10 desa terpilih dengan 10 program.

6.5. Partisipan Proyek

Partisipan proyek pengembangan wilayah agribisnis terpadu di lingkar kampus darmaga di tingkat lapangan/lokasi proyek terdiri dari:

1. Warga desa di lokasi proyek yang berusaha di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Warga desa yang berlokasi di permukiman padat penduduk.
3. Pengrajin industri
4. Kelembagaan desa (formal dan non formal)

Khalayak sasaran didasarkan pada metode pendekatan kelompok. Khusus untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat diaplikasikan dengan pendekatan kelompok dilakukan pendekatan individu contoh. Tetapi dalam perjalanan proyek menuju jangka waktu 5 tahun pertama kegiatan, diharapkan semua program/kegiatan sudah dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kelompok yang diarahkan pada kelompok bisnis dengan mempertimbangkan skala ekonomi per komoditas kegiatan.

VII. RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN TAHUNAN DAN JADWAL PROYEK

Pada akhir tiap tahun anggaran akan dilakukan seminar terbatas untuk kalangan IPB. Pada tahun ke-3 akan dilakukan seminar yang mencakup partisipan yang lebih luas dengan mengundang berbagai perguruan tinggi dan instansi sektoral yang terkait dengan pengembangan wilayah agribisnis terpadu. Pada tahun ke-5 akan dilakukan seminar tentang model sistem pengembangan wilayah terpadu yang dapat diintroduksikan ke berbagai pihak.

VIII. PROGRAM KERJA

Program Kerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa-desa Lingkar Kampus IPB Darmaga tahun 1992/1993 terdiri dari tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap formulasi program pengembangan wilayah terpadu lingkar kampus Darmaga yaitu:
 - 1.1. **Studi penjajagan awal di desa-desa Lingkar Kampus Darmaga** yang mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1.1 Penetapan rencana program per desa di lingkar kampus Darmaga
 - 1.1.2 Penilaian situasi awal desa (dalam kaitan input dan output)
 - 1.1.3 Evaluasi dampak kebijakan dan proyek dalam sektor publik.
 - 1.1.4 Determinasi/penentuan strategi awal pengembangan program wilayah terpadu LKMD.
 - 1.1.5 Identifikasi proyek.

- 1.1.6 Identifikasi strategi pengembangan jangka panjang.
 - 1.1.7 Audiensi dengan pihak Bappeda Kabupaten DT II Bogor, pada tanggal 29 Agustus 1992.
2. **Studi penjajagan per desa sebagai berikut:**
 - 2.1 Penilaian hasil studi penjajagan awal.
 - 2.2 Pengecekan ulang keterpaduan analisis spasial desa dan keperluan.
 - 2.3 Penyusunan rekomendasi yang berkaitan dengan perencanaan data, dan personil kegiatan.
 - 2.4 Persiapan dan penulisan draft proposal tiap proyek.
 3. **Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan per proyek kegiatan**
Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan per proyek adalah sebagai berikut (1) persiapan, (2) pelatihan, pembuatan demplot, dan pembinaan, (3) evaluasi kegiatan, dan (4) pelaporan.
 4. **Pertemuan Tim dan Supervisi Lokasi Kegiatan**
Pertemuan tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa-desa Lingkar Kampus IPB Darmaga dengan koordinator kegiatan per desa. Supervisi koordinator semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa-desa Lingkar Kampus (12 desa).
 5. **Seminar hasil kegiatan PPM Lingkar Kampus Darmaga.**
Seminar hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa-desa Lingkar Kampus IPB Darmaga direncanakan akan diseminarkan pada tahun 1993, baik untuk kalangan Kampus maupun partisipan lainnya di luar Kampus IPB.
 6. **Evaluasi**
Evaluasi tahunan untuk merumuskan program-program di tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi per proyek kegiatan per desa lokasi dan keseluruhan desa-desa di Lingkar Kampus IPB Darmaga.

IX. PELAKSANAAN DAN HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM) oleh Tenaga Dosen IPB di desa-desa Lingkar Kampus Darmaga tahun anggaran 1992/1993 dilakukan di 12 desa mencakup 23 kegiatan. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam :

- (1) Pengembangan Ayam Buras dan Longyam Buras
- (2) Pemeliharaan Ternak Domba
- (3) Pembinaan Industri Rumahtangga
- (4) Pembinaan Perikanan

- (5) Pembinaan Pedagang Makanan Jajanan
- (6) Tanaman Energi
- (7) Sanitasi Lingkungan
- (8) Pengembangan Usahatani Terpadu
- (9) Pembinaan BPR/KUD

Adapun rincian pelaksanaan, dampak dan masalah kegiatan PPM tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan dan Dampak Kegiatan PPM tenaga Dosen di 12 Desa Lingkar Kampus IPB Darmaga.

No. Kegiatan	Tujuan	Pendekatan	Lokasi (Desa)	Khalayak	Hasil	Dampak	Masalah
1. Pengembangan ayam buras	Memasyarakatkan pemeliharaan ayam buras	Kelompok	Marga Jaya Sinarsari	Pemuda Putus Sekolah, PKK, Karang Taruna,	Telur, ayam bibit	Diseminasi Pertumbuhan ekonomi	Modal Vaksin
2. Pengembangan domba unggul	Memasyarakatkan pemeliharaan domba unggul lokal	Kelompok Individu	Neglasari Sinarsari	Kelompoktani, petani	domba bibit, anak	Diseminasi Pertumbuhan ekonomi, cara berternak	Modal, bibit domba unggul
3. Industri rumah-tangga	Menciptakan lapangan kerja bagi penganggur	Kelompok	Cikarawang Darmaga Neglasari	Pemuda Putus Sekolah, PKK, Karang Taruna, Pengajian, kelompok pengrajin (pala)	Tersedia-nya produk yang dijual di pasar	Pertumbuhan ekonomi	Modal, Keterbatasan keterampilan Sikap inovatif.
4. Pembinaan manajemen usaha kecil	Meningkatkan skala usaha dan mutu serta hasil produksi	Kelompok pengrajin kerajinan/konveksi	Bubulak Petir	Para Pemuda putus sekolah PKK dan Masyarakat industri	Bahan-bahan Konveksi yang bermutu	Diseminasi pertumbuhan ekonomi	Modal, keterbatasan keterampilan
5. Perikanan	Meningkatkan produksi perikanan.	Individu Kelompok Kelembagaan/LKMD	Situgede Cihideung Ilir	Petani Masyarakat Aparat desa	Bibit ikan Tekn. IG.	Sosialisasi pembenihan ikan pemeliharaan Situ..	Modal Benih ikan Teknologi
6. Pascapanen Singkong, kedele	Meningkatkan keterampilan pengolahan pascapanen	Kelompok	Neglasari Darmaga Cikarawang	Ibu-ibu rumah tangga, kelompok PKK	peningkatan pendapatan, industri rumah tangga.	Terbentuknya kel.2 usaha Lapangan pekerjaan	Modal Tempat usaha

No. Kegiatan	Tujuan	Pendekatan	Lokasi (Desa)	Khalayak	Hasil	Dampak	Masalah
7. Pedagang Makanan Jajanan	Meningkatkan kebersihan & kesehatan	Individu Kelompok	Babakan	Pedagang makanan, konsumen	Penanganan kebersihan lingkungan	Tumbuhnya kesadaran masy. akan kebersihan lingk.	Lokasi jualan, limbah
8. Sanitasi Lingkungan	Mengatasi persoalan limbah	Individu, kelompok,	Babakan	Masyarakat, pemuka desa (formal dan nonformal)	Bangunan bak sampah, gero-bak pengangkut sampah, tim kebersihan	Kesadaran akan kebersihan	Lokasi TPS/ TPA, modal/ sarana
9. Tanaman energi	Penyediaan bahan bakar & kelestarian lingk.	Individu, kelompok, aparatus desa	Balumbang Jaya	Masyarakat	Tanaman energi (kaliandra)	Tersedianya sumber energi	Lokasi tanam
10. Pembinaan BPR/KUD	Peningkatan jasa kelembagaan desa	Kelembagaan	Balumbang Jaya	Pengurus BPR/KUD	sedang ber-langsung	-	-
11. Usaha Tani-Terpadu	Peningkatan produksi & produktivitas pertanian.	Individu, kelompok	Neglasari Balumbang jaya, Cihideung Ilir	Masyarakat/ kelompok-tani, anak sekolah	Bibit tanaman (jagung, kedele, pokcai, dll), dinamika kelompok	Peningkatan produksi, pendapatan, kemampuan kelompok, penambahan pe-	Lokasi demo., modal, pemasaran

Pelaksanaan program PPM di desa-desa Lingkar Kampus IPB Darmaga sebagian besar melalui pendekatan kelompok, baik kelompok formal maupun kelompok informal yang sudah eksis di desa-desa tersebut atau kelompok yang sengaja dibentuk untuk terselenggaranya kegiatan bersangkutan. Pendekatan kelompok yang dilakukan dalam kegiatan PPM ini dengan pertimbangan bahwa melalui kelompok inilah anggota dapat melakukan "social control" terhadap anggota yang lain, sehingga kegiatan kelompok dan keberlangsungannya dapat dipertahankan. Selain itu, paket-paket teknologi yang diintroduksikan kepada masyarakat pada umumnya dan khalayak sasaran pada khususnya secara berkelompok dinilai telah memenuhi kriteria "economies of scale" setelah melalui proses uji coba/pengalaman praktis di lapangan. Dalam hal ini teknologi yang diintroduksikan kepada khalayak sasaran diutamakan bagi usaha-usaha yang digeluti oleh masyarakat miskin, dalam artian netral menurut skala usaha (terjangkau petani berlahan sempit dan bermodal terbatas misalnya). Dengan demikian kelembagaan yang dikembangkan diharapkan mampu mendukung masyarakat petani dan desa tidak saja dalam menyebarkan dan mengembangkan teknologi baru, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat kerjasama dalam kelompok.

Kelompok formal atau non-formal yang menjadi khalayak sasaran kegiatan PPM tersebut beragam dan dipilih secara purposive berdasarkan jenis kegiatan PPM dan keragaan yang dimiliki oleh kelembagaan yang eksis di desa. Misalnya, kegiatan pemeliharaan ayam buras di desa Margajaya dipilih kelompok karang taruna Krida Muda yang sebelumnya mempunyai kegiatan yang sama, atau di desa Balumbang Jaya adalah kelompok PKK.

Pembentukan kelompok baru diantaranya dilakukan di desa Cihideung Ilir yaitu kelompok tani "Sauyunan" dalam rangka kegiatan pemanfaatan situ Cihideung. Faktor kepemimpinan dalam kelompok dan dinamika kelompok tentunya mempengaruhi keberhasilan kelompok dalam kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan PPM di lapangan ada perbedaan pendekatan dalam introduksi paket-paket teknologi dan pendekatan kelembagaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh IPB dengan pendekatan aparat dinas-dinas. Hal ini memungkinkan masyarakat sebagai khalayak sasaran menjadi "bingung". Karena itu komunikasi antara pihak IPB dan aparat dinas dalam membina masyarakat perlu dilakukan, sehingga terjadi "kesatuan gerak" dan tidak menimbulkan kesan bahwa pihak perguruan tinggi seolah-olah menggantikan peran aparat dinas.

Walaupun program PPM di desa-desa Lingkar Kampus Darmaga ini direncanakan sebagai program yang berdimensi jangka menengah, beberapa pelaksanaan paket teknologi ternyata sudah dapat dijadikan model, seperti pemeliharaan ayam buras dan kambing/domba dengan skala ekonomi tertentu. Sedangkan paket-paket teknologi yang lain seperti pengolahan keripik singkong, tumpang sari jagung manis dan kacang tanah, atau budidaya ikan mas dan tawes, masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk sampai pada tahap sebagai model yang memenuhi kriteria dari aspek teknis memungkinkan, ekonomis menguntungkan dan secara sosial sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu.

Pengembangan sumberdaya manusia warga Kampus Darmaga melalui kegiatan pelatihan-pelatihan keterampilan teknis dan manajemen usahatani dan penumbuhkembangan semangat kerjasama kelompok merupakan hasil positif yang perlu terus dibina. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan PPM terhadap perubahan perilaku masyarakat secara nyata baru menyangkut aspek pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik). Dalam hal perubahan tindakan introduksi beberapa paket teknologi seperti pengusahaan budidaya jagung manis, budidaya ikan atau pembenihan ikan sudah dapat dilihat hasilnya walaupun secara kuantitas masih sedikit. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya pembinaan dari pihak IPB terhadap masyarakat.

Komponen bantuan fisik yang diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari introduksi paket-paket teknologi dalam kegiatan PPM tersebut seperti ternak ikan, bibit tanaman, pupuk, peralatan produksi dan kandang serta bantuan fisik lainnya diharapkan dapat dijadikan sebagai "pancingan" yang kelak akan berkembang dan menyebar kepada sasaran yang lebih luas. Dalam hal ini diupayakan sistim revolving yang khas untuk program/kegiatan PPM tertentu yang dinilai akan menguntungkan pihak masyarakat dan IPB.

X. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) Tenaga Dosen IPB di 12 desa Lingkar Kampus Darmaga pada tahun anggaran 1992/1993 telah menunjukkan potensi sumberdaya desa disekitar kampus yang sangat potensial dan strategis untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Kegiatan pengabdian dalam pengembangan wilayah terpadu di desa-desa Lingkar Kampus Darmaga yang telah dilakukan dengan orientasi pada pendekatan kaji tindak dan aplikasi teknologi tepatguna ternyata telah dapat menunjukkan dampak positif berupa perubahan perilaku masyarakat pada umumnya dan khalayak sasaran pada khususnya. Hal ini tidak terlepas dari minat masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut melalui pendayagunaan kelembagaan-kelembagaan setempat yang eksis atau pembentukan kelembagaan baru di tiap desa.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di desa-desa lingkar kampus dalam menumbuhkembangkan kesempatan ekonomi yang sejalan dengan perkembangan desa-desa Lingkar Kampus sebagai akibat dari kegiatan PPM pada tahun anggaran 1992/1993 belum optimal. Namun beberapa paket yang diintroduksi kepada masyarakat dalam rangka kegiatan PPM di desa Lingkar Kampus Darmaga sudah dapat diangkat sebagai model yang memungkinkan dikembangkan di tempat lain. Tetapi paket-paket teknologi tertentu masih memerlukan pengkajian lebih lanjut sebelum disebarluskan.

Sehubungan dengan hal di atas dan dalam rangka penyusunan model pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan menciptakan keharmonisan dan keserasian antara kehidupan kampus dan lingkungan masyarakat di sekitarnya, kegiatan PPM Tenaga Dosen di desa-desa Lingkar Kampus Darmaga tersebut perlu bersinambung (jangka menengah). Berdasarkan analisa potensi dan masalah yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan tersebut pada periode 1992/1993, dapat diupayakan

penajaman prioritas desa dan kegiatan-kegiatan yang diantisipasi akan memberikan kontribusi dalam penyusunan model pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini kerjasama dengan Pemda/Bappeda merupakan satu strategi rekayasa sosial yang (akan) dilakukan pada tahun-tahun program mendatang

SUSUNAN TIM

1. Dr.Ir. Aida Vitayala S. Hubeis
2. Dr.Ir.H. Sjafri Mangkuprawira
3. Ir. Ida Yuhana F. Tonny, MA
4. Ir. Suprihatin Guhardja, MS
5. Ir. Ade Iskandar.

PENGEMBANGAN WILAYAH DESA PANTAI SECARA TERPADU
DI DESA PASIR BARU KECAMATAN CISOLOK
KABUPATEN DT II SUKABUMI ¹⁾

Oleh:
Sunatmo Sardono dan Tim ²⁾

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Indonesia, yang merupakan negara kepulauan, mempunyai garis pantai yang terpanjang di dunia. Desa pantai adalah terletak di dataran pantai termasuk areal dengan relief rendah yang dibatasi satu sisinya oleh laut dan sisi lainnya oleh dataran tinggi dimana dapat dijumpai sedimen marin, dan secara struktur termasuk tanah kering yang dipengaruhi pasang surut. Sebagian besar penduduk desa pantai bermata pencaharian di bidang perikanan, terutama menangkap ikan. Secara umum mereka termasuk dalam kategori miskin. Kondisi yang demikian dapat menimbulkan berbagai kerawanan, antara lain kerawanan ekonomi dan pada gilirannya kerawanan sosial, apabila tidak mendapatkan perhatian yang layak, terlebih lagi mengingat pantai merupakan suatu daerah yang terbuka.

Upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang kini menjadi fokus perhatian pemerintah, perlu diwujudkan pula pada masyarakat desa pantai. Upaya apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melaksanakannya, secara umum telah sering dikemukakan, yaitu dengan peningkatan produktivitas masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada secara lestasi.

Upaya peningkatan produktivitas memerlukan pembinaan yang berkesinambungan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan dan kaji tindak untuk memanfaatkan dan menumbuhkembangkan potensi yang ada di desa pantai.

-
- 1) Makalah disajikan dalam Lokakarya "Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan", LPM IPB, 10 Juli 1993
 - 2) Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan IPB (Anggota Tim terlampir).

Konsep pembinaan dan pengembangan desa pantai jauh lebih kompleks dibandingkan dengan desa bukan pantai. Hal ini sebagai akibat aktifitas masyarakat desa pantai yang lebih dinamis, namun sangat tergantung kepada musim dan, oleh karena itu, jadwal kerja yang tidak teratur.

Mengingat kompleksitasnya perlu dilakukan suatu upaya pembinaan dan pengembangan secara konkret desa pantai kasus per kasus, untuk kemudian diformulasikan secara umum.

Sebagai langkah awal, LPM IPB melakukan pembinaan dan pengembangan desa pantai yang terpadu di Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.

2. Tujuan

Pengembangan desa pantai Cisolok mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah meningkatkan pendapatan/kesejahteraan masyarakat desa pantai.

Tujuan khusus adalah :

- a. Mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya pendapatan nelayan
- b. Memecahkan permasalahan dari faktor-faktor pada butir a.
- c. Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan nelayan.

3. Manfaat

Studi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah dan IPB.

Masyarakat mendapatkan informasi dan tambahan pengetahuan mengenai teknologi, pemasaran, pasca panen dan kelembagaan.

Pemerintah Daerah mendapatkan masukan-masukan untuk pengambil kebijaksanaan seterusnya.

IPB/LPM mendapatkan umpan balik dari suatu penerapan inovasi.

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH

1. Kondisi Umum

Desa Pasir Baru mempunyai luas 1402 km². Batas utara desa ini adalah Desa Ciwaringin sedangkan di bagian selatan adalah perairan teluk Pelabuhan Ratu. Di bagian barat dibatasi oleh Kali Cibareno (Wilayah Kabupaten Lebak) dan di sebelah timur dibatasi oleh Desa Cikahuripan (lihat peta). Kantor Desa Pasir Baru terletak pada jalan raya Cibadak-Bayah (Kab. Lebak) yaitu pada km 4.5 dari Kantor Kecamatan dan 79 km dari Kantor Kabupaten.

Sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian lahan kering dan perikanan laut. Tanah sawah yang diusahakan seluas 132 ha dan kesemuanya merupakan sawah tadah hujan. Sedangkan luas lahan kering keseluruhannya adalah 1146 ha. Kegiatan perikanan yang ada di desa tersebut adalah perikanan tangkap.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Pasir Baru berjumlah 1129 KK. Berdasarkan bidang usahanya dapat dikelompokkan menjadi: Rumah Tangga Pertanian (85,0 %), Rumah Tangga Industri (1,8 %), Rumah Tangga Perdagangan (10,7 %) dan Rumah Tangga Nelayan (2,5 %)

Tingkat pendidikan buruh nelayan rata-rata masih rendah, yakni tamat SD ke bawah dengan mata pencaharian utama pada musim penangkapan menjadi buruh nelayan. Setelah musim penangkapan, suami maupun isteri bekerja sebagai buruh pengumpul batu untuk pertamanan dan bangunan. Mata pencaharian tambahan bagi rumah tangga yang paling penting adalah usaha tani pisang serta menjadi buruh pengasin (terutama bagi isteri).

Rata-rata pendapatan total rumah tangga per tahun sebesar Rp 949.690,00 dengan pendapatan rata-rata per kapita per tahun sebesar Rp 230.507,00. Secara proporsional pendapatan tersebut berasal dari kegiatan di sektor perikanan (16,11 %), kegiatan pengumpulan batu (46,70 %) dan sisanya (43,19 %) berasal dari usaha pertanian dalam arti luas (pisang).

3. Potensi Perikanan

Teluk Pelabuhan Ratu sangat potensial sebagai daerah penangkapan ikan. Tingginya potensi sumberdaya perikanan di wilayah tersebut memacu perkembangan usaha perikanan tangkap. Namun perkembangan usaha tersebut berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Cabang Dinas Perikanan Kecamatan Cisolok selama dua tahun (1991/1992) dapat dikatakan bahwa jumlah alat tangkap di Desa Pasir Baru tidak ada perkembangan (Tabel 1 dan 2).

Berdasarkan pemilikan perahu dan alat tangkap, nelayan di Desa Pasir Baru termasuk nelayan yang kurang berkembang. Dengan sarana tangkap tersebut (sebagian besar bagan perahu) maka jenis dan jumlah ikan yang tertangkap pun sangat terbatas.

Dari segi sumberdaya perikanan, didasarkan pada hasil tangkapan yang tercatat di Pelabuhan Ratu dan Cisolok, jenis-jenis ikan yang tertangkap dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Perahu di Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.

Desa	Jenis Kapal				
	Jukung	PKTM	PSTM	PBTM	MT
Cisolok	-	-	-	-	12
Cikahuripan	22	38	-	-	86
Pasir Baru	15	-	-	-	8
Karang Papak	40	-	-	-	1

Sumber data: Dinas Peternakan/Pelabuhan Ratu

Tabel 2. Jenis dan Jumlah Alat Tangkap di Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok Kab. Sukabumi.

Desa	Alat Tangkap					
	Payang Kopet	Jaring	Jaring Tembung	Bagan	Pancing Perahu	Pukat Pantai
Cisolok	12	-	-	-	-	-
Cikahuripan	48	60	38	5	22	3
Pasir Baru	3	-	-	31	35	3
Karang Papak	1	-	-	-	40	1

Sumber data: Dinas Peternakan/Pelabuhan Ratu

Tabel 3. Jenis-jenis ikan yang tertangkap pada Periode Tahun 1991.

Bulan	Jenis Ikan						
	Kembung	Layang	Tongkol	Tembang	Cakalang	Petek	Layur
Januari 1991	++	++	+++	-	-	-	+
Februari	+	-	++	++	++	++	+
Maret	+	-	+	+	+++	+	+
April	+	+	++	+	++	++	+
Mei	++		++++	++	+	++	+
Juni	++		+++	++	++	+++	-
Juli	+		+++	-	++++	+	+
Agustus	+		+++	+	+++	+	+
September	+		+++	+	-	++	+
Oktober	-	+	++	-	-	-	-
Nopember	-	++	++	-	-	++	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data: Dinas Peternakan/Pelabuhan Ratu

Keterangan: + = Ada ; ++ = banyak ; > +++ = sangat banyak

Tabel 3 tersebut, menunjukkan bahwa jenis ikan yang banyak tertangkap di perairan Teluk Pelabuhan Ratu adalah: tongkol, cakalang, kembung, dan tembung, sedangkan jenis-jenis ikan lainnya jumlahnya relatif sedikit.

Tabel 4. Alat Tangkap dan Jenis Ikan yang tertangkap

Jenis Alat Tangkap	Jenis Ikan yang Tertangkap
Payang	Tongkol, Tuna, Cakalang, Petek
Dodol	Udang
Pukat Pantai	Udang, Petek
Jaring Insang Hanyut	Tongkol, Tuna, Cakalang, Cucut, Jangilus
Trainel Net	Udang
Jaring Rampusan	Udang
Jaring Kopet	Tongkol, Tembang
Bagan Perahu	Tembang, Tongkol, Petek, Teri
Bagan Tancap	Tembang, Petek, Teri
Rawai	Tongkol, Tuna, Cucut, Cakalang, Jangilus, tembung
Pancing	dan Layur

Sumber: Wawancara dan olahan data

4. Usaha Penangkapan Ikan

Usaha penangkapan ikan di perairan Teluk Pelabuhan Ratu pada umumnya dan di perairan Desa Pasir Baru Kecamatan Ciselok pada khususnya sampai saat ini masih terdiri atas usaha penangkapan yang tradisional dengan menggunakan perahu berukuran kecil yang jangkauan operasinya masih terbatas. Jenis ikan hasil tangkapan berdasarkan alat tangkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan Desa Pasir Baru, maka jenis-jenis ikan yang dapat tertangkap meliputi: tembang, tongkol, petek, teri, cakalang, cucut dan layur. Berdasarkan keragaman jenis-jenis ikan hasil tangkapan tersebut, Desa Pasir Baru mempunyai peluang untuk mengembangkan komoditi hasil olahan (pasca panen).

Untuk mencapai tujuan peningkatan produksi (sesuai dengan tujuan pengembangan Perikanan Repelita V) maka perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan penangkapan ikan yang antara lain dapat berupa perbaikan rancangan dan konstruksi kapal dan alat penangkapan ikan, perbaikan metoda penangkapan, ekstensifikasi dan intensifikasi operasi penangkapan.

Usaha penangkapan di perairan Pelabuhan Ratu, perairan yang memiliki akses ke Samudera Hindia maka pengembangan usaha penangkapan ikan tuna dan cakalang merupakan usaha yang mempunyai prospek yang cerah. Tuna dan cakalang merupa-

kan potensi laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi, baik sebagai komoditi ekspor maupun untuk konsumsi dalam negeri. Ikan tuna dan jenis-jenis tuna merupakan jenis ikan bergerombol yang hidup di perairan tropis dan subtropis, kebanyakan bersifat palagis.

5. Pasca Panen

Hasil tangkapan ikan jenis-jenis ekonomi penting seperti tongkol, layur dan tembang dipasarkan dalam bentuk ikan segar. Sedangkan ikan-ikan yang kurang ekonomis penting seperti petek, teri dan cucut diolah menjadi ikan asin dan terasi dengan kualitas yang rendah.

Sebagian besar pengusaha mengolah ikan asin dan hanya sebagian kecil yang mengolah terasi.

III. PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH

1. Perumusan Masalah

Tingkat pendapatan yang rendah dari nelayan umumnya disebabkan oleh (1) faktor alamiah dan (2) faktor struktural. Faktor alamiah terutama adalah fluktuasi hasil tangkapan yang tinggi dan sumberdaya manusia, sehingga peluang untuk memproduksi relatif kecil ataupun jika kegiatan produksi dapat dilakukan umumnya dengan tingkat efisiensi yang rendah. Sedangkan faktor struktural disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh tatanan kelembagaan. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kelembagaan adalah dalam pengertian yang paling luas yaitu tidak hanya mencakup tatanan organisasi tetapi juga mencakup aturan permainan yang ditetapkan.

Dari hasil analisis situasi dan potensi di Desa Pasir Baru maka tingkat pendapatan masyarakat nelayan lebih banyak disebabkan oleh faktor alamiah. Faktor alamiah yang dijumpai antara lain: (1) penangkapan, ketrampilan dan penguasaan teknologi yang rendah, (3) harga hasil perikanan yang rendah pada musim tangkap dan (4) kelembagaan usaha nelayan yang belum berfungsi.

Secara spesifik permasalahan utama yang terdapat di Desa Pasir Baru adalah:

- a. Alat penangkapan ikan dengan sistem bagan perahu memiliki produktivitas yang rendah, meskipun jumlah dominan (67,18%).
- b. Tingkat pendapatan yang diperoleh saat ini baik dari mata pencaharian menangkap ikan maupun mencari batu masih

tergolong rendah. Untuk itu diperlukan usaha diversifikasi kegiatan yang dapat menambah pendapatan baik di bidang pertanian khususnya pemanfaatan lahan pekarangan, maupun pengembangan ternak kecil. Kendala utama dari pengembangan tersebut di atas adalah terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan nelayan disamping waktunya yang relatif terbatas.

- c. Teknologi penangkapan dan pengolahan hasil pasca panen yang masih sederhana, sehingga nilai tambah yang diperoleh masih terbatas/kecil.
- d. Peserta masyarakat yang relatif terbatas terutama dalam aktivitas/usaha peningkatan pendapatan masyarakat nelayan.

2. Pemecahan Masalah

Berdasarkan analisis situasi dan potensi serta kendala-kendala pengembangan yang dijumpai dalam usaha peningkatan pendapatan masyarakat nelayan khususnya nelayan bagan, maka program yang dapat dilakukan bersifat terpadu. Secara operasional keterpaduan di sini meliputi keterpaduan kegiatan fisik yang dikaitkan dengan peningkatan peran kelembagaan yang ada di masyarakat.

Berbagai program yang dapat dilaksanakan dalam pembinaan dan pengembangan desa pantai sangat tergantung pada kelompok sasaran yang akan dibina, keikutsertaan instansi terkait serta ketersediaan waktu dan dana. Berdasarkan hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat maka kelompok sasaran utama pembinaan adalah (1) nelayan buruh/pendega, (2) isteri nelayan dan (3) masyarakat nelayan sekitarnya.

Program yang dilaksanakan meliputi:

A. Bidang Sosial Ekonomi

- (1) Pembentukan kelompok nelayan buruh
- (2) Pembinaan usaha kelompok nelayan buruh
- (3) Program peningkatan pendapatan
 - Peningkatan pendapatan utama
 - Peningkatan pendapatan sambilan
 - Peningkatan pendapatan usaha sambilan

B. Bidang Pasca Panen

- (1) Pembinaan mutu dan penanganan pasca panen dan yang telah ada saat ini agar lebih diperoleh nilai tambah dari produk yang dihasilkan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan diversifikasi produk olahan ikan yang telah diperkenalkan sebelumnya.
- (3) Pemanfaatan limbah hasil perikanan
- (4) Menjajagi kemungkinan pengembangan hasil tangkapan lain dan hasil laut (rumput laut) untuk meningkatkan pendapatan nelayan.

C. *Diversifikasi Usaha*

Diversifikasi usaha yang diharapkan dapat meningkatkan peran anggota keluarga nelayan dalam bentuk pemeliharaan ayam buras dan pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman hortikultura.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Realisasi Pemecahan Masalah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Peningkatan ketrampilan nelayan pendega dalam bidang pengolahan hasil perikanan, pemeliharaan ayam buras dan pemanfaatan lahan pekarangan.
- b. Demonstrasi pengolahan hasil perikanan berupa contoh dan cara pembuatan terasi.
- c. Demonstrasi penanaman lahan pekarangan seluas 600 m².

2. Khalayak Sasaran

Program yang dilaksanakan merupakan program penerapan ilmu dan teknologi yang relatif baru bagi masyarakat setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi maka kelompok sasaran adalah:

- a. Kelompok nelayan bagan apung/pendega, merupakan prioritas utama karena mereka adalah kelompok yang akan menerima akibat langsung dari rencana penghapusan bagan apung. Didalam pelaksanaan program ini kelompok sasaran adalah seluruh warga RT 2 Desa Pasir Baru (40 KK).
- b. Kelompok petani maju (early adapter) yang terdiri dari atas perahu, pengusaha dan tengkulak (10 orang).
- c. Kelompok ibu-ibu PKK Desa Pasir Baru (10 orang).

3. Metode

3.1. Persiapan

3.1.1. *Analisis Situasi*

Analisis sosial masyarakat dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung (data primer) terhadap nelayan kelompok sasaran (80 %). Data yang diperoleh dari hasil wawancara meliputi:

- 1.1. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan
- 1.2. Distribusi responden berdasarkan jenis mata pencaharian
- 1.3. Jumlah tanggungan keluarga
- 1.4. Pendapatan rumah tangga dan distribusi pendapatan (Sayogyo)
- 1.5. Alokasi waktu untuk pekerjaan

3.1.2. Analisis Kebutuhan

Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan mengikuti kegiatan yang dilakukan nelayan. Pengumpulan data antara lain meliputi problema utama yang dihadapi. Kegiatan rutin dan insidental yang dilakukan, keorganisasian, keadaan masyarakat nelayan baik dilihat dari segi sosial ekonomi, pendidikan maupun pandangannya terhadap suatu inovasi baru dan lain-lain.

3.1.3. Analisis Penciptaan Kegiatan yang Produktif

Pengumpulan data ini dilakukan bersamaan dengan tahap kegiatan 1, meliputi masalah sumberdaya hasil perairan (potensi, produksi, dll) sehubungan dengan penciptaan kegiatan usaha yang produktif dan pemilihan paket teknologi hasil perikanan yang akan dikembangkan.

3.1.4. Sosialisasi Program

Kegiatan ini bersifat pendekatan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dari program serta dampaknya terhadap tingkat pendapatan masyarakat.

3.1.5. Penentuan Peserta

Peserta program diversifikasi usaha pengembangan ternak kecil dan pemanfaatan lahan pekarangan adalah buruh nelayan (40 orang), sedangkan peserta program pengolahan hasil perikanan adalah petani maju dan kelompok PKK.

3.2. Pelaksanaan Program

3.2.1. Pelatihan

Pelatihan dilakukan selama dua hari dan diikuti oleh 40 orang peserta. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta program. Materi pelatihan meliputi:

(1) Latihan pengolahan terasi

Pelatihan ini bertujuan untuk melengkapi para pengolah hasil perikanan dengan pengetahuan dan kecakapan yang lebih tinggi. Peserta latihan berjumlah 11 orang, di dalam latihan lebih banyak diberikan kerja praktek dari mulai penanganan bahan baku, pengolahan dan pengemasan produk terasi.

Disamping itu sebelumnya diberikan pula teori mengenai dasar-dasar pengetahuan praktis mengenai teknologi pengolahan terasi, usaha pengolahan (untung-rugi usaha), pemasaran dan pengetahuan lainnya.

Untuk hal tersebut diktat mengenai paket pengolahan terasi telah diberikan kepada peserta pelatihan.

(2) Cara-cara pemeliharaan ayam buras

Pelatihan ini dilaksanakan secara berkelompok terdiri dari 6 orang. Lahan yang digunakan untuk kandang adalah milik salah satu anggota kelompok yang ada di RT 2 Desa Pasir Baru seluas $\pm 120 \text{ m}^2$. Bentuk kandang dengan

sistem postal terdiri dari 2 lantai, yaitu lantai atas untuk bertelur ($35 \text{ cm}^2 = 1$ ekor) dan lantai bawah untuk program breeding dengan ratio 10 ekor betina : 1 jantan (luasan 1 m^2 untuk 3-4 ekor). Bahan kandang terbuat dari bambu, dengan atap rumbia dan lantai dialasi dengan sekam dan pasir untuk penyerapan bahan yang basah.

Kandang diletakkan pada lahan pekarangan dikelilingi pagar bambu setinggi $\pm 2,5 \text{ m}$ (pagar keliling berfungsi agar ayam dapat bebas di lahan yang dipagar sehingga aman dari pencurian dan gangguan binatang).

Jumlah ayam buras yang diberikan kepada kelompok sebanyak 100 ekor betina dan 10 ekor jantan dengan umur 20 - 24 minggu serta telah memenuhi syarat sebagai bibit. Sistem pengembalian (revolving) setelah pemeliharaan berlangsung 1 tahun kelompok akan mengembalikan ayam sebanyak jumlah dan umur yang diterima pertama kali.

Pencegahan penyakit ND (tetelo) dilaksanakan melalui pembentukan kader vaksinator dari anggota kelompok dan sekaligus pelaksanaan vaksinasi.

Pakan menggunakan dedak yang dicampur dengan pakan jadi (konsentrat BR 511 dan BR 512) perbandingan 1 : 10 dan 1 : 2, diberikan pada pagi dan sore hari. Air minum diberikan secukupnya (ad libitum).

- (3) Cara-cara pemanfaatan lahan pekarangan. Lahan pekarangan umumnya belum dimanfaatkan secara baik dan optimal. Untuk hal tersebut dilakukan latihan cara pemanfaatan dengan tanaman pekarangan yaitu kacang panjang, kangkung darat, buncis, cabe keriting, bayam dengan lahan petani peserta program (10 orang).

3.2.2. Demonstrasi

- (1) Demonstrasi pengolahan pembuatan terasi dengan inovasi peralatan pembuatan terasi dan cara-cara pengolahan. Setelah demonstrasi, diserahkan 1 set alat pengepres terasi untuk digunakan secara kelompok (11 orang).
- (2) Demonstrasi dan praktek pemeliharaan ayam buras dan cara-cara penanggulangan terutama tetelo.
- (3) Demonstrasi dan praktek penanaman lahan pekarangan di lahan nelayan dengan tanaman sayur-sayuran seluas 600 m^2 . Kegiatan dilaksanakan oleh keenam nelayan tersebut dengan cara gotong royong, dibantu oleh sanak keluarga mereka, aparat desa dan staf LPM IPB. Pada lahan tersebut dibuat bedengan-bedengan memanjang dengan menebang tanaman pisang muda yang tumbuh tidak beraturan. Tiap bedengan ditanami dengan satu jenis tanaman yaitu masing-masing kacang panjang, buncis, cabe, kangkung darat, bayam dan jahe.

Untuk menghindari gangguan ayam, tiap lahan dipagari dengan stek tanaman ketela pohon dan jala bekas setinggi kira-kira 80 cm. Dalam masa pertumbuhannya, tanaman-tanaman tersebut tetap dikunjungi untuk diawasi secara berkala oleh Tim LPM IPB.

V. HASIL DAN PELAKSANAAN

5.1. Pasca Panen

Pembentukan kelompok pengolahan ikan berdasarkan paket teknologi sederhana. Di Desa Pasir Baru terdapat 12 orang pengolah ikan yang tergabung dalam kelompok pengolah ikan. Paket teknologi yang dipilih dan dikembangkan adalah pengolahan terasi. Alat pengolahan terasi seperti alat pencetak sederhana sudah berhasil dibuat dan merupakan modifikasi sederhana sehingga mudah dioperasikan oleh para pengolah. Modal ini digunakan untuk produksi sedangkan modal peralatan pengolahan dan pengemasan dibantu oleh LPM IPB, disamping itu dilakukan juga bimbingan pemasaran dan teknik produksi.

Kendala yang dijumpai dalam penggunaan alat pencetak terasi adalah:

- a. Bahan baku pembuat terasi (ikan) hanya diperoleh pada saat-saat tertentu (berkaitan dengan musim) sehingga pemanfaatan alat tersebut terbatas.
- b. Harga alat yang masih relatif tinggi, sehingga tidak setiap nelayan bisa memiliki.

Dalam bidang perikanan, berdasarkan hasil kegiatan di lapangan menunjukkan bahwa pembinaan buruh nelayan lebih ditekankan pada perbaikan alat tangkap, meskipun dalam tahun ini program lebih ditekankan pada bidang penyuluhan. Antusias nelayan cukup tinggi dalam mengikuti pelatihan, dengan terbentuknya kelompok kegiatan usaha perikanan. Untuk tahap awal kegiatan telah dilakukan kegiatan demonstrasi pembuatan dan pencetakan terasi. Meskipun hasilnya belum memuaskan tetapi keinginan masyarakat untuk memodifikasi dan mengembangkan secara sendiri cukup besar. Hal ini telah ditunjukkan dengan adanya hasil terasi yang telah diproduksi dan dipasarkan sebagai hasil perbaikan dari teknologi yang ada selama ini.

5.2. Peternakan Ayam Buras

Selama lebih kurang 4 bulan perkembangan ayam buras terlihat memberikan hasil yang cukup menggembirakan. Kematian sekitar 4 ekor ayam betina induk terjadi pada saat ayam tiba di lokasi diakibatkan oleh stress. Dan pada saat itu telah bertelur \pm 14 ekor dengan jumlah telur berkisar 10-12 butir per ekor. Telur tersebut sebagian dijual untuk konsumsi dan sebagian lagi ditetaskan untuk mengganti dan menambah jumlah ayam (replacement).

Masalah vaksin merupakan hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena ketersediaan vaksin cukup jauh dari lokasi yaitu Bogor atau dari Sukabumi, untuk mengatasi masalah tersebut Tim LPM IPB masih akan memberikan bantuan pelayanan vaksinasi ke 2 yaitu sekitar bulan Maret 1993. Pembinaan dari

instansi terkait (petugas peternakan kecamatan) dirasakan masih sangat kurang namun petugas penyuluhan lapang dari pertanian telah dapat mengatasi hal tersebut dengan kunjungan yang rutin.

Dukungan yang cukup baik diberikan oleh ketua kelompok pemuda dan staf desa disamping partisipasi penuh dari para anggota kelompok ayam buras diharapkan dapat menumbuhkan jiwa usaha yang mandiri baik untuk warga buruh nelayan yang ada di Desa Pasir Baru maupun warga lainnya di Kecamatan Ciselok.

Berdasarkan hasil kegiatan program memberikan gambaran bahwa masyarakat desa pantai mempunyai respon yang tinggi terhadap inovasi teknologi baru. Hal ini ditunjukkan oleh antusias peserta baik dalam program pengembangan ternak kecil, pengembangan tanaman pekarangan maupun pengolahan hasil ikan. Di dalam program peternakan kegiatan pelatihan disamping diikuti oleh peserta kelompok sebanyak 10 orang warga Desa Pasir Baru yang lain (petani maju). Dari hasil pelatihan tersebut telah dididik 20 kader vaksinator ayam buras. Selanjutnya dari satu percontohan demonstrasi pemeliharaan ayam buras yang dilakukan secara kelompok telah menimbulkan minat dari kelompok lain untuk mengembangkan dengan biaya swadaya (2 kelompok). Kendala utama dari pengembangan ayam buras ini adalah kekhawatiran masyarakat akan adanya serangan tetelo dan cara pemeliharaan ayam yang sifatnya masih tradisional. Oleh karena ini dengan adanya kerjasama antara LPM IPB - Pemda (Dinas Terkait) kendala-kendala di atas secara bertahap dapat di atasi.

5.3. Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Dari jenis-jenis tanaman yang dikembangkan, ternyata dapat tumbuh dengan baik adalah kangkung dan kacang panjang. Tanaman yang kurang baik pertumbuhannya adalah buncis dan bayam. Beberapa warga di sekitarnya mulai tertarik untuk turut mengembangkan lahan pekarangan.

Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya peserta program yang terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan dan penanaman, dari 3 peserta yang direncanakan menjadi 7 peserta dengan luas 600 m².

Kendala pengembangan tanaman pekarangan adalah banyaknya pohon kelapa dan tanaman pisang, yang mengganggu tumbuhan tanaman pekarangan, terutama dalam masalah keteduhan. Juga alat-alat pertanian yang dimiliki kurang memadai.

Hal yang sama juga diperlihatkan dari program pengembangan lahan pekarangan, dimana pada awal kegiatan demonstrasi penanaman pekarangan hanya diikuti 3 peserta, tetapi dalam pelaksanaannya bertambah menjadi 6 orang dengan luas

lahan 600 m². Berdasarkan hasil pengamatan permintaan untuk pengembangan lahan pekarangan cukup potensial baik dari warga setempat (RT 02 Desa Pasir Baru) maupun warga desa lain.

Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat relatif mudah menerima inovasi teknologi terutama yang berkaitan dengan pengembangan tanaman pekarangan. Kendala utama pengembangan adalah: (1) Ketersediaan bibit, (2) Tingkat pengetahuan petani dalam bidang pertanian khususnya tanaman pekarangan yang masih rendah dan (3) Banyaknya naungan dipekarangan yang disebabkan oleh pohon kelapa dan pohon pisang.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas maka secara umum menunjukkan bahwa:

- (a) Masyarakat desa pantai adalah masyarakat yang dinamis dan relatif mudah menerima inovasi baru sepanjang inovasi tersebut dapat disertai dengan kegiatan yang nyata.
- (b) Diversifikasi kegiatan dapat memberikan alternatif usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan diantaranya melalui kegiatan pemeliharaan ayam buras dengan skala usaha ekonomi dan pemanfaatan lahan pekarangan.
- (c) Adanya kelembagaan yang mapan di tingkat bawah (buruh nelayan) menyebabkan difusi inovasi teknologi berjalan dengan lebih lancar.

5.4. Tingkat Pendapatan/Kesejahteraan

Dalam hal ini kami menggunakan klasifikasi kemiskinan (Sayogyo 1977) didasarkan pada besarnya pengeluaran/ kapita/tahun yang diukur dengan nilai beras setempat adalah:

- a. Miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun lebih rendah dari nilai tukar 320 kg beras untuk daerah pedesaan dan 480 kg beras untuk daerah kota.
- b. Miskin sekali, apabila pengeluaran/kapita/tahun lebih rendah dari nilai tukar 240 kg beras untuk daerah pedesaan dan 360 kg beras untuk daerah kota.
- c. Paling miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun lebih rendah dari nilai tukar 180 kg beras untuk daerah pedesaan 270 kg beras untuk daerah perkotaan.

Untuk menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk kebutuhan pokok, dapat dipengaruhi oleh motivasi terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan, oleh posisi manusia dalam lingkungan keluarga serta oleh kebutuhan objektif minimal untuk bisa hidup secara layak. Sedangkan persentasi manusia terhadap kebutuhan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat istiadat dan sistem nilai yang berlaku

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari kegiatan PPM Tenaga Dosen yang dikoordinasikan LPM IPB di Wilayah Desa Pantai Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten DT. II Sukabumi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pasca Panen
Tindakan pasca panen yang diberikan kepada kelompok sasaran belum secara optimal dilaksanakan. Dengan diharapkan penyerapan teknologi secara optimal akan meningkatkan pendapatan kelompok sasaran.
- 2) Peternakan Ayam Buras
Pelaksanaan kegiatan vaksinasi telah diketahui, diserap dan dilakukan oleh kelompok sasaran sedangkan kegiatan program pemberian ayam buras kepada kelompok sasaran telah dilakukan dan memberikan hasil yang cukup menggembirakan. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari telah bertelurnya ayam buras.
- 3) Pekarangan
Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ayam buras telah dilakukan oleh kelompok sasaran. Indikator keberhasilan dari tiga peserta adalah telah berkembang menjadi tujuh peserta dengan luas lahan 600 M².
- 4) Tingkat pendapatan yang diharapkan akan meningkat, dengan adanya tiga kegiatan di atas dengan asumsi bahwa pemasaran dari ketiga produk dari kegiatan di atas lancar.

6.2. Saran

1. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap program yang telah dilakukan sehingga sasaran dan tujuan tercapai.
2. Perlu dilakukan peningkatan program lebih lanjut dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
3. Perlu difungsikan lembaga-lembaga perkoperasian, keuangan dan pemasaran.
4. Perlu perhatian dan bantuan Pemda setempat, khususnya Dinas Perikanan, Peternakan dan instansi terkait untuk mengembangkan kegiatan tersebut di atas khususnya di Kecamatan Cisolok.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik, 1985. Analisis Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia. Jakarta.
- Blackburn, M. 1965. Oceanologi and Ecology of Tuna. In Harold Barnes, Oceanography Marine Biology.
- Dinas Perikanan DT II Kabupaten Sukabumi. Laporan Tahunan, 1991-1992
- Monografi Desa Pasir Baru, 1992. Data Potensi Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten DT II Sukabumi.
- Sayogyo, 1977. Jenis Kemiskinan dan Kebutuhan Fisik Minimum Pangan. Kompas 17 Desember 1977. Jakarta.
- Schuster, W.H. and R. Rustami Djajadiredja, 1952. Local Common Names of Indonesia Fishes
- Siregar, 1980. Suatu Pendugaan Stok Ikan Pelagis dengan menggunakan Metoda Akustik di Perairan Jawa Barat dan Perairan Selat Bali. Karya Ilmiah. Fakultas Perikanan IPB, Bogor.

S U S U N A N T I M

Sunatmo Sardono	(Sosial Ekonomi Perikanan)
Dodi Rachmadi	(Pengolahan Hasil Perikanan)
Kusman Mangunsukarto	(Penangkapan Ikan)
M.F. Rahardjo	(Sumberdaya Perikanan)
Ridwan Affandi	(Sumberdaya Perikanan)
Moentoha Selari	(Tanah/Paperta)
Kurnia Achyadi	(Kedokteran Hewan)
Suroto Sukirno	(Hama dan Penyakit Tanaman)

PENGEMBANGAN PASAR LELANG LOKAL
SALAH SATU PENGALAMAN IPB
DALAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN ¹⁾

Oleh:
Yayok Bayu Krisnamurthi ²⁾

1. Pendahuluan

Usaha menanggulangi masalah kemiskinan perlu diawali dengan menentukan wilayah sasaran dan kelompok sasaran yang tepat. Dalam hal ini wilayah pedesaan merupakan wilayah sasaran yang penting diperhatikan mengingat sekitar 70 persen dari total penduduk miskin di Indonesia berada di pedesaan, dan karena sebagian besar dari penduduk pedesaan adalah petani, maka petani miskin di pedesaan merupakan kelompok sasaran yang perlu menjadi perhatian utama.

Usaha penanggulangan kemiskinan itu sendiri, bagi petani, pada dasarnya adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Jika dilihat dari kedudukannya sebagai produsen, tingkat pendapatan petani akan sangat ditentukan oleh jenis komoditas yang diproduksi, jumlah penduduk, mutu produk dan harga produk.

Petani yang mampu memproduksi jenis komoditas yang diminati pasar dengan jumlah yang cukup banyak dan mutu yang baik umumnya akan memiliki tingkat pendapatan yang baik pula karena kombinasi jenis, jumlah dan mutu yang baik tersebut akan memberikan harga jual yang baik pula.

-
- 1) Disampaikan pada Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, LPM IPB, 10 Juli 1993.
- 2) Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian IPB dan Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Pembangunan LP IPB.

Pembangunan pertanian yang selama ini dilakukan umumnya telah berhasil meningkatkan produksi, walaupun masalah produktivitas yang masih rendah sebenarnya belum tuntas. Pemilihan komoditas oleh petani juga telah semakin meningkatkan sifat subsistensi dan menuju pada usaha pemenuhan kebutuhan pasar. Di lain pihak mutu produk yang rendah dan tingkat harga yang dinilai kurang memadai hingga saat ini tampaknya masih menjadi masalah besar yang banyak dihadapi petani. Pada beberapa jenis komoditas hal tersebut terasa lebih menonjol, misalnya pada komoditas karet, kopi, kopra, dan beberapa komoditas lain.

Pada kegiatan produksi karet misalnya, masalah mutu bahan olah karet (bokar) ternyata memiliki keterkaitan yang erat dengan pola tataniaga karet. Mutu rendah yang dihasilkan petani karet disebabkan antara lain karena tidak adanya insentif yang cukup untuk menghasilkan mutu baik, disamping adanya masalah keterbatasan teknologi dan kesadaran petani.

Disamping itu struktur pasar yang kurang seimbang menyebabkan kedudukan petani yang relatif lemah dalam sistem tataniaga. Apabila terjadi penurunan harga di pasar internasional, maka petanilah yang akan menerima penurunan yang paling besar sebagai konsekuensi dari posisi lemah yang dimilikinya. Pedagang perantara yang selalu berusaha memperoleh keuntungan dari margin antara harga ditingkat konsumen akhir (eksportir/pabrik pengelola) dengan harga ditingkat produsen, mendorong terjadinya harga beli ditingkat petani yang cenderung rendah. Petani yang selalu mengharapkan penerimaan yang tinggi kemudian berusaha untuk memperbesar kuantitas karet yang dihasilkannya, dengan meningkatkan intensitas penyadapan, menambahkan bahan-bahan lain (tatal, pasir, dan lain-lain) kedalam bahan olahannya, atau merendam bahan olahannya, yang kesemuanya berakibat pada menurunnya mutu bahan olah karet, seperti yang banyak terjadi pada bokar dengan jenis "slab". Dibanyak tempat keadaan demikian telah berlangsung lama dan melembaga serta didukung pula

oleh berbagai keterkaitan sosial dan ekonomi antara pedagang perantara dan petani.

Hal di atas terjadi karena pada umumnya petani berorientasi kepada tingkat harga yang diterimanya. Jika harga yang diterima eksportir dari kegiatan perdagangan internasional karet dapat ditransmisikan kepada pedagang perantara sampai kepada petani secara proporsional dan transparan, maka masalah pemasaran yang timbul mungkin tidak sebesar seperti yang terjadi saat ini. Pola yang terjadi sekarang adalah bahwa tingkat harga yang diterima petani lebih banyak merupakan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh pembelinya, sebagai akibat dari terbatasnya jumlah pembeli, keterikatan petani kepada pembeli, dan langkanya informasi yang diterima petani. Disamping itu tidak terjadi perbedaan tingkat harga yang cukup nyata antara bahan olah karet mutu baik dengan bahan olah yang tidak bermutu baik, sehingga petani kurang tertarik untuk melakukan pengolahan bokarnya secara yang lebih baik.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan Pasar Lelang untuk bahan olah karet, dalam bentuk pilot proyek di beberapa daerah. Pasar lelang tersebut merupakan suatu bentuk pasar yang teratur (organized market), yang ditujukan untuk memperoleh manfaat berupa (1) terciptanya transparansi harga dalam perdagangan karet hingga ke tingkat produsen, (2) meningkatkan efisiensi tataniaga, (3) meningkatkan posisi rebut tawar (bargaining position) petani dalam perdagangan karet, sehingga dapat mendorong perolehan harga yang lebih tinggi yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya, dan (4) dapat menjadi pendorong peningkatan mutu dan produksi karet petani. Jika tujuan tersebut dapat dicapai, diharapkan tingkat pendapatan petani akan meningkat.

Hingga tahun 1990, perkembangan pasar lelang tersebut belum menggembirakan, dan dinilai belum dapat menjalankan fungsinya seperti yang diharapkan. Pada akhir 1990, Fakultas Pertanian IPB dimintakan bantuannya oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti) Departemen Perdagangan untuk turut memikirkan pengembangan pasar lelang tersebut. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan pasar lelang lokal, peran IPB dalam turut serta mengembangkannya dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan petani.

2. Pasar Lelang Lokal

Jika dilihat dari pasar lelang - pasar lelang yang sudah didirikan tetapi kurang berkembang, disimpulkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi dalam pengembangan kelembagaan ekonomi tersebut adalah pendefinisiannya yang kurang tepat. Setelah dilakukan redefinisi, pasar lelang lokal yang dimaksud adalah suatu mekanisme interaksi antara permintaan dari konsumen langsung atau konsumen tingkat pertama, yang dapat berupa pedagang, pabrik pengolah, eksportir, atau pihak lain, dengan penawaran langsung dari petani dimana harga transaksi adalah harga permintaan yang tertinggi yang ditentukan secara transparan dan dilaksanakan di tingkat lokal.

Pendefinisian sebelumnya lebih menekankan pasar lelang sebagai suatu "proyek fisik" bagi pembangunan gedung lelang, sedangkan pendefinisian di atas menempatkan pasar lelang sebagai suatu kelembagaan pemasaran. Perubahan pengertian pasar lelang ini memberikan konsekwensi pada konsèp pengembangannya, karena dengan demikian pendekatan kelembagaan menjadi cara yang dinilai paling baik bagi pengembangan pasar lelang lokal tersebut, dan bukan pembangunan sarana fisik.

Pasar lelang lokal (PLL) yang kemudian dikembangkan adalah pasar lelang yang akhirnya dapat dimiliki dan dikelola oleh anggota pasar lelang. Walaupun mekanisme pasar lelang dapat memiliki keragaman sesuai karakteristik komoditi yang diperdagangkan dan wilayah tempat pasar lelang berada, secara umum mekanisme pasar lelang tersebut adalah sebagai berikut : (a) penjual (petani) mengumpulkan sejumlah (volume) komoditas tertentu di suatu tempat, (b) diadakan pemeriksaan mutu dan pengukuran volume oleh suatu panitia/penyelenggara lelang yang telah disetujui baik oleh penjual maupun pembeli, (c) ditentukan harga indikator sesuai dengan perkembangan harga umum (terutama harga internasional) dengan memperhatikan mutu, (d) pembeli mengadakan penawaran secara terbuka dan ditentukan harga penawaran tertinggi, (e) pembayaran transaksi dilakukan secara tunai, langsung dan segera.

Pengembangan pasar lelang ditujukan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui transparansi mekanisme penentuan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran. Secara nasional hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem perdagangan nasional sehingga dapat mencukupi kebutuhan antar daerah, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu, dan meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan tersebut, terutama para petani/produsen. Pengembangan pasar lelang tersebut dengan demikian sebenarnya hanya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan yang lebih luas.

Saat ini telah terdapat beberapa pasar lelang lokal komoditas karet, yaitu 2 PLL di Kalimantan Selatan, 2 PLL di Jambi, 3 PLL di Riau, 7 PLL di Sumatera Utara, dan 2 PLL di Kalimantan Barat. Disamping itu telah terdapat 1 PLL Kopi di Lampung, dan dalam waktu dekat akan dikembangkan PLL Kayu Manis (Casiavera) di Sumatera Barat, PLL Kopra di Sulawesi Utara, PLL Sayur dan Buah di Sumatera Utara, PLL Karet di Sumatera Selatan dan PLL Kokon Sutura di Sulawesi Selatan.

3. Proses Pembentukan dan Pengembangan : Keterlibatan IPB

Seperti telah dikemukakan dimuka, keterlibatan IPB dimulai atas permintaan Bapebti untuk turut memikirkan mengenai pengembangan proyek pasar lelang yang sebelumnya kurang menggembirakan. Mengingat keterbatasan waktu, dana dan tenaga; Tim PLL IPB (Faperta) mengawali keterlibatannya dengan mengadakan studi lapangan dengan menggunakan metode RRA (Rapid Rural Appraisal). Beberapa orang tenaga ahli IPB melakukan kunjungan lapang bersama Staf Departemen Perdagangan dan melakukan diskusi di lapangan dengan semua pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan pasar lelang. Diskusi tersebut diarahkan untuk menghasilkan kesepakatan dan perumusan bersama mengenai pengembangan pasar lelang tersebut. Dalam hal ini Tim PLL IPB berfungsi sebagai "juru tulis" yang merumuskan kondisi lapangan dan mensintesisakan pemikiran dari berbagai pihak untuk menjadi rumusan pemikiran bersama, berdasarkan suatu dasar pemikiran konseptual yang telah dipikirkan sebelumnya. Tim PLL IPB kemudian memiliki kapasitas untuk segera dapat merumuskan pemikiran tersebut kepada pengambil keputusan tertinggi sehingga implementasinya dapat segera pula dilakukan. Dengan demikian sejak awal, mulai dari penyusunan konsep dan rencana, pengembangan pasar lelang ini diharapkan telah menjadi "milik" bersama, khususnya instansi dan pihak-pihak yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pengembangan pasar lelang tersebut. Metode ini pun dapat menjadi jembatan antara aspek Strategis dari proses "bottom up" dan aspek pragmatis dari "top down".

Setelah perumusan konsep pengembangan selesai disusun, proses selanjutnya adalah melakukan sosialisasi konsep tersebut kepada lingkungan yang lebih luas. Konsep pengembangan ini akan mencakup mekanisme pasar lelang yang cukup spesifik, calon lokasi pasar lelang, cakupan pasar lelang, berbagai sarana penunjang yang diperlukan, dan bentuk kelembagaan. Dalam proses sosialisasi tersebut sekaligus juga

dilakukan penyempurnaan konsep dengan memperhatikan tanggapan dan dengan mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak, sehingga PLL diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian proses sosialisasi yang terutama perlu dilakukan adalah terhadap produsen dan konsumen. Dalam kasus pasar lelang karet, penyuluhan diberikan kepada petani, kelompok tani, dan pemilik rumah asap (khusus untuk bokar jenis RSS), serta dilengkapi pula dengan "social preparation" kepada masyarakat desa dimana pasar lelang tersebut berada.

Dalam rangka sosialisasi tersebut, disamping terlibat langsung dengan pembinaan masyarakat dan aparat di daerah (walaupun masih dalam intensitas yang terbatas karena keterbatasan waktu dan dana), Tim PLL IPB telah memprakarsai pelaksanaan Lokakarya Nasional Pengembangan Pasar Lelang Lokal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada bulan April 1992, kemudian juga terlibat aktif dalam Seminar Pembentukan Pasar Lelang Kopi di Lampung, Desember 1992. Dalam waktu dekat juga akan dilakukan Pelatihan Petugas PLL di Jambi dimana Tim PLL IPB akan menjadi fasilitator utama.

Jika proses sosialisasi telah berjalan, karena sosialisasi sebenarnya tidak pernah selesai, pembangunan pasar lelangnya sendiri mulai dilakukan. Pengalaman dalam pengembangan pasar lelang memberikan pelajaran bahwa :

- (1) Usaha pengembangan pasar lelang yang berhasil adalah yang semaksimal mungkin memanfaatkan tatanan kelembagaan yang sudah ada dan menyertakan pihak-pihak yang langsung berkepentingan dalam sistem tataniaga.
- (2) Mekanisme lelang yang dapat diterima adalah mekanisme yang sesuai, baik secara operasional maupun kelembagaan, dengan jenis komoditas (produk akhir) yang dilelang, terutama dalam kaitannya dengan pemeriksaan mutu dan pembayaran tunai secara cepat kepada petani. Sehingga pengembangan kelembagaan dalam bentuk "paket" yang sama untuk semua tempat dan jenis komoditas perlu dihindari.

- (3) Perlunya target waktu pembinaan dimana akhirnya pasar lelang dilaksanakan atas dasar swadaya masyarakat sendiri tanpa terus menerus mengandalkan bantuan dan bimbingan dari pemerintah. Hal ini akan dimungkinkan jika masyarakat sejak awal telah dilibatkan.
- (4) Dukungan kondisi dan prasarana dimana pasar lelang itu berada merupakan faktor yang penting, seperti letak pasar lelang di daerah sentra produksi, tidak terlalu jauh dari kebun petani atau rumah asap, dan memudahkan transportasi ke lokasi pasar lelang. Kesesuaian sarana tersebut perlu memperhatikan jangkauan wilayah yang diharapkan dapat dilayani oleh pasar lelang sesuai dengan jenis komoditas yang dilelang.

4. Hasil yang telah dicapai

Secara singkat hasil fisik pengembangan pasar lelang lokal yang berhubungan langsung dengan kepentingan petani dapat ditunjukkan oleh tabel berikut .

Uraian	1990	1992
1. Jumlah pilot proyek PLL	9 unit	17 unit
2. Persentase jumlah komoditas yang dilelang terhadap jumlah produksi daerah (kasus Jambi)	12,8 %	19,6 %
3. Rata-rata mutu produk tani		
a. karet (persen KKK)	58,7 %	68,1 %
b. kopi (persen kadar air)	21,6 %	16,3 %
4. Harga rata-rata yang diterima petani terhadap harga f.o.b (Rp/kg KKK, kasus "slab" karet) **	63,8 %	74,1 %

** Harga diluar pasar lelang 1992 : 64,9 % dari f.o.b

Tabel tersebut telah menunjukkan pengaruh pasar lelang yang cukup signifikan terhadap beberapa faktor yang akan menentukan tingkat pendapatan petani, yaitu harga dan mutu.

Disamping itu keberadaan pasar lelang telah memberikan kelembagaan ekonomi pedesaan alternatif yang dapat lebih memberikan transparansi dalam penentuan harga dan dapat lebih menyeimbangkan kekuatan rebut tawar antara petani dan pembeli produk-produknya. Pasar lelang juga merupakan wahana untuk memadukan kepentingan dari berbagai instansi pembina (pertanian, perdagangan, perindustrian, pemerintah daerah, koperasi). Pasar lelang ini sekaligus juga telah mampu memberikan indikasi terjadinya perubahan sikap petani terhadap mutu, dimana petani telah merasa malu untuk membawa barang yang bermutu jelek ke pasar lelang, dan sekaligus menjadi salah satu bentuk nyata dari usaha melakukan integrasi dalam sistem agribisnis.

Masalah yang masih dihadapi dalam pengembangan pasar lelang, dalam usaha mengoptimalkan manfaat pasar lelang bagi petani, adalah bahwa jumlah peserta dan volume lelang dinilai belum memadai untuk menjadikan pasar lelang sebagai penentu harga jual, tetapi masih menjadi indikator harga lokal. Dilihat dari kepentingan pembeli, jumlah yang terlalu sedikit juga akan mengurangi daya tarik pasar lelang, sehingga akhirnya akan mengurangi nilai peran pasar lelang dalam sistem tataniaga secara keseluruhan. Dilain pihak jumlah petani yang terlalu banyak juga akan menimbulkan masalah dalam teknis pengelolaan PLL, khususnya dalam pemeriksaan mutu, pengukuran berat dan penentuan harga beli.

Masalah lain adalah keterkaitan tradisional antara petani dan pedagang yang masih sangat berperan dalam penentuan harga dan pemilihan jalur pemasaran. Disamping itu struktur pasar yang cenderung monopsonistik juga akan menghalangi peran PLL yang efektif. Dalam konteks yang lebih luas, pasar lelang perlu dikembangkan secara berjenjang, karena pasar lelang ditingkat lokal saja tidak akan berkembang jika struktur pasar di atasnya (supra struktur) tidak kondusif mendukung perkembangan pasar lelang tersebut.

5. Penutup

Sebagai suatu program pembangunan, pengembangan pasar lelang lokal telah mampu memberikan kondisi yang lebih baik dalam sistem ekonomi pedesaan yang memungkinkan petani untuk lebih mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian sebagai program yang memang ditujukan bagi suatu kepentingan yang berspektrum luas, pengembangan pasar lelang lokal merupakan bagian dari usaha untuk menanggulangi kemiskinan melalui penciptaan mekanisme penentuan harga yang lebih baik.

Melihat usaha pengembangan pasar lelang dapat dinyatakan bahwa usaha peningkatan pendapatan dan kesempatan untuk berusaha (yang juga berarti penanggulangan kemiskinan) perlu memperhatikan pengembangan kelembagaan ekonomi yang lebih sesuai, yaitu kelembagaan ekonomi yang dapat menempatkan kedudukan petani (kelompok miskin) secara lebih seimbang terhadap pelaku ekonomi lain, tanpa merugikan pihak tertentu. Hal yang terakhir ini menjadi penting karena jika tidak maka usaha tersebut akan mendapat reaksi negatif dan hanya akan bersifat temporal. Dengan demikian keikut-sertaan semua pihak yang berkepentingan dan kemampuan mengadakan sintesa dari berbagai kepentingan tersebut akan sangat menentukan keberhasilan program.

Dalam kaitannya dengan berbagai usaha pembangunan, khususnya dalam penanggulangan masalah kemiskinan, IPB, atau perguruan tinggi lain, dapat berperan (1) sebagai pengamat yang diharapkan mampu merumuskan baik masalah maupun potensi secara sistematis dan objektif, (2) sebagai konseptor yang dengan pemahaman teoritik dan akademik yang komprehensif dapat merumuskan konsep yang dapat diaplikasikan, (3) sebagai mediator dari berbagai kepentingan dan pendekatan, (4) sebagai katalisator yang dapat mempercepat proses dan usaha yang tengah dan akan dilakukan, (5) sebagai publikator yang mampu menyebarkan pemikiran, melakukan sosialisasi dan membangun opini guna menunjang pengembangan kegiatan, dan sesuai dengan tugas utamanya, (6) sebagai edukator yang mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kepada semua pihak yang berkepentingan.

**PENGEMBANGAN SISTEM PERTANIAN TERPADU
DI DAERAH LAHAN KERING
(KASUS KABUPATEN SUKABUMI) 1)**

Moentoha Selari 2)

PENDAHULUAN

Sejak Pelita I, II, III, IV dan V pemerintah telah melakukan pembangunan di segala bidang dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun secara kuantitatif hasil-hasil pembangunan tersebut telah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat baik di kota maupun di pedesaan, tetapi masih dijumpai sebagian dari masyarakat yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia saat ini terdapat 27.2 juta (15 %) rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dimana 70 % dari masyarakat tersebut hidup di pedesaan (Soehoed, 1992).

Strategi Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan tetap memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara berkesinambungan. Peningkatan kualitas tersebut antara lain ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan serta meningkatnya pendidikan anak-anak dan pemuda. Untuk itu, usaha peningkatan pendapatan masyarakat (petani) khususnya di desa-desa miskin perlu dilakukan dengan segera. Bila tidak akan memberikan dampak yang sangat luas, tidak saja berdimensi sosial, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut dimensi budaya, dan ketahanan keamanan.

Strategi yang diambil didalam pemecahan masalah tingkat pendapatan yang rendah sangat ditentukan oleh faktor-faktor penyebabnya. Beberapa faktor yang menyebabkan desa miskin adalah : (1) letak geografis yang kurang menguntungkan, (2) kualitas lahan dan iklim kurang mendukung untuk kegiatan produksi atau kalaupun kegiatan produksi dapat dilakukan

-
- 1) Makalah disajikan dalam Lokakarya "Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan", LPM IPB, 10 Juli 1993
 - 2) Staf Pengajar Jurusan Tanah, Faperta IPB/Kepala Pusat Pengembangan Wilayah LPM IPB (Anggota Tim terlampir).

umumnya dengan tingkat efisiensi yang rendah (3) keadaan sumberdaya manusia kurang trampil, (4) fasilitas dan sarana angkutan tidak memadai, tingkat kepadatan penduduk tinggi, (6) kurangnya kesempatan kerja, (7) status pendidikan masyarakat masih rendah, (8) sarana kesehatan masih rendah dan (9) daya beli masyarakat sangat rendah.

Fenomena kemiskinan dan keterbelakangan beberapa wilayah khususnya di Sukabumi dalam beberapa segi seringkali menjadi hal yang mengganggu di dalam penerapan program-program pembangunan. Efeknya adalah rendahnya respon suatu wilayah terhadap introduksi teknologi dan sistem kelembagaan pembangunan, sehingga dalam banyak hal menimbulkan suatu "kepincangan sosial" didalam model interaksi antarwilayah.

Kabupaten Sukabumi yang meliputi luas \pm 400.000 ha, 76 % merupakan lahan kering. Lahan kering tersebut saat ini diusahakan untuk tegalan (11.4 %), bekas kebun campuran (12.4 %), perkebunan (20.2 %), alang-alang (2.2 %) dan hutan (29.8 %).

Berdasarkan data Bangdes (1991) di Sukabumi terdapat 144 desa miskin yang terdapat di 19 kecamatan. Desa miskin tersebut sebagian besar terdapat di wilayah Sukabumi bagian Selatan dan tergolong kedalam tipologi desa lahan kering.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam rangka meningkatkan pendapatan petani berpenghasilan rendah/miskin Pemda Sukabumi sejak 1989 bekerjasama dengan LPM IPB mengadakan kegiatan baik yang bersifat ujicoba maupun kaji tindak dalam program Pengembangan Wilayah Pertanian Lahan Kering Secara Terpadu. Kegiatan uji coba telah dilakukan pada tahun 1989/ 1990 di Stasiun Pusat Pengembangan Wilayah Sagaranten Sukabumi, dan kaji tindak yang mengikutsertakan petani dilakukan di Desa Datarnangka, Kec. Sagaranten (1990/1991), Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal (1991/1992) dan Desa Cibaregbeg Kecamatan Sagaranten (1992/1993).

Kegiatan tersebut di atas merupakan salah satu upaya untuk memperoleh metodologi yang tepat dan sesuai untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah lahan kering, disamping membantu Pemda Sukabumi dalam mengisi kegiatan Proyek "GERBANG MAPAK (Gerakan Pembangunan Mandiri Pakidulan).

T U J U A N

Tujuan Program Pengembangan Wilayah Pertanian Lahan Kering Secara Terpadu adalah:

1. Memanfaatkan lahan kering secara optimal dan lestari melalui kegiatan/usaha peningkatan produktivitas lahan secara terkonservasi.
2. Mengembangkan usahatani secara terpadu dengan lebih meningkatkan usaha atau kegiatan yang bersifat kelompok.
3. Mengembangkan kelembagaan penunjang usahatani lahan kering serta meningkatkan motivasi, partisipasi dalam kegiatan produksi dan pemasaran hasil.
4. Meningkatkan fungsi Stasiun Pusat Pengembangan Wilayah milik Pemda Sukabumi sebagai pusat informasi teknologi, kebun bibit dan pemasaran hasil pertanian.

PERUMUSAN MASALAH

Salah satu kecamatan miskin di Kabupaten Sukabumi adalah Kecamatan Sagaranten. Kecamatan Sagaranten meliputi luas 24.250 ha di antaranya 4.750 ha merupakan lahan tegalan dan kebun campuran, 9.120 ha hutan dan 500 ha merupakan semak dan alang-alang. Pertumbuhan ekonomi di kecamatan tersebut tergolong rendah yaitu rata-rata 2,68 % dengan laju pendapatan rata-rata 2,55 % (Lubis, 1991), sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi adalah 3,96 % (Muhammad, 1989). Hal ini menunjukkan bahwa potensi lahan kering di daerah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal disamping potensi ekonomi lainnya serta kelembagaan yang belum mendukung aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis situasi dan potensi wilayah, secara spesifik permasalahan utama yang terdapat di Kecamatan Sagaranten adalah:

1. Tingkat kesuburan tanah yang rendah serta tingkat erosi yang cukup tinggi.
2. Sistem pertanaman yang bersifat monokultur dan tidak adanya usaha diversifikasi tanaman. Kegiatan lain terutama peternakan, masih bersifat tradisional dan belum diusahakan secara komersial.
3. Keterbatasan air pada waktu musim kemarau sehingga kegiatan pertanian hanya dilakukan 1 kali/tahun.
4. Luas pemilikan lahan yang sempit dengan rata-rata pemilikan lahan 0,1 - 0,24 ha dan tingkat pendapatan rata-rata rendah, sebagian besar berkisar Rp 200,000.00 - Rp 600,000.00.

5. Pemasaran hasil yang tergantung pada pedagang perantara dan tidak adanya kepastian harga.
6. Belum adanya sistim kelembagaan usahatani lahan kering secara terpadu sehingga dapat meningkatkan kemampuan rebut tawar ("bargaining position").

KERANGKA PEMIKIRAN

Pembangunan pertanian dilaksanakan oleh Pemda Tingkat II Sukabumi sampai dengan Repelita V ini sudah banyak hasilnya baik ditinjau dari segi produksi maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Tetapi meskipun demikian untuk wilayah Kabupaten Sukabumi Bagian Selatan masih banyak dijumpai daerah-daerah dengan tingkat pendapatan yang masih rendah (daerah miskin).

Secara umum tingkat pendapatan yang rendah disebabkan oleh (1) faktor alamiah dan (2) faktor struktural. Faktor alamiah terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, sehingga peluang untuk berproduksi relatif kecil ataupun jika kegiatan produksi dapat dilakukan umumnya dengan tingkat efisiensi yang rendah. Sedangkan faktor struktural disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh tatanan kelembagaan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kelembagaan adalah dalam pengertian yang paling luas yaitu tidak hanya mencakup tatanan organisasi tetapi juga mencakup aturan permainan yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas berdasarkan pengamatan lapang rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di lahan kering lebih banyak disebabkan karena faktor alamiah. Faktor alamiah yang dijumpai antara lain : (1) keadaan tanah yang miskin unsur hara dan luas tanah yang diusahakan relatif sempit, (2) tingkat pengetahuan dan penguasaan teknologi yang rendah, (3) infrastruktur yang buruk serta harga hasil pertanian yang tidak menentu, (4) tingkat ketrampilan yang rendah, (5) belum adanya kelembagaan usahatani lahan kering yang mantap serta masih rendahnya partisipasi masyarakat.

Usaha untuk mengatasi kendala faktor alamiah khususnya sumberdaya alam ini dapat dilakukan dengan (a) perbaikan kualitas lahan, (b) kegiatan usahatani yang dilaksanakan secara terpadu dan didasarkan pada kelompok hamparan, (c) diversifikasi usaha pertanian yang sifatnya subsisten menjadi komersial, (d) optimalisasi pemanfaatan lahan terutama pemanfaatan lahan pekarangan dengan kegiatan yang lebih produktif. Sedangkan usaha peningkatan sumberdaya manusia

dapat dilakukan melalui (1) pendidikan ketrampilan yang bersifat spesifik sesuai dengan potensi wilayah, (2) pelatihan manajemen usaha dan (3) menanamkan jiwa wiraswasta dan kemandirian dan (4) meningkatkan peran kelembagaan pertanian lahan kering.

Hasil penelitian lahan kering di beberapa negara beriklim tropik menunjukkan bahwa penggunaan mulsa, budidaya tanaman tanpa olah tanah (zero tillage), budidaya penanaman ganda (multiple cropping), budidaya kontur atau teras, dan budidaya lorong, meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan usahatani serta menekan erosi.

Di Indonesia pola tanam sistem penanaman ganda ubi kayu plus (jagung, padi gogo, kacang tanah, kacang hijau) meningkatkan pendapatan bersih usahatani (Effendi & Mc Intosh, 1976). Selanjutnya Rao *et. al* dan Krisnamoorthy (*dalam* Gomez dan Gomez, 1983) mendapatkan hasil penelitian pola penanaman tumpangsari jagung + kedelai mampu meningkatkan pendapatan bersih sebesar 68.38 % dibanding dengan pola penanaman monokultur kedelai, dan 34.81 % dibanding dengan pola penanaman monokultur jagung.

Menurut Fliegel *et.al* (1977), terdapat lima faktor yang mempengaruhi setiap petani dalam mengadopsi teknologi, yaitu (1) keuntungan relatif bila teknologi itu diadopsi, (2) kesesuaian teknologi tersebut dengan norma, biaya dan lingkungan fisik yang ada, (3) daya banding hasil bila menggunakan teknologi yang baru, (4) kepercayaan akan keberhasilan teknologi tersebut, dan (5) kondisi ekonomi yang ada seperti tersedianya modal, adanya pasar tempat untuk membeli sarana produksi dan menjual hasil.

METODOLOGI

1. Penentuan Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

1. Daerah tersebut mempunyai potensi lahan kering yang cukup luas.
2. Daerah tersebut mudah dijangkau oleh sarana transportasi yang ada.
3. Letaknya yang strategis sehingga kegiatan tersebut dapat mudah dilihat dan dicontoh oleh masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dari hasil konsultasi dengan Pemda Sukabumi, ditetapkan tanah seluas 25 ha di Kecamatan Sagaranten sebagai lokasi kegiatan Kaji Tindak. Lokasi tersebut 10 ha milik Stasiun PPW dan 15 ha milik Desa Datarnangka yang kesemuanya merupakan satu hampan (Gambar 1).

2. Identifikasi dan Zonasi Wilayah

Kegiatan bertujuan untuk menentukan komoditi yang sesuai dengan sifat fisik dan kimia tanah serta sifat agroklimat setempat.

3. Sosialisasi Proyek

Kegiatan ini bersifat penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat tentang manfaat dari program tersebut dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan.

4. Penentuan Peserta

Peserta program ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa, dengan mengutamakan penggarap yang telah ada dan penggarap lain yang bersedia, serta petani maju.

5. Penyusunan Program Kegiatan

Penyusunan program kegiatan didiskusikan dengan instansi - instansi terkait yang didasarkan pada aspek fisik, ekonomi dan sosial masyarakat serta kelembagaan.

PELAKSANAAN

1. Identifikasi dan Zonasi Wilayah

- 1.1. Pengukuran lahan, pembuatan peta kontur lereng dan pembagian areal garapan dengan skala 1 : 2500.
- 1.2. Penentuan sifat fisik dan kimia tanah untuk menentukan dosis pupuk serta kapur sesuai dengan jenis tanaman.

2. Bidang Kelembagaan

- 2.1. Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat peserta program yang meliputi : kelompok umur, lama pendidikan, mata pencaharian, pendapatan rumah tangga petani dan luas pemilikan lahan.
- 2.2. Pembentukan kelompok tani lahan kering yang didasarkan pada domisili dan kelompok hamparan. Dari 107 peserta, dibagi dalam 4 kelompok besar dan tiap kelompok besar terdiri dari 3-4 kelompok kecil dengan anggota 19-27 orang tiap kelompok.
- 2.3. Pelatihan bagi peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan meliputi materi cara-cara perbaikan lahan dan usaha konservasi tanah; penanaman dan pengaturan pola tanam, pengembangan ternak kecil, usaha bersama/koperasi, pemanfaatan lahan pekarangan serta pengolahan hasil pertanian.

2.4. Pembinaan kelembagaan usaha bersama untuk produksi, pemasaran dan permodalan serta pengusahaan tabungan kelompok.

3. Pengolahan Tanah dan Penanaman

Pengolahan tanah dilakukan dengan traktor, sedangkan pembuatan teras guludan, perataan tanah, pembuatan bedeng dan saluran air (SPA), dilakukan secara manual oleh petani peserta. Selanjutnya tanah dikapur dengan dosis 1 ton/ha.

Berdasarkan hasil analisis tanah, pemetaan lereng, kondisi iklim, serta kondisi sosial ekonomi, maka penanaman dilakukan dengan sistem pertanian berganda ("multiple cropping") dan teknik budidaya lorong "alley cropping" (Tabel 1), sedang untuk lereng 15-30 % dilaksanakan pada penanaman "agroforestry".

Tabel 1. Pola Tanam Berdasarkan Kemiringan Lahan

Kelas Lereng	Pola Tanam	Luas (Ha)
1. 0 - 3 %	A. Padi Gogo + Jagung + Ubikayu	2.000
	B. (Pepaya + Kc. Panjang) + Cabe	1.713
2. 3 - 8 %	A. Padi Gogo + Jagung + Ubikayu dengan Tan. Penguat Teras Melinjo + HMT/Gamal	8.759
3. 8 - 15 %	C. Monokultur Jahe dengan Tan. Penguat Teras Petai/Albizia+HMT Gamal	4.000
	D. Padi Gogo + Jagung + Kc. Tanah	5.795
4. 15 - 30 %	E. Durian + Rambutan dengan Tan. Penguat Teras Albizia + HMT	1.837
5. > 30 %	F. Tan. Penghijauan Albizia + Kaliandra + HMT	0.448
6. 0 - 3 %	G. Albizia + Jeruk, Melinjo, Manggis	0.845
7. 3 - 8 %	H. Percobaan Melon Putih dan Ketimun Jepang	1.000
8. 0 - 3 %	I. Padang Rumput : Rumput Gajah	4.000
Total		30.397

4. Bidang Peternakan

Kegiatan bidang peternakan dikaitkan dengan kegiatan pertanian agar kegiatan tersebut dapat bermanfaat ganda. Didalam pelaksanaannya setiap kelompok besar mendapat bantuan domba sebanyak 6 ekor (5 betina dan 1 ekor jantan), bantuan tersebut bersifat dana berputar (*revolving funds*).

Untuk menjamin ketersediaan makanan yang kontinu, dilaksanakan penanaman kebun rumput kelompok seluas 4 ha yang terdiri dari rumput gajah, rumput raja dan setaria.

5. Bidang Agroindustri

Kegiatan ini lebih ditekankan pada penanganan kegiatan pasca panen, yang meliputi penyediaan alat pasca panen, seperti alat panen, alat perontok gabah, alat pengeringan, alat penyimpanan, alat pemipil dan alat pengempos.

6. Bidang Agroforestry

Agroforestry yang dikembangkan di wilayah pertanian lahan kering lebih ditekankan pada areal dengan kemiringan di atas 15 % yang cenderung dalam kondisi kritis. Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan penanaman Jeunjing sebanyak 1100 bibit yang ditanam di antara tanaman rumput sepanjang guludan sebagai penguat teras.

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM

1. Kelembagaan Sosial Ekonomi Pedesaan

Pembentukan kelompok kegiatan petani lahan kering merupakan hal baru bagi masyarakat yang selama ini dilakukan secara sendiri-sendiri. Pembentukan kelompok dilakukan pada saat pelatihan. Pembentukan kelompok didasarkan pada (1) kekompakan anggota kelompok terhadap ketua; (2) keterdekatan lahan dari tempat tinggal; dan (3) tingkat pendidikan dan pengetahuan serta ketrampilan berusahatani. Sebagai kasus dalam kegiatan kaji tindak di Desa Datarnangka 1990/1991, jumlah peserta sebanyak 107 orang, dibagi dalam 4 kelompok besar dan masing-masing kelompok besar terdiri dari 3-5 kelompok kecil (3-5 orang).

Pertemuan antara anggota kelompok dilakukan seminggu sekali. Masalah yang dibahas meliputi cara-cara pengolahan tanah, teknik agronomi, pemasaran hasil dan tabungan kelompok, disamping kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3. Analisa Pendapatan Petani Menurut Pola Tanam Per Hektar

Pola Tanam	Luas Total Pola (ha)	Rata-rata Pendapatan Per Ha				
		Total biaya (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total pendapatan (Rp)	Jangka Waktu	Total Pendapatan/bln (Rp)
A	7,4379	397.750,00	1.617.190,00	1.219.440,00	7-8 bl.	152.430,00
B	1,9171	390.000,00	2.243.500,00	1.853.500,00	3,5 bl.	346.969,00
C	2,0781	1.613.900,00	2.006.400,00	395.500,00	7-8 bl.	49.438,00
D	5,4766	587.500,00	1.022.220,00	264.970,00	4-5 bl.	52.994,00

Pada umumnya produktivitas tanaman meningkat dengan adanya kegiatan pengembangan terpadu dibandingkan dengan produktivitas dari petani di luar program. Sedangkan produktivitas jahe masih rendah karena rendahnya kemampuan petani dalam pemeliharaan dan adanya serangan penyakit bakteri.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa pendapatan petani terbesar pada pola tanam B, terutama dari nilai jual cabe keriting. Akan tetapi mengingat beras merupakan bahan pangan utama, maka Pola A sangat strategis untuk dikembangkan dan dibina lebih lanjut.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan pertanian yang umum dilaksanakan oleh petani khususnya untuk tanaman padi gogo (monokultur), menunjukkan bahwa Pola Tanam A, B, C dan D, pendapatan rata-rata bersih per bulan lebih tinggi dari tanaman padi masyarakat yang berkisar antara Rp 20.000,00 - Rp 25.000,00/bulan

Keadaan ini menunjukkan bahwa penanaman dengan sistim berganda ("multiple cropping") dengan teknik budidaya lorong dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Bidang Peternakan

Kegiatan peternakan yang dilakukan pada petani lahan kering memegang peranan yang penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Manfaat lain yang diperoleh adalah sebagai pengisi waktu luang pada musim kemarau dan pemanfaatan pupuk kandang untuk tanaman.

Berdasarkan hal tersebut untuk setiap kelompok tani lahan kering dibagikan 5 ekor domba (4 betina 1 ekor jantan). Pembagian domba dilakukan dengan sistem revolving funds, artinya selama 2 tahun petani harus mengembalikan dalam jumlah yang sama untuk diberikan kepada kelompok lain. Selanjutnya untuk menjaga ketersediaan pakan, kelompok melakukan penanaman kebun rumput seluas 5 ha yang dikelola oleh kelompok. Perkembangan ternak sampai dengan akhir 1992 adalah sebagai berikut (Tabel 4).

Tabel 4. Perkembangan Kegiatan Peternakan

Kelompok	Jumlah Umur Awal Desember 1990		A n a k Desember 1991		A n a k Desember 1992		Revolving 1992
	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	
	Tanjung I	1	5	4	3	5	
Tanjung II	1	5	4	4	4	6	6
Bojong Koneng	1	5	2	7	3	6	4
Cibungur	1	5	4	-	4	5	2
Jumlah	4	20	14	14	16	21	17

Catatan : Perhitungan tersebut diluar anak domba yang mati sebanyak 25 ekor

Dari Tabel 4 tersebut menunjukkan perkembangan populasi ternak yang cukup baik, dari jumlah 24 ekor (awal kegiatan) bertambah 64 ekor selama 2 tahun. Kegiatan peternakan di lahan kering ini dapat memberikan harapan terhadap usaha peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesuburan tanah melalui pemanfaatan pupuk kandang.

4. Program Pasca Panen

Pemanfaatan peralatan pasca panen oleh kelompok tani relatif terbatas pada alat-alat tertentu. Alat yang sering digunakan petani adalah (1) perontok padi dan pemipil jagung yang dipakai secara meluas oleh petani peserta program dan petani sekitar di luar program; (2) alat penyimpanan benih; (3) pengiris singkong; (4) penggiling jagung; dan (5) pengu-pas kacang tanah. Sedangkan alat-alat lain seperti perajang rumput dan alat pengering gabah belum banyak digunakan.

Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa intensitas pemanfaatan alat tersebut masih rendah, karena letak peralatan yang terpusat di Stasiun PPW menyebabkan petani enggan untuk mempergunakan alat tersebut. Disamping jumlah hasil produksi yang dihasilkan petani relatif sedikit.

5. Agroforestry

Pertumbuhan tanaman Jeunjing yang ditanam baik sebagai tanaman penguat teras maupun pada daerah-daerah lahan kritis cukup baik, pada saat ini pertumbuhannya sudah mencapai \pm 2 meter.

Sedangkan tanaman buah-buahan yang ditanam sebagai penguat teras pada umumnya pertumbuhannya kurang baik.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

- (1) Kondisi tanah pada wilayah lahan kering menunjukkan tingkat kesuburan yang sangat rendah, bereaksi masam pada bagian permukaan (0 - 30 cm), sangat memerlukan pemupukan N, P, K dan bahan organik serta pengapuran.
- (2) Kelembagaan petani lahan kering merupakan suatu rekayasa sosial yang bertujuan untuk dapat mempercepat penyebarluasan inovasi teknologi pertanian dan sarana pendukungnya.
- (3) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani peserta telah menimbulkan adanya perubahan perilaku mereka dalam menerapkan inovasi yang telah diperkenalkan dalam proyek pada lahan pertanian mereka sendiri.
- (4) Tabungan Kelompok oleh petani memberikan petunjuk adanya kemauan yang cukup besar untuk melanjutkan program tersebut secara mandiri. Akan tetapi mengingat luas garapan petani sangat kecil, tabungan tersebut telah dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif pada musim kemarau yang panjang yang dapat mempengaruhi kemampuan modal usahatani musim berikutnya.
- (5) Kegiatan pertanian lahan kering dengan menggunakan sistem pola usahatani campuran (tanaman dan peternakan) ternyata dapat memberikan dampak yang positif pada perubahan perilaku dan persepsi petani terhadap aplikasi teknologi dan kelembagaan dalam peningkatan produktivitas lahan dan pendapatan petani.
- (6) Dalam usaha meningkatkan pendapatan petani melalui berbagai pola tanam, maka pola tanam A (padi gogo + jagung + upikayu) dan pola tanam B (kacang panjang + cabe) dapat memberikan peningkatan pendapatan yang terbaik.
- (7) Pengembangan peternakan yang dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pertanian memberikan harapan untuk lebih meningkatkan pendapatan petani dan dapat memperbaiki kualitas lahan melalui pemanfaatan pupuk kandang.

- (8) Pengembangan peternakan harus disertai dengan pengadaan kebun rumput unggul sebagai sumber hijauan pakan ternak agar ketersediaan pakan dapat terjamin, terutama pada musim kemarau.
- (9) Kegiatan penanganan pasca panen/agroindustri pada dasarnya dapat memberikan perolehan nilai tambah dari hasil pasca panen. Namun peralatan pasca panen belum dimanfaatkan mengingat petani lebih menginginkan uang tunai segera setelah panen.
- (10) Kegiatan agroforestry diharapkan untuk dapat mengurangi erosi yang terjadi dan secara bertahap diharapkan dapat mengurangi lahan kritis yang ada.

Implikasi

- (1) Pengembangan wilayah lahan kering yang bertujuan untuk mengatasi pemulihan lahan yang telah mengalami degradasi/kritis perlu dilakukan dengan usaha budidaya pertanian sepanjang tahun, khususnya pada musim kemarau disarankan menggunakan kacang-kacangan yang relatif tahan kering atau dengan jenis tanaman pupuk hijau sebagai penutup tanah.
- (2) Dalam rangka menjamin kelangsungan usaha pengembangan lahan kering secara terpadu perlu dilakukan pembinaan kelembagaan petani yang mampu berusaha secara mandiri.
- (3) Untuk meningkatkan dinamika kelompok tani, maka pengelompokan petani menurut kesamaan minat selain kesamaan domisili dan hamparan perlu diprioritaskan.
- (4) Dalam usaha menunjang kelancaran program pengembangan wilayah lahan kering secara terpadu maka pada tahap awal kegiatan kelompok tani perlu didukung oleh bantuan dana melalui usaha lunak seperti "revolving funds" yang dikelola oleh kelompok tani yang bersangkutan.
- (5) Peningkatan dan pemantapan keterampilan petani berusaha tani perlu didukung oleh pelatihan-pelatihan yang terpadu dan simultan.
- (6) Untuk menunjang pengembangan pertanian lahan kering secara terpadu, perlu adanya ketersediaan berbagai benih tanaman pangan, rumput unggul dan bibit ternak.
- (7) Usaha pengembangan pertanian lahan kering yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dan kelestarian lingkungan hendaknya dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik dalam perencanaan dan program pelaksanaan oleh berbagai instansi terkait.

PENUTUP

Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Datarnangka ini merupakan tahap awal dari partisipasi IPB dalam usaha membantu Pemda Sukabumi meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani lahan kering. Dengan pola yang hampir sama, kegiatan ini juga dilakukan di Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal (1991/1992) dan di Desa Cibaregbeg Kecamatan Sagaranten (1992/1993).

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, S. and J.R. Mc Intosh, 1978. Cropping System Research Activities in Indonesia. In : Report of the 7th Cropping System Working Group Meeting. International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines.
- Fliegel, F.C., J.E. Kivlin and G.S. Sekhon, 1977. Message Distortion and the Diffusion of Innovations in Northern India. Calcuta Press, Calcuta.
- Gomez, A.A. and K.A. Gomez, 1983. Multiple Cropping in the Humid Tropics of Asia. IDRC, Canada.
- Lubis, A.M. 1991. Analisis Konversi Lahan Hutan ke Lahan Pertanian dan Konversi Lahan Pertanian ke Lahan Industri dan Perumahan dengan Metode Pendekatan Sewa Ekonomi Lahan. Seminar Jurusan Tanah Fakultas Pertanian IPB. Tidak dipublikasikan.
- Muhammad, 1989. Potensi, Masalah dan Strategi Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi. Pemda DT II Sukabumi.
- Soehoed, W. 1992. Strategi Pembangunan Desa. Perspektif Masa Depan. Makalah dalam Seminar Nasional. Pembangunan Desa - Bandung.

TIM PELAKSANA

1. Pengembangan Wilayah : 1. Prof.Dr.Ir. Kuntjoro
2. Ir. Moentoha Selari, MS
2. Tanah : Dr.Ir. Oteng Haridjaja, MSc
3. Bidang Agronomi : 1. Prof.Dr.Ir. Sarsidi S.
2. Hudaya
3. Koko
4. Bidang Peternakan : 1. Dr.Ir. Tantan R. W.
2. Drh.R. Kurnia Achyadi, MS
3. Ir. Rudi H.
5. Bidang Kelembagaan : 1. Dr.Ir. Aida V. Hubeis
2. Ir. Andi Sularto
6. Bidang Agriforestry : Dr.Ir. Surdiding R., MSc
7. Bidang Agroindustri : Dr.Ir. Atjeng M. Sjarief
8. Teknis Lapangan : Ir. Acu Suntana.



PEMBINAAN PENGUSAHA INDUSTRI KECIL
MELALUI SISTEM INKUBATOR 1)

Oleh:
1) Rizal Syarif 2)
Darwin Kadarsman 3)

PENDAHULUAN

Pengalaman empirik dalam pembinaan industri kecil dipetik dari program-program yang telah dikembangkan oleh PUSBANGTEPA Lembaga Penelitian IPB sejak awal berdirinya hingga saat ini. Pengalaman ini kemudian diperkaya dengan konsepsi sistem inkubator yang dikembangkan di Pusat Antar Universitas (PAU) Pangan dan Gizi IPB.

PUSBANGTEPA didirikan pada tahun 1976 untuk mendukung pelaksanaan Proyek Perbaikan Gizi Nasional. Bersama-sama dengan komponen proyek lainnya di Departemen Kesehatan dan Departemen Pertanian. PUSBANGTEPA berpengalaman selama lima tahun (1976/1977-1981/1982) melaksanakan intervensi perbaikan gizi di Kabupaten-kabupaten Bojonegoro (Jatim), Karang Anyar (Jateng), Lombok (NTB), Gunung Kidul (DIY) dan OKI (Sumsel). PUSBANGTEPA bertugas mengembangkan program perbaikan cara penyimpanan dan pengolahan bahan pangan untuk masing-masing daerah kerja. Disamping itu untuk meningkatkan pendapatan petani juga dikembangkan industri kecil seperti industri tempé, industri krupuk, industri bahan makanan campuran (BCM). Industri-industri tersebut ditumbuhkan dan atau dibina secara berkesinambungan selama 2 - 3 tahun dengan melakukan kunjungan bimbingan secara periodik.

Pada masa proyek tahap II, PUSBANGTEPA lebih banyak melakukan penelitian-penelitian terapan dan menerbitkan serta menyebarkan paket-paket industri kecil pangan. Paket industri kecil pangan ini dibuat dalam bentuk leaflet berisi teknologi pengolahan berbagai komoditi mulai dari proses pembuatan, peralatan, kebutuhan bahan dan studi kelayakan sederhana bila akan diaplikasikan sebagai suatu usaha. Ada 46 paket industri hasil pangan yang telah dibuat dan disebarkan langsung ke desa-desa atau melalui instansi terkait.

1. Disampaikan pada Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, LPM IPB, 10 Juli 1993
2. Staf Pengajar Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi Pateta-IPB/Kepala Pusbangtepa IPB.
3. Staf Pengajar Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi Pateta IPB/Asisten Direktur Administrasi PAU Pangan dan Gizi - IPB.

Selama dua tahun terakhir, PUSBANGTEPA IPB mencoba menerapkan **cara pembinaan baru** dengan membina suatu pengusaha bengkel alat-alat dan mesin pertanian yang melakukan usaha di PUSBANGTEPA. Latar belakang kegiatan ini pada awalnya lebih ditekankan pada **pemanfaatan fasilitas PUSBANGTEPA IPB** terutama fasilitas pilot plant. Dalam pelaksanaannya terlihat **hal-hal positif** pada perkembangan pengusaha tersebut baik **kemampuan teknis, manajerial** bahkan **keberhasilan pemasaran** akibat adanya akses PUSBANGTEPA dengan berbagai kalangan, sehingga menyebabkan adanya peningkatan kemampuan untuk bersaing dan kenaikan omset secara nyata. Model seperti ini kelihatannya **sangat mirip** dengan **sistem inkubator** yang dilaksanakan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Berdasarkan hal ini penulis merasa lebih yakin bahwa model ini dapat dikembangkan secara **lebih konsepsional** dan dibiayai secara **lebih proporsional** oleh pemerintah. Diharapkan pusat-pusat inkubator dapat lebih mempercepat pencetakan wiraswasta-wiraswasta baru dan atau membina wiraswasta-wiraswasta yang telah ada untuk lebih tangguh dalam rangka menghadapi era pembangunan yang akan kita hadapi di masa mendatang.

KONSEP INKUBATOR

Konsep inkubator muncul di Amerika Serikat sebagai jawaban atas besarnya **persentase kegagalan** orang-orang yang memulai bisnis. Dari hasil penelitian, inkubator bisnis dapat meningkatkan keberhasilan usaha baru dari rata-rata **20% menjadi rata-rata 80%**. Di Amerika Serikat inkubator yang pertama dimulai pada tahun 1959 dengan berdirinya **Batavia Industrial Center** di New York. Sampai pada tahun 1980 hanya berjumlah 10 buah, 1984 berjumlah 64 buah dan pada tahun 1991 berjumlah 425 buah.

Dari kunjungan Tim Pusat Inkubator Agribisnis (DEPTAN, PAU Pangan dan Gizi IPB, UNAND dan UGM) ke "Oklahoma State University", "Kansas State University" dan "University of Nebraska". Tim tersebut telah mencoba merumuskan beberapa batasan tentang inkubator bisnis, sebagai berikut:

- (1) **Mengingat (to incubate)** adalah memelihara objek di bawah kondisi terkendali dan lingkungan yang baik agar objek tersebut cepat berpengalaman dan tumbuh dengan sehat. Menginkubasi suatu kegiatan bisnis berarti memelihara kondisi-kondisi yang terkendali yang menjamin bisnis akan tumbuh dan berkembang.
- (2) **Pusat inkubasi (Incubator Center)** adalah suatu pusat yang membantu berlangsungnya proses transformasi bisnis kecil dan atau lemah menjadi perusahaan yang lebih kuat. Program-program inkubasi dapat dilaksanakan dengan atau tanpa

pemberian sarana (fasilitas) berusaha untuk pengusaha kecil tersebut. Berdasarkan hal ini, inkubator terdiri dari atas dua bentuk inkubator terpusat (**centralized incubator**) dan inkubator terpecah (**dispersed incubator**).

- (3) **Inkubator terpusat** menyediakan sebagian atau seluruh fasilitas berusaha yang disewakan dengan tarif tertentu kepada pengusaha seperti ruangan industri, kantor, fasilitas administrasi, fasilitas komunikasi disamping bantuan teknis dalam aspek teknologi, manajemen pemasaran, dan sebagainya. Biasanya pada inkubator bentuk ini para pengusaha dibiarkan selama 2-3 tahun sebelum dilepas (berusaha secara mandiri).
- (4) **Inkubator terpecah** menyediakan pelayanan bantuan teknis dalam berbagai aspek (teknologi, manajemen, pemasaran dan keuangan) kepada calon wiraswasta dan pengusaha kecil yang akan atau telah mengerjakan kegiatan bisnisnya di lokasinya sendiri secara berkesinambungan. Bentuk-bentuk bantuan teknis yang diberikan oleh inkubator antara lain: simulasi bisnis, seminar-seminar, pelatihan-pelatihan profesional, penelitian dan pengembangan bersama di pusat inkubator, penyediaan informasi yang lengkap tentang agribisnis.

Sebagai tambahan, perlu disampaikan bahwa data yang diperoleh dari ketiga universitas yang dikunjungi tersebut menunjukkan bahwa anggaran biaya operasional pusat inkubator diperoleh dari pemerintah sebesar kurang lebih 30% (State & Federal Government), para pimpinan masyarakat & industri 50% dan sisanya diperoleh dari kegiatan-kegiatan operasional inkubator sendiri.

Saat ini PAU Pangan dan Gizi-IPB, mencoba merintis pendirian Pusat Inkubator Agribisnis Industri Pangan dengan bekerjasama dengan suatu departemen terkait dan tentunya unit-unit kerja lain di IPB seperti PUSBANGTEPA, FATETA, FAPERTA (Jurusan SOSEK) dan sebagainya.

PEMBINAAN PENGUSAHA INDUSTRI KECIL

Beberapa program PUSBANGTEPA di masa lalu maupun sekarang dalam membina pengusaha industri kecil apabila kita tinjau berdasarkan konsep inkubator bisnis mungkin sudah dapat disebut telah menjalankan sistem inkubator walaupun pada saat dilaksanakan, istilah "inkubator" belum populer.

Di bawah ini akan diuraikan secara singkat beberapa kegiatan yang dapat dikatakan telah mengikuti "sistem Inkubator":

(1) Industri Kecil Pangan

Selama pelaksanaan proyek perbaikan gizi yang dibiayai oleh pinjaman Bank Dunia, PUSBANGTEPA IPB juga membina beberapa industri kecil pangan di beberapa daerah kerja, antara lain:

- Industri tempe (Kabupaten Karang Anyar)
- Industri krupuk (Kabupaten OKI)
- Industri bahan makanan campuran atau BMC (Kabupaten Bojonegoro).
- Industri tepung gaplek (Kabupaten Gunung Kidul)
- Industri tauco (Kabupaten Cianjur)

Pembinaan dilakukan dengan memberikan bantuan teknis/bimbingan selama kunjungan singkat dengan frekuensi 2-3 kali setahun selama 1-2 tahun (belum intensif). Bantuan teknis yang diberikan lebih banyak mengenai aspek teknologi seperti rancangan peralatan (alat pengupas kedele kering, alat penggiling, alat perajang singkong, alat penyangrai dan alat-alat penjemur, pencampur dan sebagainya) dan perbaikan proses produksi. Untuk meningkatkan pemasaran diberikan juga bantuan teknis dalam masalah mengemas. Sayangnya sekali waktu itu tidak dilakukan evaluasi atau penelitian kinerja dari industri-industri kecil tersebut baik selama masa pembinaan maupun setelah itu.

(2) Penumbuhan Kegiatan Ekonomi Produktif

Bekerjasama dengan BKKBN, Yayasan Bina Swadaya dan UNFPA, pada tahun 1983-1986 PUSBANGTEPA mengembangkan kegiatan ekonomi produktif di pedesaan bagi para akseptor KB untuk merealisasikan konsep NKKBS (Norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera). Untuk itu diintroduksikan paket teknologi untuk industri pangan (agroindustri) di 6 propinsi yang meliputi 142 kelompok usaha bersama pra koperasi yang kemudian dikenal dengan UBKB. Paket teknologi yang diterapkan sesungguhnya sudah relatif lengkap secara bersistem. Teknologi dibina oleh IPB, perkreditan dan bimbingan usaha dibina oleh Bina Swadaya sedangkan NKKBS dibina oleh BKKBN.

Evaluasi terhadap kegiatan ini memperlihatkan hasil yang kurang menggembirakan, karena hanya sekitar 155 yang dapat mengembangkan usahanya. Kelemahan dari program ini yaitu kurangnya motivasi dari kelompok usaha yang dibentuk sehingga modal yang diharapkan dapat bergulir ternyata tidak berkembang.

(3) KOPTI Klaten

Pembinaan Kopti Kabupaten Klaten dilaksanakan secara intensif selama tahun 1989-1991. Pembinaan dilakukan dengan melakukan kunjungan rutin yang cukup intensif yaitu satu kali dalam waktu 1-2 bulan. Selama kunjungan diberikan bantuan teknis meliputi aspek teknologi seperti

pengembangan produk, perbaikan proses, pengemasan dan teknik-teknik pengendalian mutu. Disamping itu untuk meningkatkan pemasaran diberi bimbingan untuk memperoleh nomor registrasi dari Departemen Kesehatan dan tanda Standar Industri Indonesia (SII).

Sampai saat ini bimbingan masih dilakukan terutama dalam membantu memecahkan masalah-masalah yang menyangkut mutu dan upaya diversifikasi produk (usaha). Kopti Kabupaten Klaten ini juga telah menerima mahasiswa-mahasiswa Fateta IPB untuk kegiatan praktek lapang dan penelitian skripsi.

Selama praktek lapang, mahasiswa juga banyak memberikan masukan yang berharga bagi KOPTI. Bahkan hasil penelitian skripsi mengenai susu kedelai akan diterapkan sebagai komoditi usaha di masa mendatang.

(4) KUD Cicurug

KUD Cicurug dibina oleh PUSBANGTEPA sejak 1990 sampai sekarang. Komoditi yang diproduksi antara lain saos tomat dan buah-buahan kaleng. Kunjungan oleh staf dan teknisi PUSBANGTEPA dilakukan satu kali dalam waktu 1-2 minggu selama dua tahun pertama. Pembinaan lebih diarahkan kepada aspek teknologi seperti perbaikan proses, pengemasan dan standarisasi mutu sehingga akhirnya produk-produk KUD Cicurug dapat diterima di pasar swalayan Hero (Suba Indah Group).

(5) Pengusaha Bengkel Alsintani

Selama dua tahun terakhir, PUSBANGTEPA telah membina pengusaha bengkel Alsintani yaitu CV. AJEG MANDIRI PUTRA. Pada awalnya memang hubungan ini lebih tepat disebut kerjasama yang bagi PUSBANGTEPA sendiri lebih menekankan kepada pemanfaatan fasilitas yang menganggur. Akan tetapi pada pelaksanaannya ada beberapa keuntungan ekstra yang diperoleh pengusaha tersebut antara lain:

- Adanya transfer teknologi baik melalui diskusi dengan staf maupun teknisi PUSBANGTEPA berupa rancangan-rancangan peralatan, keterampilan karyawan dan sebagainya.
- Selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan PUSBANGTEPA baik mengenai aspek teknis maupun manajemen dalam produksi alat-alat dan mesin pertanian.
- Adanya peningkatan dalam jaringan pemasaran akibat luasnya relasi PUSBANGTEPA.

Beberapa hal yang sama dengan praktek inkubator terpusat dalam kerjasama ini adalah penyewaan ruangan dan peralatan penggunaan alat kantor dan telepon (pembayaran bersama), "bantuan teknis" dan akses pemasaran selama dua tahun, terlihat kenaikan omset yang cukup bermakna.

P E N U T U P

Dari uraian-uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa di Perguruan Tinggi perlu didirikan dan dikembangkan pusat-pusat inkubator bisnis untuk **memperkuat peranannya** dalam **pembangunan ekonomi** melalui pembinaan-pembinaan pengusaha kecil dan menengah di wilayahnya. Pengembangan pusat-pusat inkubator bisnis di Perguruan Tinggi akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional karena diharapkan secara terus menerus dapat **melahirkan dan membina wiraswasta-wiraswasta baru yang profesional.**

Pengembangan pusat inkubator bisnis di Perguruan Tinggi mempunyai prospek yang baik karena adanya beberapa faktor pendukung, yaitu:

- (1) Perguruan Tinggi di Indonesia dengan misi Tri Dharma Perguruan Tingginya telah terbiasa berhubungan dan membina masyarakat dan telah pula berperan dalam Pembangunan Nasional.
- (2) Sumberdaya fisik dan manusia (tenaga ahli dalam berbagai bidang ilmu) cukup tersedia sehingga tidak memerlukan investasi terlalu besar.
- (3) Hubungan Perguruan Tinggi dengan para alumninya melalui himpunan alumni atau individu mempunyai akses yang cukup besar dalam hal:
 - (a) Bantuan tenaga instruktur untuk aspek manajemen praktis, teknis, finansial dan peraturan-peraturan.
 - (b) Informasi bisnis
 - (c) Jaringan pemasaran produk.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Aman Wirakartakusumah dan Darwin Kadarisman. 1992. Field Report on Agribusiness Incubator Program in Oklahoma, Kansas, Nebraska, Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi IPB, Bogor.
- Program Pengembangan PUSBANGTEPA Lembaga Penelitian IPB tahun 1989-1994.
- Rowland, M. 1991. Nurturing the Fregile Start-up. The New York Times, April, 1991, New York.

**PERANAN PROYEK MAKANAN JAJANAN IPB
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN ¹⁾**

Oleh:

Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis dan Tim ²⁾

I. PENDAHULUAN

1. Kemiskinan: Beberapa Konsep dan Pengukurannya

Hingga kini dikenal banyak konsep dan pengukuran yang bertalian dengan kemiskinan. Dalam tulisannya yang dicetak- ulang oleh *World Bank*, Srinivasan (1977) mengemukakan kemiskinan di suatu negara atau wilayah dapat diukur baik dengan indikator absolut maupun indikator relatif. Menurut Djojohadikusumo (1980), kemiskinan absolut merupakan suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan kemiskinan relatif merupakan tingkat pemerataan dalam pembagian pendapatan nasional (GNP). Lebih lanjut, kriteria *World Bank* tentang kemiskinan yang dikutip Djojohadikusumo (1980), sebagai berikut:

1. Pembagian pendapatan "sangat timpang" bila 40 % jumlah penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12 % GNP;
2. "Ketidakmerataan tingkat sedang" bila 40 % jumlah penduduk berpendapatan rendah menerima 12-17 % GNP; dan
3. "Ketidakmerataan tingkat rendah" bila 40 % jumlah penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17 % GNP.

Sajogyo (1977) mengklasifikasikan tingkat kemiskinan penduduk perdesaan dan perkotaan berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga dalam nilai tukar beras per kapita per tahun. Untuk perdesaan kriteria tersebut adalah: < 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun [miskin], < 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun [miskin sekali], < 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun [paling miskin]. Sedangkan untuk daerah perkotaan: < 480 kg nilai tukar beras per orang tahun [miskin], < 360 kg nilai tukar beras per orang per tahun [miskin sekali], < 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun [paling miskin].

1) Disampaikan pada "Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan", LPM IPB, 10 Juli 1993

2) Ketua Program Makanan Jajanan IPB (Susunan Tim terlampir)

Semula konsep dan pengukuran kemiskinan Sajogyo inilah yang sering dipakai, hingga sejak tahun 1984 Indonesia secara resmi menggunakan ukuran garis kemiskinan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pengeluaran rumah-tangga rata-rata. Hingga kini, tahun 1993, ukuran garis kemiskinan menurut BPS ditentukan sebesar Rp. 12.300,00/orang/bulan untuk masyarakat di desa, dan Rp. 26.500,00/orang/bulan untuk masyarakat di kota ¹⁾

Berapa pun besar perhatian dan sumbangan pemikiran yang telah kita berikan untuk bersama-sama memahami dan membantu mengentaskan kemiskinan, tampaknya belum akan cukup. Masih banyak yang dapat dikerjakan, baik melalui program-program lintas-sektoral maupun lintas-keprofesian yang mensyaratkan perhatian dan pemahaman sungguh-sungguh sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program. Bagaimana dengan Program Makanan Jajanan IPB?

2. Latar Belakang Proyek Makanan Jajanan IPB

Proyek Makanan Jajanan IPB ini mulanya secara resmi bernama "Program Perbaikan Makanan Yang Umum Dimakan di Indonesia" (*Programme on The Improvement of The Wholesomeness of Common People's food in Indonesia Project*), yang kemudian lebih dikenal dengan Proyek Makanan Jajanan (*Streetfood Project*). Proyek dimulai pada tahun 1988 dengan tujuan: (1) meningkatkan kualitas dan keamanan makanan jajanan, (2) memperkuat posisi sosial ekonomi pengusaha/pedagang makanan jajanan (PMJ), dan (3) merumuskan kebijaksanaan sebagai rekomendasi untuk pengembangan program.

Proyek makanan jajanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Belanda, menyadari bahwa perbaikan mutu dan keamanan makanan jajanan akan membantu memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Indonesia sendiri menunjukkan keinginan yang sejalan dengan upaya pengembangan pengusaha kecil (di bidang makanan), karena sektor informal ini begitu potensial dipandang dari segi penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha yang tinggi, dan sumbangan (retribusi) yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah, serta dominan mewarnai perilaku kehidupan, terutama masyarakat perkotaan.

Walaupun pada tahun 1992 bantuan dari Belanda terputus, proyek tetap berjalan dengan dana DP3M-Depdikbud, Depkes, GTZ, dan Indofood. Tetapi, bagaimana Proyek Makanan Jajanan IPB berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan?

1) Surat Kabar Kompas Edisi No. 3 Tahun ke-29

Disadari sepenuhnya, bahwa tujuan utama Proyek Makanan Jajanan IPB bukanlah mengurangi angka kemiskinan itu secara langsung melalui program-program (*actions*) baik yang telah diuji-cobakan atau telah dicoba-terapkan di Kotamadya Bogor. Untuk itulah, pemaparan pelaksanaan dan hasil-hasil proyek makanan jajanan IPB ini diharapkan dapat membuka jalan dan melengkapi berbagai konsep ke arah upaya pengentasan kemiskinan. Beberapa hal yang memberi alasan tentang hal ini, yaitu: potensi usaha makanan jajanan (UMJ) dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang luar biasa, memberi sumbangan pada pendapatan daerah, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengembangkan modal/investasi usaha di daerah asal (bagi pedagang migran).

Makanan jajanan yang terdiri atas minuman (*beverages*), makanan kecil (*snack*), dan makanan lengkap (*meals*), didefinisikan sebagai makanan yang siap untuk dimakan atau terlebih dahulu dimasak di tempat penjualan dan dijual di pinggir jalan atau lokasi yang ramai dan di tempat umum. Makanan jajanan ini menyediakan kurang lebih seperempat konsumsi makanan keluarga pada masyarakat perkotaan, dan lebih dari itu makanan jajanan diproduksi dan dijual oleh pengusaha kecil.

Usaha makanan jajanan dengan berbagai aspek positifnya tidaklah berkembang begitu saja tanpa membawa permasalahan. Pendapat umum justru lebih sering mendiskreditkan pelakunya (PMJ) kepada hal-hal yang berkonotasi negatif seperti penyebab ketidaktertiban, kemacetan lalu lintas, dan urbanisasi, serta penyebab penyakit sebagai akibat dari mutu dan keamanan makanan yang rendah.

Untuk mengelola dua potensi inilah Proyek Makanan Jajanan IPB muncul dengan upaya meminimalkan potensi negatif UMJ sambil mengembangkan berbagai potensi positif yang dimilikinya melalui kegiatan intervensi/penyuluhan.

Proyek ini terdiri dari dua tahap; tahap I dilaksanakan tahun 1988-1990 dan difokuskan pada penelitian-penelitian dasar. Tahap II dilaksanakan pada tahun 1990-1992 dalam bentuk kegiatan intervensi/penyuluhan.

Penelitian pendahuluan menghasilkan informasi penting tentang situasi sosial ekonomi UMJ dan kondisi keamanan makanan jajanan dimana tingginya kontaminasi kimia dan mikrobiologi makanan disebabkan oleh cara penanganan yang kurang terjamin kebersihan dan kesehatannya. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa situasi UMJ masih jauh dari yang diharapkan (Lihat lampiran).

Langkah-langkah optimal perlu segera didahulukan untuk melindungi kepentingan berbagai pihak, baik pemerintah,

konsumen dan pedagang sendiri; konsumen terlindungi dari resiko ketidaksehatan, produsen terhindar dari tuduhan menjual produk bermutu rendah, dan pemerintah memperluas kesempatan kerja dan peluang mencari nafkah untuk ribuan orang di kota dan di desa dengan pengembangan usaha makan jajan.

Kegiatan intervensi bertujuan untuk mendukung peningkatan penggunaan teknologi pengolahan (produksi) dan penjualan (distribusi) makanan jajan, dan sosial ekonomi pedagangnya, diantaranya melalui:

1. Pengembangan metoda dan materi penyuluhan untuk peningkatan pengetahuan, praktek penanganan makanan dan kemampuan manajerial usaha makanan jajan (Intervensi Umum [IU]);
2. Pengembangan metoda dan materi penyuluhan terutama bagi pedagang makanan yang rawan terhadap kontaminasi (Intervensi Produk Khusus [IPK]), seperti es campur/cendol, es puter dan gado-gado;
3. Perancangan metoda dan materi penyuluhan/kampanye untuk konsumen melalui berbagai media, sehingga memungkinkan para pembeli dapat membedakan makanan yang bersih dan kurang bersih, bergizi dan tidak bergizi, dan seterusnya, serta
4. Pengembangan usulan yang berisi pembentukan organisasi yang membantu usaha makanan jajan di Jawa Barat, baik untuk pendekatan, diseminasi, pemantauan, dan pengembangan lebih lanjut program intervensi, serta melanjutkan penelitian (*research*) dan kegiatan (*action*) lainnya.

II. INTERVENSI SOSIAL EKONOMI DAN TEKNOLOGI TERHADAP PEDAGANG MAKANAN JAJANAN

1. Permasalahan

Hasil penelitian makanan jajan oleh Proyek Makanan jajan IPB di Kodya Bogor pada tahun 1988-1990 menunjukkan bahwa: (1) omzet penjualan makanan jajan mencapai 48,84 milyar rupiah per tahun dengan penyerapan tenaga kerja 12,2% dan pemberian retribusi ke Pemda sebesar 0,3 milyar rupiah per tahun, (2) pendapatan harian PMJ rata-rata 5.882 rupiah atau sebanyak 2,3 kali upah minimum, sedangkan PMJ urban dapat mengirim uang ke kampung sekitar 0,72 milyar rupiah per tahun, lebih kurang 206 kali subsidi pembangunan desa, (3) beberapa makanan jajan beresiko terhadap kesehatan karena kontaminasi mikroba dan senyawa kimia berbahaya, (4) makanan jajan memberi kontribusi zat gizi bagi masyarakat, (5) sebesar 30% pengeluaran konsumsi keluarga dialokasikan untuk makanan jajan.

Kontaminasi makanan timbul karena penanganan yang kurang higienis, meliputi aspek ketersediaan sarana penggunaan air bersih, higiene tempat kerja dan lingkungan, pembuangan limbah, bahan mentah, kebersihan peralatan dan perlengkapan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan. Sedangkan persoalan pokok sosial ekonomi menyangkut pada belum berfungsinya kelompok swadaya sebagai alternatif solusi masalah, minimnya penguasaan manajemen dan keterampilan berusaha yang efektif dan efisien, sedikitnya intervensi kredit dan tabungan sebagai sumber modal, serta pengakuan dan pengintegrasian eksistensi PMJ dalam perencanaan kebijakan pemerintah setempat.

Mengacu pada hasil penelitian dan untuk menciptakan perubahan penanganan makanan yang bersih dan sehat serta untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi PMJ, Proyek Makanan Jajanan IPB menyusun dan melaksanakan intervensi kepada pedagang dalam beberapa tahap yang terdiri dari program percontohan (1990-1991), program Implementasi Percontohan yang bekerjasama dengan Pemda Kodya Bogor (1991-1993), dan tahap penyebarluasan (baru dimulai dalam skala yang sangat kecil dan di daerah Bogor sendiri, tahun 1992).

2. Program Percontohan

Program percontohan yang diikuti oleh 8 kelompok PMJ (90 orang) dirancang dengan pendekatan kelompok dan pendekatan kebutuhan sasaran. Intervensi dalam bentuk penyuluhan diawali dengan berbagai kegiatan; (a) analisa kebutuhan materi penyuluhan berdasarkan hasil-hasil penelitian, melakukan penelitian mendalam untuk materi intervensi produk khusus, serta melakukan wawancara langsung untuk menggali *felt need* PMJ, (b) penyusunan modul intervensi sekaligus perancangan alat bantu dengan prinsip banyak gambar sedikit huruf, (c) seleksi kelompok sasaran; didasarkan pada hasil temuan survey dengan tiga karakteristik kelompok (berpangkal di lokasi strategis, menetap di perkampungan, dan berkeliling), (d) penentuan kelompok sasaran, (e) pendekatan kelompok sasaran; dilakukan jauh sebelum pelaksanaan intervensi sendiri misalnya dengan kunjungan rumah, kunjungan ke lokasi berjualan dan melalui pengambilan biodata calon peserta, (f) pendekatan tokoh informal dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap berpengaruh dalam pelaksanaan intervensi di kelompok yang bersangkutan. Tokoh tersebut dapat berasal dari lingkungan PMJ sendiri ataupun dari masyarakat sekitar PMJ tersebut, (g) pendekatan aparat kelurahan diperlukan karena fungsinya selaku penanggungjawab wilayah pelaksanaan intervensi serta diharapkan dapat berperan dalam penyebarluasan pada sasaran lainnya, kelak.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PMJ untuk meningkatkan kualitas makanan yang dijual, intervensi dibagi menjadi Intervensi Umum dan Intervensi Produk Khusus. Intervensi Umum didasarkan pada masalah-masalah PMJ pada umumnya, sedangkan Intervensi Produk Khusus didasarkan pada masalah yang dihadapi PMJ tertentu.

Intervensi Umum disampaikan kepada seluruh PMJ yang terlibat dalam program, materi intervensi (4 modul) terdiri dari pengetahuan tentang penanganan makanan yang sehat, penyakit yang disebabkan oleh makanan, mikroba, kontaminasi dan cara penurunannya melalui perbaikan lingkungan kerja, metode pengolahan, kualitas bahan mentah, kebersihan peralatan, cara penyimpanan, pengemasan, pemajangan, transportasi, kebersihan pribadi, pemakaian air dan bahan tambahan makanan. Sedangkan Intervensi Produk Khusus disampaikan kepada PMJ peserta Intervensi Umum yang menjual produk khusus (produk populer dengan kontaminasi tinggi), yaitu: es cendol, es puter dan gado-gado. Materi intervensi produk khusus terdiri dari materi umum yang dilengkapi dengan materi khusus tentang modifikasi pengolahan atau proses produksi dan modifikasi peralatan untuk meningkatkan mutu mikrobiologi produk khusus tersebut. Intervensi umum dilakukan pada bulan Januari-Februari 1991 sedangkan intervensi produk khusus pada bulan Juli-Agustus 1991.

Program dilaksanakan dalam 8 kali pertemuan (1 pertemuan per minggu), diawali dengan pertemuan pre-intervensi yang diisi dengan penjelasan umum tentang pelaksanaan intervensi, pemilihan ketua kelas, dan diskusi tentang teknis pelaksanaan pertemuan selanjutnya. Tujuh pertemuan lain diisi dengan pembahasan modul-modul penyuluhan yang disampaikan dengan metoda diskusi, penjelasan, permainan simulasi, bermain peran dan sumbang saran. Sedangkan media yang digunakan yaitu film video, film animasi, poster, folder, bagan, tape, papan tulis dan flip paper. Pada intervensi produk khusus, selain penyampaian materi dalam bentuk teori juga dilakukan praktek pengolahan produk yang bersangkutan. Guna menumbuhkan motivasi dan semangat belajar, peserta dilengkapi dengan alat tulis menulis yang diberi cap logo proyek. Selain itu, sertifikat dan asesori berjualan seperti apron, topi, sticker yang semuanya berinisial PESERTA PENYULUHAN PROYEK MAKANAN JAJANAN IPB dan MAKANAN BERSIH DAN SEHAT diberikan kepada peserta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan kebanggaan untuk melakukan penanganan makanan yang bersih dan sehat. Upaya lain yang berkaitan dengan penumbuhan kebanggaan dan motivasi belajar adalah kegiatan cepat tepat antar kelompok peserta penyuluhan. Pada ajang ini mereka berkompetisi secara sehat dan sekaligus berupaya untuk semakin memahami materi penyuluhan yang diperoleh. Para pemenang memperoleh piagam, piala dan uang sebagai tambahan modal/kas kelompok.

Evaluasi. Dalam pelaksanaan program percontohan dilakukan 2 jenis evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi efek. Evaluasi proses dilakukan untuk mengoptimasi proses belajar mengajar, sedangkan evaluasi efek yang dilakukan melalui wawancara pengetahuan, observasi praktek penanganan makanan dan sampling mutu makanan diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh output yang diharapkan dari intervensi telah tercapai.

Hasil evaluasi proses yang dilakukan dengan cara pengisian kuesioner pada setiap akhir penyuluhan menunjukkan bahwa karakter penyuluh yang terbuka dan ramah adalah yang paling disukai peserta. Film video, film animasi, poster, bentuk simulasi dan kesederhanaan bahasa penyuluh sangat memudahkan peserta dalam mencerna materi penyuluhan. Pada umumnya, peserta berpendapat bahwa penyuluhan cukup dilakukan 1,5 jam per pertemuan.

Hasil evaluasi efek menunjukkan bahwa modul penyuluhan umum sangat berhasil dalam meningkatkan pengetahuan dasar PMJ, tetapi tidak demikian halnya dalam praktek pengolahan makanan dan mutu mikrobiologi makanan. Hal ini dapat dimengerti karena perubahan pengetahuan dapat terjadi sesaat setelah penyuluhan, sedangkan perubahan perilaku dan keterampilan selain memerlukan waktu yang lebih lama juga memerlukan dukungan sarana penunjang lainnya seperti modal, air bersih, tempat pembuangan limbah, dan pemberlakuan sistem sanksi.

Meskipun tidak terjadi perubahan nyata dalam praktek pengolahan dan mutu makanan, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa aplikasi materi-materi sosial sudah dilaksanakan pedagang. Beberapa kelompok sudah memiliki pengurus, kegiatan simpan pinjam, arisan, kerja bakti membersihkan lingkungan tempat berjualan dan mengadakan pertemuan rutin. Beberapa pedagang sudah mau memanfaatkan jasa bank untuk mengatasi keterbatasan modal. Kekompakkan kelompokpun tidak hanya terbatas pada kegiatan berdagang tetapi juga pada kegiatan sehari-hari. Tulisan-tulisan peringatan seperti JAGALAH KEBERSIHAN dan UTAMAKAN MENJUAL MAKANAN YANG BERSIH DAN SEHAT banyak ditempel PMJ di dinding-dinding rumah, di pintu-pintu dekat tempat pengolahan sebagai bukti munculnya kepedulian mereka untuk menciptakan makanan yang lebih sehat.

3. Program Implementasi Percontohan

Hasil evaluasi yang diperoleh pada intervensi program percontohan ditambah dengan pengamatan lapang selama kegiatan penyuluhan dijadikan sebagai bahan untuk merevisi modul penyuluhan yang direncanakan akan disebarluaskan pada sasaran lebih luas.

Modul yang sudah direvisi tersebut diujicobakan kembali dalam program Implementasi Percontohan dengan pelaksana penyuluhan Pemda Kodya Bogor. Kerjasama Proyek Makanan Jajanan IPB dengan Pemda Kodya Bogor merupakan langkah yang penting karena Pemda mempunyai fungsi politis dalam penyebaran intervensi. Dalam kerjasama ini, setelah melalui proses tukar pikiran yang intensif akhirnya pihak Pemda Kodya Bogor bersedia membentuk 11 orang Satgas dan 11 orang Inisiator yang berperan langsung dalam menangani upaya pembinaan PMJ. Satgas yang terdiri dari para kepala bagian/kepala dinas instansi terkait (Assda II, Bappeda, Bangdes, Tim Penggerak PKK, Bagian Kesra, Perekonomian, Dinas Koperasi, DKK dan Dinas Perindustrian) berperan sebagai penentu kebijakan pembinaan, sedangkan Inisiator yang merupakan tenaga lapang dari dinas-dinas tersebut bertugas sebagai pelaksana teknis kegiatan intervensi.

Dalam rangka penyamaan persepsi Pemda dengan proyek dalam intervensi PMJ, serta upaya transfer pengalaman pelaksanaan intervensi di lapangan, Proyek Makanan Jajanan IPB mengadakan berbagai rangkaian kegiatan yang mengarah pada kedua maksud tersebut yakni melalui: ekspose ke Walikota-dya Bogor, lokakarya intervensi, negosiasi intensif, pembentukan Satgas, seminar, dan pelatihan pelatih (*Training of Trainer*) bagi para Inisiator.

Program Implementasi Percontohan diikuti oleh 10 kelompok PMJ (135 orang), dilaksanakan dalam 10 kali pertemuan dimana pertemuan pertama merupakan pre-intervensi sedangkan 9 pertemuan berikutnya adalah untuk penyampaian materi Intervensi Umum yang digabung dengan materi Intervensi Produk Khusus. Hasil evaluasi proses dan efek pengetahuan menunjukkan kondisi yang hampir sama dengan ketika pelaksanaan program percontohan, yakni penilaian - penilaian yang positif terhadap proses dan media penyuluhan serta peningkatan pengetahuan yang sangat baik pada evaluasi efek. Sedangkan observasi dan sampling tidak dilakukan sehubungan dengan belum rampungnya perancangan sistem kontrol dan sistem sanksi yang diduga mampu meningkatkan praktek penanganan makanan peserta dan mutu mikrobiologinya.

Monitoring intensif yang dilakukan oleh Inisiator bersama Staf Proyek menghasilkan dinamika kelompok yang lebih baik pada intervensi tahap ini dibanding intervensi pertama. Hampir semua kelompok sudah mempunyai aktivitas rutin yang dilaksanakan dalam keteraturan administrasi seperti simpan-pinjam, arisan, tabungan kelompok, gotong-royong kebersihan lingkungan dan pertemuan rutin per bulan untuk memusyawarahkan kemajuan kelompok. Secara psikologis, pandangan para PMJ terhadap aparat berseragam ini mulai berubah. Mereka sudah berani berdialog, berani mengemukakan pendapat, dan bahkan melontarkan kritikan-kritikan terhadap perlakuan Pemda dalam menangani PMJ.

Masih dalam rangkaian kegiatan Implementasi Percontohan, pada tahun 1992-1993 pembinaan diperluas pada tiga kelompok sasaran (52 orang). Selain untuk memperluas sasaran, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk ujicoba revisi modifikasi peralatan produk khusus berupa alat cetak cendol dan perancangan alat putar es puter. Selain itu, perluasan sasaran dengan skala yang masih sangat kecil telah dilakukan pula melalui proyek lingkaran kampus dengan membina satu kelompok pedagang yang berjumlah 15 orang di Darmaga, Kabupaten Bogor. Upaya perluasan intervensi tetap dirintis; dalam waktu dekat perluasan segera akan dilakukan ke Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

4. Penyebarluasan Program Intervensi

Dasar pemikiran. Sebagai sektor informal, makanan jajanan besar sumbangannya dalam meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan perekonomian daerah serta penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Meskipun demikian, pengetahuan produsen dan konsumen tentang keamanan makanan jajanan serta mutu gizinya masih sangat terbatas. Distributor/pengecer bahan tambahan makanan (BTM) juga berperan menimbulkan kontaminasi senyawa kimia berbahaya pada makanan. Dikhawatirkan jika keadaan ini dibiarkan terus, sewaktu-waktu dapat timbul masalah penyakit atau keracunan karena makanan jajanan atau timbulnya masalah gizi, baik gizi kurang atau gizi lebih, karena konsumsi makanan jajanan yang terus menerus.

Pemahaman bahwa usaha kaki lima akan menjadi fenomena yang berarti di perkotaan Indonesia, dalam masa yang akan datang jumlah penduduk perkotaan yang sebanyak 52 juta pada tahun 1990 (28.8% dari total penduduk) dan akan meningkat menjadi 132 juta (52.2% dari total penduduk) pada tahun 2020¹⁾. Pengabaian potensi dari bagian ekonomi perkotaan yang menyerap 19.3% tenaga kerja (12.2% dalam kasus PMJ) adalah tidak realistis dan pemborosan.

Intervensi yang sudah dilakukan dalam dua tahap berbeda di Kodya Bogor; Program Ujicoba dan Program Implementasi Percontohan meyakinkan kita bahwa dengan pendekatan penyuluhan, perilaku pedagang (pengetahuan dan praktek penanganan makanan) dapat diubah ke arah yang lebih baik. Berdasarkan pengalaman di Bogor tetapi dengan mempertimbangkan kondisi lokal yang berbeda, penyebarluasan program dapat dimulai di daerah-daerah lain. Sedangkan di Bogor sendiri, program implementasi yang sudah diujicobakan dapat terus dilembagakan dalam kebijakan pembangunan daerah setempat.

Beberapa hal yang masih perlu dikembangkan dan disempurnakan pada tahap penyebarluasan:

1) Kompas, 21 Agustus 1991

- a. Kader di tiap kelurahan yang dapat dipilih dari aparat kelurahan, tokoh masyarakat, ataupun tokoh pedagang sendiri perlu diberi pelatihan guna menciptakan kader yang mampu menyebarluaskan/meratakan penyuluhan di kelurahan yang bersangkutan.
- b. Monitoring dan pembinaan lanjutan setelah penyuluhan diperlukan untuk memantau praktek penanganan makanan dan kegiatan kelompok sehingga PMJ tetap termotivasi untuk menerapkan materi-materi penyuluhan yang sudah mereka terima.
- c. Sistem kontrol dan sistem sanksi merupakan perangkat intervensi yang patut diterapkan apabila proses penyuluhan (termasuk penyuluhan distributor/pengecer bahan tambahan makanan), monitoring dan pembinaan sudah terealisasi, serta jika fasilitas/sarana umum sudah tersedia (sumber air bersih, sistem pembuangan sampah, toilet, dan lain-lain). Sistem kontrol diperlukan untuk mendeteksi secara praktis mutu mikrobiologi makanan yang dijual. Jika pengujian menunjukkan mutu makanan yang jelek, pedagang yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari kegiatan berjualan atau kembali diberikan pelatihan khusus yang berkaitan dengan mutu mikrobiologi makanannya; tergantung dari jenis sanksi yang disepakati.
- d. Timbulnya masalah keamanan dan mutu gizi makanan jajanan tidak hanya semata disebabkan oleh produsen makanan jajanan tetapi juga karena pengaruh segmen lain yang terkait, antara lain distributor/pengecer BTM dan pihak Pemda yang terkait dengan industri makanan jajanan. Selain itu kesadaran konsumen akan keamanan makanan jajanan masih sangat kurang. Oleh karena itu, selain kepada para PMJ, penyuluhan keamanan makanan jajanan perlu pula ditujukan kepada konsumen dan distributor/pengecer BTM.
- e. Karena UMJ sebetulnya berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak, maka dalam upaya pembinaannya, diperlukan suatu forum yang beranggotakan wakil-wakil dari berbagai instansi dan dinas terkait di daerah yang bersangkutan misalnya Bangdes, Bagian Perekonomian Daerah, Bagian Kesra, PKK, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Bagian Tata Kota, dan lain-lain.

III. HASIL-HASIL INTERVENSI/PENYULUHAN

Pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan oleh Proyek Makanan Jajanan IPB terhadap PMJ telah memunculkan berbagai perubahan/perbaikan secara konkrit dalam berbagai hal, misalnya aspek keamanan dan kesehatan makanan jajanan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Selain itu kerjasama yang dilakukan oleh proyek dengan Pemda Kodya Bogor telah mampu menciptakan keterbukaan dan kepedulian Pemda terhadap UMJ.

1. Aspek Keamanan dan Kesehatan Makanan Jajanan

Setelah penyuluhan, praktek penanganan makanan yang dilakukan PMJ ternyata cenderung berubah menjadi lebih baik, seperti: menghindari kontak tangan dengan produk makanan, menggunakan peralatan yang baik dan bersih, menggunakan penutup makanan, menyediakan tempat sampah, memperhatikan kebersihan lingkungan berjualan, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang tidak berubah cenderung dihubungkan dengan keterbatasan modal untuk melengkapi persyaratan kebersihan, seperti: ketersediaan air bersih, dan sarana penjualan yang memadai.

Pada beberapa kelompok, upaya peningkatan keamanan makanan jajanan dilakukan selaras dengan upaya penumbuhan dinamika kelompok yang baik, sehingga mereka mampu mengelola dan memodali bersama pengadaan tempat pencucian peralatan yang permanen. Bantuan Pemda yang hanya cukup untuk membiayai sebagian anggota kelompok dicukupi oleh kelompok yang bersangkutan melalui berbagai upaya, seperti iuran kelompok dan arisan kelompok yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Pada kelompok lain pengadaan sarana pencucian ini justru dibiayai secara swadaya penuh dengan cara meminjam modal ke koperasi kelurahan yang kemudian dicicil secara berangsur-angsur melalui iuran harian dengan jumlah yang sama sekali tidak memberatkan. Beberapa aktivitas lain yang secara kombinasi memperlihatkan peningkatan kesadaran akan mutu makanan dan munculnya dinamika kelompok yang baik adalah pengadaan gerobak dorong dan pengadaan tong sampah.

Peningkatan mutu mikrobiologi makanan jajanan diukur dengan penurunan jumlah total mikroba (APC), bakteri entero (EPC), dan bakteri asam laktat (LABC). Tetapi setelah penyuluhan contoh makanan jajanan yang dianalisa hanya menunjukkan penurunan LABC, sedangkan APC dan EPC masih tetap tinggi. Walaupun hal ini tidak berpengaruh langsung pada resiko kesehatan, tetapi jelas diakibatkan oleh penanganan makanan yang masih kurang baik.

2. Aspek Ekonomi

Perbaikan pengetahuan dan penanganan makanan dalam memproduksi makanan jajanan, secara tidak langsung mempengaruhi pula pendapatan para pedagang yang telah dibina oleh proyek. Para pedagang makanan tersebut, setelah mengikuti pembinaan, memang mendapatkan keuntungan ganda. Selain wawasan pengetahuan yang bertambah luas, dagangan mereka menjadi lebih laris, meski harganya sedikit naik. Larisnya produk yang diusahakan, secara langsung berpengaruh pada efisiensi penggunaan waktu, karena sebelum penyuluhan mereka masih melakukan penjualan sampai dengan pukul 16.00, sementara setelah penyuluhan pukul 14.00 pun kadang-kadang produknya sudah habis¹. Pak Sukarma, ketua Kelompok PMJ Cidangiang (salah satu kelompok yang telah dibina), mengatakan bahwa pendapatan mereka sebelum penyuluhan sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah per hari. Tetapi sekarang mencapai 5.000 rupiah, bahkan kadang-kadang pada hari Sabtu-Minggu sampai sekitar 40.000 rupiah. Begitu pula tutur Pak Madro'i, ketua kelompok binaan yang lain (Jalan Selot), setiap harinya mereka mendapatkan keuntungan sekitar 5.000 rupiah².

Kenaikan harga makanan jajanan ternyata memang tidak menjadi masalah bagi konsumen yang kritis, berdasarkan temuan selama survai konsumen yang dilakukan oleh proyek pada tahun 1990 mengenai pertimbangan para konsumen (dalam hal ini ibu-ibu rumahtangga) dalam membeli makanan jajanan. Mereka umumnya (52,1%) membeli makanan jajanan karena kebersihan makanan tersebut (terlindung dari debu dan lalat), dan rasa makanan yang enak menempati urutan kedua (50,0%). Sedangkan faktor harga yang murah kurang menjadi pertimbangan mereka (17,2%).

Peningkatan pendapatan PMJ ini, selain bersumber dari pengakuan PMJ sendiri juga dapat dipantau dari aktifnya kegiatan arisan dan tabungan di beberapa kelompok. Kemampuan peserta untuk mengikuti arisan selain menunjukkan membaiknya pengelolaan keuangan juga menginformasikan meningkatkan kemampuan mereka dalam menyisihkan keuntungan.

3. Aspek Dinamika Kelompok

Secara umum, kelompok yang mengikuti penyuluhan telah mendapat manfaat yang besar dalam pengorganisasian anggota dan membentuk suatu kelembagaan kerjasama untuk memajukan usaha mereka. Setelah penyuluhan di kelas usai, kelompok-

-
- 1) Surat Kabar Kompas, Minggu 9 Mei 1993
 - 2) Majalah Amanah No. 182, 28 Juni 1993

kelompok yang mengikuti penyuluhan pada Program Implementasi Percontohan (PIP) mengadakan pertemuan dengan semua anggota untuk merundingkan kelanjutan keberadaan kelompok, dimana pada saat penyuluhan mereka sudah termotivasi untuk berke-lompok dan sudah memiliki kedekatan hubungan dengan sesama anggota.

Pada pertemuan itu dihasilkan beberapa kesepakatan, yaitu: a). pendirian kelompok secara resmi, b). pembentukan pengurus kelompok, dan c). penyusunan program kerja kelompok yang menyangkut aspek kesehatan makanan (pengadaan tempat sampah, upaya pengadaan air bersih, gotong royong untuk kebersihan lingkungan, dan lain-lain) dan aspek sosial ekonomi, seperti: arisan, simpan pinjam kelompok, iuran kesejahteraan anggota, dan lain-lain.

Monitoring yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar program yang disusun bersama oleh anggota kelompok mampu dilaksanakan dengan baik. Pertemuan bulanan kelompok, arisan, simpan pinjam, gotong royong, penataan/perbaikan lingkungan berjualan agar lebih sehat telah dilaksanakan di tiap-tiap kelompok binaan, bahkan kebanyakan kelompok tersebut sudah mampu menabung lebih dari satu juta rupiah.

4. Keterbukaan dan Kepedulian Pemda pada UMJ

Sektor informal, khususnya usaha kaki lima/UMJ, seringkali dianggap sebagai kegiatan yang mengganggu ketertiban jalan, mengotori jalan, dan berhubungan dengan ketidaktertiban. Sehingga usaha Pemda dalam menangani UMJ ini lebih bersifat meniadakan atau menghindarinya. Anggapan demikian cenderung melupakan kontribusi UMJ pada berbagai hal positif, antara lain: kontribusi yang besar terhadap pemenuhan gizi masyarakat, sumber diversifikasi pangan keluarga, penyumbang dana pembangunan daerah melalui penarikan biaya retribusi, penyerap tenaga kerja, penggerak pembangunan pedesaan melalui kiriman uang ke desa (bagi PMJ migran), maupun sumber nafkah bagi ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari berusaha makanan jajanan.

Selain kesadaran para pedagang makanan jajanan akan kebersihan dan keamanan makanan, keberhasilan kelompok PMJ juga ditentukan oleh lokasi berjualan yang strategis. Selain itu, satu hal yang tak dapat dilupakan adalah perhatian pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas, seperti: lokasi yang legal, persediaan sarana air bersih, tempat sampah yang selalu dikontrol petugas Dinas Kebersihan, dan tempat jualan yang teratur. Begitu pula dengan pemberian dana pinjaman untuk memperbaiki tempat mereka berjualan.

Bagi Proyek Makanan Jajanan IPB, untuk mengatasi masalah tersebut yang utama bukanlah usaha pelegalisasian UMJ, melainkan **pengakuan** terhadap potensi sosial ekonomi dan aspek-aspek kultural dari UMJ tersebut dapat diusahakan semaksimal mungkin. Apabila aspek-aspek positif tersebut telah dapat diyakinkan, maka usaha pelegalisasian menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan.

Kerjasama antara Proyek Makanan Jajanan IPB dengan Pemda Kodya Bogor, melalui Program Implementasi Percontohan ternyata telah mampu menciptakan iklim keterbukaan, dimana Pemda menyadari akan berbagai potensi UMJ yang seharusnya dikembangkan dan diperhatikan dengan porsi yang layak. Meskipun berbagai kekhawatiran masih tetap muncul, terutama yang berkaitan dengan urbanisasi melalui penambahan PMJ migran, sehingga nantinya akan menambah masalah-masalah perkotaan, seperti: tata kota, lalu lintas, atau lingkungan, namun demikian bila dilihat dari aktivitas rutin selama kerjasama berlangsung, para Satgas dan Inisiator berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan pembinaan di lapang. Sikap positif mereka juga tercermin dari upayanya memperjuangkan agar program pembinaan PMJ dapat terus berlanjut dan diserbarluaskan, baik melalui penyediaan anggaran pembinaan dalam APBD maupun menjadikannya sebagai program rutin di masing-masing instansi/dinas di lingkungan Pemda Kodya Bogor.

IV. DAMPAK PERBAIKAN MUTU MAKANAN JAJANAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKUNYA

Penyuluhan terhadap PMJ seperti yang dilakukan di Kodya Bogor melalui Program Percontohan dan Program Implementasi Percontohan, telah memberikan indikasi yang cukup menggembarakan, dimana selain terjadinya peningkatan pengetahuan PMJ dalam pengelolaan usaha, mereka juga mulai mampu menerapkan materi-materi penyuluhan yang mengarah pada upaya penanganan makanan yang lebih bersih dan sehat. Sehubungan dengan kecenderungan semakin meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk makanan jajanan dari tahun ke tahun, penyediaan makanan jajanan yang lebih sehat akan semakin penting dan semakin dibutuhkan terutama di perkotaan.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS, 1989) menunjukkan bahwa persentase pengeluaran untuk makanan jajanan penduduk perkotaan di Indonesia rata-rata per kapita per bulan meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 5.5% pada tahun 1981 menjadi 9.8 % pada tahun 1984 dan 10.6 % pada tahun 1987. Dari Survei Konsumsi Rumah tangga di Bogor yang dila-

kukan oleh Chapman (1984), diperoleh gambaran bahwa rata-rata 25 % dari anggaran makanan rumah tangga digunakan untuk membeli makanan jajanan. Angka ini meningkat lagi menjadi 30% pada tahun 1990 (Streetfood Project, 1992b).

Semakin meningkatnya kebutuhan akan makanan jajanan juga selaras dengan semakin tergantungnya pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat pada makanan jajanan. Dengan kata lain, makanan jajanan akan semakin mempunyai andil dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; produktivitas kerja bagi orang dewasa (kontribusi makanan jajanan terhadap nilai gizi energi, protein, dan zat besi pada orang dewasa berturut-turut 30%, 26%, 44%), serta pertumbuhan tubuh dan kecerdasan bagi anak-anak (kontribusi makanan jajanan terhadap nilai gizi energi, protein, dan zat besi pada bayi berturut-turut 36%, 50%, 59%). Survey yang dilakukan khusus terhadap mahasiswa IPB menunjukkan bahwa makanan jajanan rata-rata menyumbang 78% energi, 82% protein, dan 79% zat besi. Sehingga secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa makanan jajanan akan mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Selain fenomena kesehatan, peningkatan mutu makanan jajanan juga akan berdampak pada PMJ sendiri. Dalam jangka panjang, peningkatan mutu makanan jajanan berarti peningkatan status ekonomi pelakunya karena produk bermutu akan dihargai lebih tinggi secara ekonomis, sehingga income dan skala usaha PMJ akan dapat meningkat pula. Pada gilirannya, peningkatan skala usaha akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja baru, terutama bagi yang tidak tertampung pada sektor-sektor formal.

Kiriman para pengusaha makanan jajanan urban ke desa yang mencapai 0.72 milyar rupiah/tahun dapat menciptakan mekanisme tersendiri untuk memacu roda perekonomian di pedesaan. Kiriman uang tersebut akan mempengaruhi perputaran uang pedesaan dan membantu menggerakkan pembangunan pedesaan. Dengan demikian sektor usaha makanan jajanan mempunyai peranan penting dalam memperkuat dana pedesaan bagi pembentukan modal.

PENUTUP

Memperhatikan paparan potensi dan masalah pada usaha makanan jajanan serta upaya pembinaan yang dilakukan oleh Proyek Makanan Jajanan IPB yang mempunyai tiga tujuan; (1) meningkatkan kualitas dan keamanan makanan jajanan (2) memperkuat posisi sosial ekonomi pengusaha kecil (3) merumuskan kebijaksanaan sebagai rekomendasi untuk pengembangan program, adalah sangat berkaitan dengan program nasional tentang upaya mengatasi kemiskinan.

Pembinaan PMJ merupakan upaya memerangi kemiskinan pengetahuan, sikap dan persepsi tentang manajemen usaha skala kecil dan kualitas makanan. Peningkatan pengetahuan sebagai hasil pembinaan merupakan dasar untuk melakukan praktek penanganan makanan yang lebih sehat dan manajemen usaha yang lebih baik sehingga akan memunculkan nilai ekonomis usaha yang lebih menguntungkan. Pada saat skala usaha diperbesar atau dengan semakin meningkatnya permintaan pasar akibat semakin dipercayanya keamanan makanan jajanan oleh konsumen, maka peluang kerja semakin terbuka pada sektor ini. Dengan demikian sektor ini dapat pula dipandang sebagai katup pengaman ekonomi untuk mengurangi pengangguran tenaga kerja.

Dengan kualitas yang terjamin baik dari keamanan pangan maupun nilai gizinya makanan jajanan akan memasok lebih banyak kebutuhan gizi masyarakat. Kecukupan gizi sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan pertumbuhan anak sehingga dengan dikonsumsi makanan jajanan oleh berbagai lapisan masyarakat, makanan jajanan berperan dalam meningkatkan sumberdaya manusia.

Melalui kiriman uang yang cukup besar ke perdesaan usaha makanan jajanan ikut menghidupkan perekonomian desa. Kiriman yang dipergunakan secara produktif di perdesaan juga turut menciptakan kegiatan ekonomi perdesaan dengan penyerapan tenaga kerja setempat.

Mengingat strategisnya potensi UMJ dalam upaya pengentasan kemiskinan, maka berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan UMJ melalui pembinaan pedagang, konsumen, berbagai industri yang terkait dengan UMJ, dan keterlibatan Pemda perlu terus dilanjutkan dan dilembagakan. Dalam jangka panjang, pembinaan PMJ akan diarahkan pada pembentukan pusat-pusat jajan di setiap daerah. Kerjasama yang baik antar berbagai instansi yang diwakili oleh Satgas dan Inisiator masing-masing daerah terutama dinas tata kota akan mampu menghasilkan rancangan pusat jajan di setiap daerah dengan dilengkapi berbagai fasilitas yang dibutuhkan produsen dan konsumen antara lain; jajanan tempat berjualan/kioskios dengan model khas Indonesia, sumber air bersih yang dikelola kelompok PMJ, tempat pencucian peralatan berjualan, tempat sampah dan saluran pembuangan limbah, aliran listrik, toilet, telepon umum, musholla, tempat parkir, satu warung stationary, dan taman. Setiap kios akan dilengkapi dengan daftar pengontrolan mutu mikrobiologi makanan yang dijual. Satu kali sebulan petugas Pemda akan datang melakukan pengujian mutu mikrobiologi makanan para pedagang di pusat jajan tersebut.

SUSUNAN TIM

1. Dr.Ir. Aida Vitayala S. Hubeis
2. Ir. Suprihatin Guhardja, MS
3. Dr.Ir. Srikandi Fardiaz
4. Dr. Ir. Dedi Fardiaz
5. Ir. Mintarti
6. Ir. Yannefri
7. Ir. Andi Sularto

Lampiran. **HASIL-HASIL PENELITIAN PROYEK MAKANAN JAJANAN
TAHAP I (TAHUN 1988-1990)**

Kegiatan-kegiatan proyek makanan jajanan tahap pertama diprioritaskan pada penelitian dasar tentang beragam aspek makanan jajan. Ringkasan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

(1) Makanan Jajanan di Jawa Barat:

Suatu survai dasar (WR No.1)

Survai bertujuan untuk menginventarisasi berbagai jenis dan usaha makanan jajanan (UMJ) di perkotaan, yaitu: Bogor, Rangkasbitung, Jakarta, Rengasdengklok, dan 10 desa di Jawa Barat. Hasil survai antara lain:

1. Peralatan, fasilitas pelayanan dan jumlah tenaga kerja setiap tipe berjualan (berkeliling, berpangkal di pemukiman, dan berpangkal di keramaian) sangat bervariasi;
2. Fluktuasi yang tinggi terlihat dalam pola penjualan harian dari pedagang makanan jajanan (PMJ) berkeliling, sedangkan pola penjualan dari PMJ berpangkal lebih stabil;
3. Pedagang, terutama yang berkeliling di perkotaan sebagian besar adalah migran (90%);
4. Peranan/partisipasi perempuan dalam usaha makanan jajanan sangat berbeda diantara ketiga sub-populasi, yaitu terendah pada UMJ berkeliling dan tertinggi pada UMJ berpangkal di pemukiman/perkampungan.

(2) Mutu dan Keamanan Makanan Jajanan di Jawa Barat: Suatu survai pengkajian (WR No.2)

Survai bertujuan untuk melakukan pendugaan mutu mikrobiologi dan kimia makanan jajanan yang dijual di beberapa kota dan desa di Jawa Barat, yaitu di Sukabumi dan Rangkasbitung. Beberapa informasi penting dari survai ini antara lain:

a. Mutu Kimia Makanan Jajanan

1. Nilai gizi makanan jajanan sangat bervariasi. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa kebutuhan energi harian seperti rekomendasi WHO/FAO dapat dipenuhi dengan mengonsumsi makanan jajanan seharga Rp. 1.750,00 - Rp.2.000,00;
2. Beberapa jenis makanan terutama yang bahan dasarnya kacang tanah dan kedelai, merupakan sumber protein dan lemak yang baik, Jika makanan tersebut dikonsumsi secara kombinasi dengan makanan lain, efek saling melengkapi akan meningkatkan nilai gizi;
3. Zat pewarna terlarang *Rhodamin B* dan *Kuning Metanil* digunakan oleh pengusaha makanan jajanan. Penggunaan zat pewarna terlarang dapat dikurangi dengan cara menyediakan

lebih banyak pilihan zat pewarna yang diperbolehkan, atau mengurangi jumlah zat pewarna terlarang;

4. Hampir seluruh minuman yang diperiksa mengandung siklamat;
5. Sekitar 17 persen makanan jajanan yang mengandung kacang tanah terkontaminasi oleh *aflatoksin*. Beberapa contoh mengandung *aflatoksin* di atas 30 ppb, yaitu batas keamanan yang ditentukan WHO/FAO/UNICEF; dan
6. Residu pestisida terdeteksi pada beberapa contoh makanan jajanan, terutama pada produk yang bahan dasarnya sayuran.

b. Mutu Mikrobiologi Makanan Jajanan

1. Mutu mikrobiologi minuman yang dijual dipengaruhi oleh cara berjualan dan kondisi sosial ekonomi lokasi pengambilan contoh. Minuman yang dijual oleh PMJ berpangkal mutu mikrobiologinya lebih baik daripada yang dijual oleh PMJ berkeliling. Minuman yang dijual pada lokasi yang keadaan sosial ekonominya baik akan lebih baik mutu mikrobiologinya daripada yang dijual pada pemukiman yang kumuh dan kotor. Minuman yang mempunyai resiko kontaminasi mikrobiologi tinggi adalah es campur, es cendol, es cincau, es kelapa dan es puter;
2. Makanan kecil yang mengandung air seperti asinan dan rujak mempunyai resiko kontaminasi mikrobiologi tinggi, termasuk kontaminasi bakteri patogen. Makanan kecil yang digoreng atau dipanggang lebih aman untuk dikonsumsi dalam waktu beberapa jam sesudah dimasak; dan
3. Mutu mikrobiologi makanan lengkap yang dijual oleh pedagang sangat dipengaruhi oleh jenis makanan. Makanan yang disiapkan dalam keadaan panas, seperti mi ayam, mi baso, dan soto mi dapat dikatakan aman untuk dikonsumsi, sementara makanan yang tidak dipanaskan seperti gado-gado, karedok, ketoprak, pecel, ketupat tahu, nasi rames dan nasi uduk mempunyai resiko kontaminasi mikrobiologi yang tinggi, termasuk bakteri patogen.

(3) Konsumsi Makanan Jajanan: Studi pada mahasiswa di Bogor (WR No.3)

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi aspek positif, yaitu nilai gizi makanan yang dikonsumsi mahasiswa IPB, dan aspek negatif yaitu penggunaan bahan tambahan dan tingkat kontaminasi pada makanan. Dari penelitian ini diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Menu makanan mahasiswa IPB Bogor sangat bervariasi. Tingkat konsumsi energi masih kurang dari konsumsi yang dianjurkan, sedangkan tingkat konsumsi protein lebih tinggi dari yang dianjurkan. Konsumsi zat besi (Fe) pada mahasiswa pria cukup tinggi, sedangkan pada mahasiswa wanita masih rendah.

2. Konsumsi timbal (Pb) dan *mercury* (Hg) masih jauh dari ambang batas keamanan konsumsi yang ditetapkan oleh FAO/WHO dalam makanan sehari-hari;
3. Bahan tambahan makanan seperti pewarna dan pemanis buatan sudah umum terdapat dalam minuman dan makanan ringan. Pewarna yang tidak diperkenankan ditemukan dalam makanan jajanan yang dikonsumsi oleh mahasiswa; dan
4. Pestisida yang berbahaya seperti *aldrin* dan *dieldrin* terdapat pada beberapa makanan jajanan yang dikonsumsi. Untuk mengetahui seberapa jauh konsentrasi zat tersebut berpengaruh pada kesehatan konsumen, perlu diadakan penelitian lebih lanjut.

(4) Usaha Makanan Jajanan: Studi kasus produsen dan pedagang di Bogor, Jawa Barat (WR No.4)

Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi PMJ dan cara-cara penanganan makanan jajanan yang mengacu pada kemungkinan kontaminasi kimia dan mikrobiologi dan penggunaan bahan tambahan. Hasil penelitian ini meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Struktur; UMJ yang merupakan bagian dari sektor informal, bukan suatu bentuk kesatuan sosial atau ekonomi atau sistem perdagangan yang berdiri sendiri, namun terdiri dari inti-inti kecil dengan ikatan desa. Sub-sektor ini tidak mempunyai mekanisme pengaturan atau lembaga-lembaga pusat yang mengatur perkembangannya atau mendorongnya ke arah perubahan-perubahan yang baru.
2. Pengelompokan; UMJ dapat dikelompokkan menurut cara operasi, yaitu: a) pedagang berpangkal di pusat-pusat keramaian pada lokasi yang strategis, b) pedagang yang tersebar di daerah pemukiman, dimana tempat kerja merangkap tempat tinggal, dan c) pedagang berkeliling yang menjajakan makanannya secara berkeliling. Berdasarkan besar kecilnya usaha, usaha makanan jajanan dibedakan menjadi: a) usaha perorangan, b) usaha rumah tangga yang mempekerjakan sampai 4 orang tenaga kerja, dan c) usaha yang mempekerjakan 5 orang tenaga kerja atau lebih;
3. Mobilitas; umumnya PMJ adalah migran/pendatang yang sebagian sudah menetap di kota, sedangkan sebagian besar lagi cenderung hilir mudik antara kota dan desa; dan
4. Kelembagaan; pada kenyataannya, sub-sektor yang tergolong lemah ini kerjasama dan koperasi sulit untuk dilaksanakan.

(5) Produksi dan Distribusi Makanan Jajanan: Survei sosial-ekonomi di Bogor, Jawa Barat (WR No.5)

Survei ini bertujuan untuk mengkaji aksesibilitas dan tingkat penerimaan PMJ dalam rangka penyebarluasan program intervensi yang dikembangkan proyek; dan melengkapi secara kuantitatif studi terdahulu. Berdasarkan hal ini, direko-

mendasarkan kebijakan sosial-ekonomi pembinaan UMJ. Hasil survai antara lain sebagai berikut:

1. Umur rata-rata PMJ sekitar 40 tahun, perempuan 42,5 dan laki-laki 39,2 tahun. Laki-laki 90 % menikah sedangkan perempuan 70 %, sebagai akibat proporsi PMJ perempuan janda dan cerai yang relatif lebih tinggi (25,9 %) dibandingkan dengan laki-laki (1,7 %);
2. Jumlah PMJ perempuan di Bogor melampaui jumlah PMJ laki-laki. Pengusaha laki-laki lebih banyak dalam kategori berpangkal di keramaian (68 %) dan berkeliling (72 %), sedangkan perempuan mendominasi kategori berpangkal di pemukiman (77 %);
3. Pengusaha laki-laki berpendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan;
4. Usaha makanan jajanan kebanyakan (62 %) dimulai dengan sarana sendiri, dan sebagian kecil (9 %) yang menggunakan jasa bank atau koperasi;
5. Omzet harian kotor rata-rata Rp.23.375,00. UMJ di tempat strategis tertinggi omzetnya Rp.43.800,00, diikuti berkeliling Rp.21.900,00, dan di pemukiman Rp.17.135,00. Sedangkan omzet tahunan kotor rata-rata Kotamadya bogor diperkirakan mencapai 48,84 miliar rupiah;
6. Pengusaha-pengusaha migran keseluruhan di Bogor mengirimkan ke desa asalnya tiap tahun sebesar 722 juta rupiah; dan
7. Berdasarkan sistem bea yang diusulkan, diperkirakan retribusi dari usaha makanan jajanan ke Pemerintah Daerah dapat mencapai 300 juta rupiah.

(6) Peranan Makanan Jajanan Dalam Konsumsi Pangan Rumah Tangga: Suatu survai di Bogor (WR No.6)

Survai bertujuan: (1) melihat peranan makanan jajanan dalam menu makanan rumah tangga di perkotaan dan menu makanan anak usia sekolah dan anggota rumah tangga golongan rawan, (2) mengembangkan materi penyuluhan untuk membantu konsumen memperbaiki hygiene dan kebutuhan zat gizi mereka, melalui makanan jajanan yang tepat. Hasil survai ini antara lain adalah:

1. Kecukupan protein dan zat besi per orang per hari yang berasal dari data kecukupan zat gizi rumah tangga pada umumnya lebih besar dari 80 % tingkat kecukupan yang dianjurkan (RDA). Sedangkan kecukupan energi, protein, vitamin A dan C sangat rendah. Dari data kecukupan zat gizi individu, kecukupan zat gizi untuk wanita dewasa relatif rendah.
2. Konsumsi makanan jajanan di antara penduduk perkotaan sangat bervariasi. Sumbangan makanan jajanan sangat besar terhadap kecukupan energi, protein, zat besi tetapi rendah sekali sumbangannya terhadap kecukupan vitamin A dan C. Lebih dari 30 % pengeluaran pangan digunakan untuk membeli makanan jajanan. Walaupun rasa dan derajat

higiene memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan oleh para ibu rumah tangga dalam membeli makanan jajanan, namun pengetahuan ibu rumah tangga mengenai pewarna yang berbahaya dan hygiene masih menjadi pertanyaan. Beberapa jenis makanan jajanan yang populer di antara anak-anak menyebabkan para ibu terpaksa mengabaikan kriteria hygiene yang sebenarnya telah mereka ketahui.

3. Pos pelayanan terpadu (Posyandu), organisasi wanita, radio dan televisi merupakan media yang penting untuk menyebarkan informasi tentang gizi dan kesehatan. Ibu dan anak-anak biasanya mengunjungi Posyandu antara pukul 09.00 sampai pukul 12.00; waktu untuk mendengarkan radio sebelum pukul 06.00; dan menonton televisi biasanya setelah pukul 19.00. Penyuluhan tentang hygiene makanan melalui media massa, atau media pendidikan lainnya dapat dikembangkan untuk para konsumen makanan jajanan. Begitu pula untuk para pedagang dan produsennya.

PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik. 1989. Indikator Kesejahteraan Rakyat. BPS. Jakarta.
- Chapman, B. 1984. Makanan Jadi Indonesia: Peranan Pedagang Kecil Dalam Suplai Makanan Masyarakat Kota. EPOC. Washington.
- Djojohadikusumo, S. 1980. Indonesia dalam Pengembangan Dunia: Kini dan Masa Depan. LP3ES. Jakarta.
- Proyek Makanan Jajanan IPB. 1993a. Intervensi Produk Khusus Usaha Makanan Jajanan: Laporan Program Percontohan di Kodya Bogor, Laporan Kerja No. 9. Proyek Makanan Jajanan IPB. Bogor.
- Proyek Makanan Jajanan IPB. 1993b. Intervensi Usaha Makanan Jajanan: Laporan Program Implementasi Percontohan di Kodya Bogor, Laporan Kerja No. 10. Proyek Makanan Jajanan IPB. Bogor.
- Proyek Makanan Jajanan IPB. 1993c. Laporan Akhir: 1 April 1988 - 30 Juni 1993. Proyek Makanan Jajanan IPB. Bogor. (draft)
- Sajogyo. 1977. Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB. Bogor.

- Srinivasan, T.N. 1977. Development, Poverty, and Basic Human Needs : Some Issues. World Bank Reprinted Series No. 76. Reprinted from Food Research Institute Studies. New Delhi. Vol. XVI, No. 2. pp. 11-28.
- Streetfood Project. 1989. Streetfoods in West Java: A Base line Survey, Working Report No. 1. BPPT-DGIS, TNO-IPB-VU. Bogor.
- Streetfood Project. 1990a. Quality and Safety of Streetfoods in West Java: An Assessment Survey, Working Report No. 2. BPPT-DGIS, TNO-IPB-VU. Bogor.
- Streetfood Project. 1990b. Consumption of Streetfoods: Total Diet Studies Among student in Bogor, Working Report No. 3. BPPT-DGIS, TNO-IPB-VU. Bogor.
- Streetfood Project. 1990c. Streetfood Enterprises: Case Studies of Producers and Vendors in Bogor, West Java, Working Report No. 4. BPPT-DGIS, TNO-IPB-VU. Bogor.
- Streetfood Project. 1992a. Production and Distribution of Streetfoods: A Socio-economic Survey in Bogor, West Java, Working Report No. 5. BPPT-DGIS, TNO-IPB-VU. Bogor.
- Streetfood Project. 1992b. The Role of Streetfoods in Household Food Consumption: A Survey in Bogor, Working Report No. 6. BPPT-DGIS, TNO-IPB-VU. Bogor.
- Streetfood Project. 1992c. General Extension for Streetfood Producers and Vendors: Report of a pilot programme tried out in Bogor, West Java, Working Report No. 7. BPPT-DGIS, TNO-IPB-VU. Bogor.
- Streetfood Project. 1992d. Food Safety Studies Vol.I: Selected Product, Working Report No. 8. BPPT-DGIS, TNO-IPB-VU. Bogor.
- Streetfood Project. 1992e. Food Safety Studies Vol.II: Additional Safety Items, Working Report No. 8. BPPT-DGIS, TNO-IPB-VU. Bogor.
- Tim Peneliti PSP, LP-IPB. 1991. Masalah Kemiskinan dan Pemba- ngunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur : Pelajaran dari Empat Kabupaten Kasus. Pusat Studi Pembangunan, LP-IPB. Bogor.



**UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
MELALUI KULIAH KERJA NYATA (KKN)¹⁾**

oleh
Surdiding Ruhendi²⁾
Oteng Haridjaja³⁾

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata atau KKN sudah menjadi program nasional yang pelaksanaannya dibina oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti melalui petunjuk pelaksanaan KKN di perguruan tinggi (tahun 1992).

IPB senantiasa melaksanakan program KKN setiap tahunnya sejak dicanangkannya pada tahun 1975. Dalam pengalaman penyelenggaraan KKN selama ini sangat dirasakan eratnya relevansi antara program/kegiatan KKN ini dengan upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan kebijaksanaan pelaksanaan antara lain yang menyangkut lokasi, khalayak sasaran, tema serta jenis program kegiatan.

KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN KKN IPB

IPB di dalam melaksanakan KKN selalu ditujukan kepada pengentasan kemiskinan melalui kebijaksanaan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Khalayak Sasaran

Sebagai khalayak sasaran dari program KKN IPB adalah masyarakat desa atau kelurahan yang termasuk relatif miskin, pendidikan rendah dan terbelakang dalam wilayah suatu kecamatan. Daerah kerja KKN selama ini diprioritaskan kabupaten kerjasama yaitu : Kab. Bogor, Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Karawang dan Banjarnegara serta DKI Jakarta. Penetapan lokasi KKN dilakukan bersama-sama oleh Panitia Pelaksana KKN IPB dan Pemda (Bappeda dan Camat).

-
- 1) Disampaikan pada Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan LPM IPB, Bogor Juli 1993.
 - 2) Kepala Pusat P₂KKN LPM IPB
 - 3) Sekretaris Pusat P₂KKN LPM IPB

2. Tema

Sejak tahun 1988 IPB telah menetapkan tema KKN yang intinya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (petani) melalui pembangunan pertanian.

3. Program/Kegiatan

Sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh IPB, program/kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama mahasiswa KKN adalah program/kegiatan bidang pertanian (pertanian, kesehatan hewan, peternakan, perikanan, kehutanan dan teknologi pasca panen) yang meliputi aspek-aspek teknis, ekonomi dan manajemen. Pendekatan multi disiplin diisi dengan menempatkan beberapa mahasiswa dari berbagai jurusan di suatu desa.

4. Status Akademik

KKN adalah mata kuliah intrakurikuler dengan bobot 4 SKS, diikuti oleh mahasiswa IPB yang telah menyelesaikan semester VI atau telah mengumpulkan minimum 110 SKS. Dengan status akademis seperti ini, setiap tahun IPB menurunkan lebih kurang 2000 mahasiswa ke lokasi KKN. Mahasiswa peserta KKN siap mengamalkan ilmu terapan pertanian yang telah mereka peroleh, selain pengetahuan/keterampilan yang diterima dalam pelatihan pembekalan.

5. Pasca KKN

Program pasca KKN ditujukan untuk menindaklanjuti program/kegiatan KKN yang tahapannya memerlukan pelaksanaan, pengembangan, pelanjutan atau pemantauan.

Pelaksanaan program pasca KKN adalah salah satu atau lebih kerjasama dari berbagai unsur yaitu masyarakat, dinas terkait, dosen, himpunan mahasiswa profesi atau mahasiswa KKN tahun berikutnya. Koordinasi pelaksanaan program pasca KKN dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelayanan kepada Masyarakat.

6. Kerjasama

Dalam pelaksanaan KKN IPB senantiasa menjalin kerjasama dengan instansi atau kelembagaan yang misi utamanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu : BKKBN, Departemen Kesehatan, Departemen Koperasi dan Departemen Pertanian (khususnya dengan Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil, P4K)

PROGRAM KEGIATAN UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN IPB sejalan dan selaras dengan program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan masyarakat desa, Mahasiswa KKN sebagai pengemban tridharma perguruan tinggi mencoba membantu masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan di desanya, sehingga diharapkan program-program yang dilaksanakan memberikan efektifitas yang tinggi dan berdampak positif dalam peningkatan kehidupan masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang ada maka program yang dilaksanakan dapat digolongkan pada: 1) Bidang pertanian, 2) Bidang peternakan, 3) Bidang perikanan, 4) Bidang kelembagaan dan 5) Bidang lingkungan.

1. Bidang Pertanian

Program-program yang dilaksanakan dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada petani mengenai pengelolaan usaha taninya khusus bidang pertanian dan mencoba mengatasi masalah-masalah yang dihadapi petani dalam melakukan usaha tani sehingga diharapkan petani akan mampu secara mandiri dalam mengelola usaha taninya secara efisien. Program yang dilaksanakan terdiri dari : a) Penyuluhan dan 2) Plot percontohan.

a). Penyuluhan

Penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada petani mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan kegiatan pertanian, yang selanjutnya diharapkan petani akan mempraktekannya dalam kegiatan sehari-hari. Informasi yang diberikan meliputi :

- Teknik budidaya tanaman pertanian yang meliputi teknik budidaya tanaman padi sawah, tanaman palawija seperti tanaman jagung, kedelai dan kacang tanah serta tanaman sayuran;
- Cara menanam tandur jajar untuk tanaman padi dan menanam searah kontur untuk tanaman pangan lahan kering;
- Cara, waktu dan dosis pemupukan yang tepat;
- Penanganan panen dengan gebot bertirai atau dengan alat perontok padi;
- Penanganan pasca panen;
- Teknologi sepuluh jurus supra insus pada tanaman padi;
- Teknik budidaya tumpang gilir dan tumpang sari;
- Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai tanaman gizi keluarga;
- Tataniaga komoditas pertanian dan peranan KUD dalam pemasaran hasil-hasil pertanian;

b). Plot Percontohan

Plot percontohan dimaksudkan untuk meyakinkan para petani terhadap suatu paket teknologi yang diperkenalkan, dengan harapan petani akan melakukannya sendiri dalam usaha taninya. Demplot yang dilakukan di masing-masing desa berbeda tergantung kepada masalah utama yang ditemukan di desa tersebut. Plot percontohan yang dilaksanakan meliputi:

- Pemanfaatan lahan pekarangan;
- Pembuatan kompos;
- Pola pertanian lahan kering dan teknik bangunan konservasi
- Pengapuran;
- Budidaya tumpang sari;
- Budidaya jamur merang;
- Pembuatan alat perontok padi;
- Pengolahan hasil pertanian berupa pembuatan kue.

2. Peternakan

Program yang dilaksanakan dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada petani mengenai cara-cara beternak yang baik dan membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi petani dalam usaha ternaknya. Program yang dilakukan terutama dititikberatkan kepada masalah-masalah ternak yang banyak dipelihara petani. Program tersebut terdiri dari :

a). Penyuluhan

- Informasi yang diberikan meliputi :
- Teknik beternak yang baik, meliputi ayam buras, kelinci, kambing dan domba, kerbau dan sapi;
 - Sistim perkandangan yang baik;
 - Sistim peternakan Longyam (balong ayam);
 - Pencegahan dan Vaksinasi Tetelo (New Castle Disease) pada ayam buras;
 - Penganalan hijauan makanan ternak yang bergizi tinggi;
 - Silase jerami padi sebagai makanan ternak dalam pemanfaatan hijauan pertanian.

b). Plot Percontohan

Plot percontohan hanya dilakukan untuk beberapa jenis ternak dan dilaksanakan di beberapa desa. Hal tersebut berkaitan erat dengan ketersediaan dana, sarana dan prasarana. Plot percontohan yang dilakukan diantaranya :

- Vaksinasi ND (New Castle Disease);
- Perkandangan ayam buras dengan sistim longyam;
- Sistim beternak kelinci;
- Hijauan makanan ternak dan silase jerami padi.

3. Bidang Perikanan

Secara potensial desa-desa KKN IPB yang termasuk kedalam lahan basah mempunyai prospek yang cerah dalam bidang perikanan darat. Program yang dilaksanakan dimaksudkan untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil-hasil perikannya. Program-program yang dilaksanakan sebagian besar merupakan penyuluhan-penyuluhan.

Informasi yang diberikan meliputi :

- Teknik bertanam ikan (perikanan darat) meliputi persiapan dalam : Penomoran, waktu dan jumlah pemberian pakan, cara pemeliharaan dan cara pemanenan;
- Mina padi dan longyam;
- Tataniaga hasil-hasil perikanan.

4. Bidang Kelembagaan

Program yang dilaksanakan dimaksudkan untuk membantu masyarakat desa dalam mengatasi masalah-masalah kelembagaan yang masih vakum dan belum membudaya di masyarakat. Program yang dilaksanakan berupa penyuluhan-penyuluhan diantaranya:

- Meningkatkan kesadaran petani untuk menjadi anggota Koperasi Unit Desa dengan memahami fungsi dan peranannya dalam perekonomian masyarakat desa;
- Merintis pendirian KUD dengan mendirikan kegiatan usaha bersama (KUB);
- Mengaktifkan kegiatan PPL dengan diikutsertakannya dalam kegiatan penyuluhan;
- Pengaktifkan Karang Taruna.

5. Bidang Lingkungan

Program yang dilaksanakan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran petani akan kelestarian lingkungan, sehingga kegiatan pertaniannya dapat dilakukan secara berkesinambungan (sustainable farming). Program yang dilaksanakan terdiri dari : a). Penyuluhan dan b). Plot percontohan.

a). Penyuluhan

Informasi yang diberikan meliputi :

- Sanitasi lingkungan ;
- Air bersih;
- Jamban keluarga
- Manfaat dan fungsi hutan dalam kelestarian lingkungan;
- Teknik konservasi tanah dan air dalam pelestarian sumber daya lahan.

b). Plot Percontohan

Plot percontohan yang dilakukan meliputi :

- Pengelolaan air bersih;
- Tungku hemat energi;
- Kompor sekam dan serbuk gergaji.

HASIL DAN PEMBAHASAHAN

1. Hasil

Dampak penting pelaksanaan KKN oleh mahasiswa KKN IPB merupakan suatu proses yang akan berjalan dalam kehidupan masyarakat desa (petani) dalam menyongsong pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat desa.

Hasil langsung dari pelaksanaan KKN adalah adanya peningkatan pengetahuan para petani (masyarakat) khususnya dalam bidang pertanian, sehingga para petani akan dapat mengelola usaha taninya dengan baik. Tingkat keberhasilan program KKN dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang ber KKN.

Program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN menunjukkan hasil cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh:

a). Partisipasi petani dalam melaksanakan program KKN, b). Minat para petani untuk melakukan sendiri program tersebut dalam usaha tani, c) Peningkatan pengetahuan para petani dan membuka wawasan yang lebih luas; d) Tingkat keberhasilan plot percontohan yang dilakukan; e) Perubahan sikap dan pola pikir petani dalam mengelola usaha tani; dan f) Keterbukaan petani akan introduksi suatu teknologi yang datang dari luar lingkungan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program

Program-program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN IPB, tidak semuanya berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut berkaitan erat dengan mahasiswa KKN sendiri sebagai subjek/pelaksana KKN dan pengemban tri dharma perguruan tinggi, partisipasi masyarakat sebagai objek KKN, keterlibatan instansi terkait serta saran dan prasarana yang ada.

Faktor-faktor pendukung yang dapat mendorong keberhasilan program KKN IPB :

- a. IPB :
- SK Rektor IPB No. 141/Um/1990 tentang status intrakurikuler wajib melaksanakan KKN IPB
 - Bidang garapan IPB (pertanian) sangat dekat dengan potensi dan perikehidupan masyarakat desa

- Kum pengabdian sebagai syarat kenaikan pangkat/ golongan Staf Dosen IPB
- Adanya kelembagaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat

b. Pemerintah Pusat dan Daerah

- SK Mendagri
- SK BKKBN
- SK Gubernur tentang BKS KKN
- Pedoman Pelaksanaan KKN Dikti, Depdikbud
- Kerjasama dengan Dep.Tan dan Dep.Kes

Faktor-faktor penghambat yang kurang mendukung keberhasilan program KKN IPB :

- Jadwal Akademik fakultas
- Keragaman persepsi terhadap KKN
- Terbatasnya dana.
- Kesulitan untuk mengumpulkan petani secara bersamaan dalam waktu yang sama;
- Pelaksanaan program sering tidak tepat waktu dan mundur karena petani sibuk di lahan pertaniannya;
- Penyampaian informasi kurang lancar karena terbatasnya sarana yang ada;
- Program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN, sering tidak tepat guna dan belum dikenal oleh masyarakat;
- Terbatasnya dana KKN IPB untuk menunjang program yang dilaksanakan;
- Terbatasnya modal usahatani petani, sehingga petani tidak bisa melaksanakan sendiri program tersebut dalam usaha taninya;
- Ketidakpedulian petani penggarap dalam menerima introduksi teknologi dalam bidang pertanian.

3. Program Lanjutan Yang Perlu Dilaksanakan

Keberhasilan program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN diharapkan dapat dilaksanakan sendiri oleh petani setelah mahasiswa KKN meninggalkan desa. Berlanjut tidaknya program tersebut akan sangat tergantung kepada tingkat kesadaran masyarakat desa, keterlibatan instansi terkait dalam pelaksanaan KKN dan frekuensi penempatan KKN oleh IPB pada periode berikutnya.

Program lanjutan yang perlu dilaksanakan :

- Penyegaran program pasca KKN oleh PPL dengan menambah anggota PPL dan menambah keaktifannya;
- Membantu modal usahatani melalui kredit usahatani;
- Membantu pemasaran hasil-hasil pertanian melalui KUD, maupun dalam wadah pemasaran bersama;
- Pelatihan Koperasi untuk pengurus KUD;
- Pembinaan petani oleh instansi terkait;

- Pertimbangan IPB dan pihak Bappeda untuk melaksanakan KKN pada periode berikutnya;
- Adanya monitoring/evaluasi dampak keberhasilan KKN baik oleh IPB maupun oleh instansi terkait;

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan program nasional yang amat strategis dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan.
2. Realisasi upaya pengentasan kemiskinan melalui KKN dilakukan melalui penetapan kebijaksanaan pelaksanaan KKN dalam : Penetapan lokasi, tema, penetapan program/kegiatan dan kerjasama dengan kelembagaan/instansi yang memiliki misi yang sama.
3. Dalam pelaksanaannya KKN IPB masih mengalami hambatan karena keragaman persepsi unsur-unsur yang terlibat dan keterbatasan dana, disamping adanya keberhasilan karena berbagai faktor pendukung seperti status akademik, dukungan pemimpin IPB, Pemda dan kerjasama dengan lembaga /instansi terkait.

S a r a n

1. Pengisian kerjasama dengan Pemda dan Instansi lain agar lebih konkrit dan terencana mengacu kepada proses perencanaan pembangunan.
2. Dituntut perhatian lebih besar dari Pemda untuk memanfaatkan kehadiran mahasiswa di daerahnya terutama dalam menanggulangi kendala-kendala demi lancarnya pelaksanaan program.

IDENTIFIKASI MASALAH DAN PENDEKATAN PENGENTASAN
KEMISKINAN : Suatu Restrospeksi 1)

Oleh: Lutfi I. Nasoetion 2)

I. Pendahuluan

Sejak dicanangkannya pembangunan nasional pada tahun 1969 hingga sekarang, keadaan sosial ekonomi penduduk mengalami kemajuan besar. Selama periode tersebut pendapatan per kapita Indonesia meningkat dari rata-rata Rp 4.672,5 (1969) menjadi Rp 647.960,4 pada tahun 1990 (harga konstan), Jumlah penduduk miskin turun dari 54.2 juta pada tahun 1976 menjadi 27.2 juta orang pada tahun 1990 (BPS, 1991).

Namun demikian, hasil pembangunan tersebut tampaknya belum merata ke seluruh Indonesia. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih tertinggal. Oleh sebab itu, usaha pemerataan hasil pembangunan dan menghilangkan kemiskinan masih akan tetap mewarnai sasaran pembangunan jangka panjang ke dua. Terdapat cukup banyak alasan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang perlu ditanggulagi secara khusus di dalam suatu kegiatan pembangunan. Salah satu alasan pembangunan daerah miskin mengangkat harkat kesejahteraan lapisan masyarakat terbawah dalam strata kesejahteraan, baik secara kuantitas maupun penyebaran geografisnya.

Ditinjau dari sudut sosial, kemiskinan merupakan ciri lemahnya potensi suatu masyarakat untuk berkembang. Disamping itu kemiskinan berhubungan dengan aspirasi yang sempit dan pendeknya horison waktu wawasan ke depan suatu masyarakat.

Dari titik pandang ekonomi kemiskinan dianggap merupakan masalah dengan alasan, antara lain: (1) kemiskinan merupakan cermin dari rendahnya permintaan agregat (agregat demand). Lebih lanjut permintaan agregat yang rendah mengurangi insentif untuk mengembangkan sistem produksi, (2) Kemiskinan berkaitan dengan ratio kapital/tenaga kerja yang rendah selanjutnya mengakibatkan produktivitas tenaga kerja rendah dan (3) Kemiskinan seringkali menimbulkan mis alokasi sumberdaya terutama tanaga kerja.

-
- 1) Makalah disampaikan pada lokakarya "Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan ", diselenggarakan oleh LPM-IPB.
 - 2) Staf Pengajar pada Jurusan Ilmu Tanah, Faperta IPB dan Ketua LP-IPB

Ditinjau dari aspek politik, kemiskinan dapat dikaji sebagai suatu fenomena ketergantungan dan eksploitasi kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lainnya. Adalah tidak adil dan berbahaya jika nasib dan masa depan suatu golongan masyarakat ditentukan oleh kelompok masyarakat lainnya. Kemiskinan sekelompok masyarakat akan menimbulkan kesenjangan dan pada akhirnya kesenjangan lebih berbahaya daripada kemiskinan itu sendiri.

Pada dasarnya dampak kemiskinan berdimensi sangat luas, tidak saja berdimensi sosial, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut dimensi budaya dan ketahanan keamanan.

Alasan utama keikutsertaan pemerintah secara langsung dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah kewajiban pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Disamping itu penanggulangan kemiskinan mempunyai implikasi sosial-ekonomi yang luas. Pertama-tama, pada suatu sistem ekonomi yang sedang tumbuh penanggulangan kemiskinan dapat meningkatkan permintaan agregat domestik. Peningkatan permintaan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya penanggulangan kemiskinan dapat memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya lahan yang pada gilirannya mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Strategi yang diambil di dalam pemecahan permasalahan kemiskinan sangat ditentukan oleh faktor-faktor penyebab atau tipe kemiskinan yang berlangsung. Ditinjau dari segi penyebabnya, secara umum kemiskinan dibedakan atas kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural.

1.1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, sehingga peluang untuk memproduksi relatif kecil ataupun jika kegiatan produksi dapat dilakukan umumnya dengan tingkat efisiensi yang relatif rendah. Di dalam lingkungan masyarakat agraris, sumberdaya alam yang paling utama dalam menyebabkan kemiskinan adalah kualitas lahan dan iklim. Penyebab wilayah miskin secara alamiah sering terjadi di wilayah dengan kondisi tanah yang lanjut dan masam (Ultisol, Oksisol) serta gembut (Histosol).

Ciri-ciri utama dari kemiskinan alamiah antara lain adalah :

- (1) Teknologi pada umumnya tradisional dan merupakan upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sebagai ilustrasi, varietas-varietas tanaman yang digunakan pada umumnya berproduksi dalam keadaan tanah yang kurang

subur ataupun keadaan iklim yang ekstrim akan tetapi jika dipupuk berat pada umumnya tanggap (response) tanaman lemah. Kemampuan petani melindungi hasil pertanian lemah. Penggunaan insektisida relatif sedikit dan tidak terpola.

- (2) Jenis tanaman pada umumnya sedikit dan tidak didiversifikasikan. Tanaman pangan umumnya merupakan tanaman utama.
- (3) Petani pada umumnya bersifat inward looking dan dengan cara yang sering kali ekstrim berusaha menghindari resiko. Walaupun tujuan produksi tidak semata-mata untuk tujuan subsisten, akan tetapi marketable surplus relatif kecil dan pasokannya tidak terpola. Biaya Pengumpulan produksi tinggi, kekuatan monopoli pedagang perantara dan kelembagaan pemasaran kurang berkembang.
- (4) Solidaritas masyarakat pada umumnya kuat, kelembagaan yang mempertahankan stabilitas berkembang dan berpengaruh, sedangkan kelembagaan yang mendorong perubahan pada umumnya lemah dan seringkali dianggap sebagai unsur asing yang patut dicurigai.
- (5) Hak pemilikan dan penguasaan lemah sangat bersifat sosial. Batas-batas otoriti pemilikan dan penguasaan lahan sangat kabur dan tidak formal. Perdagangan lahan terbatas dan walaupun terjadi harga tanah ditentukan secara kelembagaan.
- (6) Sarana transportasi dan komunikasi pada umumnya sangat terbatas dan walaupun tersedia intensitas penggunaannya kecil.
- (7) Pemerintahan desa pada umumnya eksklusif dan elite desa mempunyai hubungan primordial kekeluargaan.
- (8) Tingkat ekonomi pada umumnya rendah dan tidak beragam, persentasi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan makanan pada umumnya lebih dari 70%, serta konsumsi jasa sangat rendah.
- (9) Distribusi pendapatan antar keluarga relatif merata. Gini ratio pada umumnya berkisar antara 2.0 - 3.0.
- (10) Kepadatan agraris pada umumnya rendah berhubung daya dukung lahan yang lemah.
- (11) Pada umumnya wilayah ini mengalami backwash process yaitu perpindahan sumberdaya berkualitas tinggi ke luar wilayahnya.

Ciri-ciri utama yang telah diuraikan tidak mesti seluruhnya dimiliki oleh suatu wilayah miskin, akan tetapi pada umumnya sebagian besar dari ciri-ciri tersebut sangat menonjol.

1.2. Kemiskinan Struktural

Secara umum kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh

tatanan kelembagaan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kelembagaan adalah dalam pengertian paling luas yaitu tidak hanya mencakup tatanan organisasi tetapi juga mencakup aturan permainan yang diterapkan.

Kemiskinan struktural sebagai masalah mempunyai beberapa hirarkhi struktural yang menyebabkannya. Kemiskinan pada suatu wilayah dapat merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari struktur kelembagaan yang diselenggarakan secara masal sebagai suatu program nasional pada beberapa kasus justru tidak menimbulkan konsidi kelembagaan yang lebih produksi dari kelembagaan lokal yang telah ada. Dilain pihak, kemiskinan pada suatu lokal dapat merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari struktur kelembagaan regional (Propinsi, Kabupaten). Pada hirarkhi yang paling rendah, kemiskinan di suatu lokal seringkali disebabkan akibat langsung dari sistem kelembagaan lokal, seperti sistem pemilikan/penguasaan lahan, sistem bagi hasil, ijon dan sebagainya yang berlaku secara lokal.

Dalam hal strategi pengembangan fisik, strategi pembangunan sistem transportasi dan jaringan komunikasi yang ditempuh, di dalam beberapa hal sering kali memperlemah akses suatu wilayah terhadap sumberdaya atau sistem komunikasi, sehingga menimbulkan suatu keterkucilan "semu".

1.3. Pola Penanganan Kemiskinan

Metode (cara) pengentasan kemiskinan yang ada di dunia ini pada prinsipnya terbagi atas dua kutub. Kutub pertama adalah pola Liberalisme, yang dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat serta pola Komunis Sosialis.

Di dalam pola liberalisme pengentasan kemiskinan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Artinya dalam sistem ini terjadi persaingan yang ketat antara individu atau pelaku-pelaku pembangunan. Selanjutnya dilakukan kontrol pada redistribusi welfare melalui social security yang ketat. Bentuk-bentuk kontrol tersebut misalnya santunan pada individu yang nganggur, santunan hari tua dsb.

Pada sistem ini terdapat kelemahan yakni terjadinya keragaman yang cukup besar pada tingkat pendapatan penduduknya. Namun ada juga keuntungan yang diperoleh, yakni diperolahnya insentif yang lebih bagi individu yang melakukan kegiatan secara aktif. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya rangsangan kegiatan selanjutnya.

Di dalam pola komunis sosialis dihapuskannya mekanisme pasar dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan komune - komune yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah.

Dari sudut pemerataan pendapatan sistem komunis sosialis cukup baik. Namun di dalam sistem ini tidak terdapat insentif bagi individu yang melakukan kegiatan ekonomi secara giat sehingga mengakibatkan proses perkembangannya lambat.

II. Kasus-Kasus Pengentasan Kemiskinan

Institut Pertanian Bogor sebagai lembaga pendidikan tinggi dituntut melakukan usaha-usaha pengentasan kemiskinan melalui pengabdian pada masyarakat.

Dalam kasus tersebut IPB melalui Lembaga Penelitiannya mengajukan tiga kasus pengentasan kemiskinan sebagai pelajaran dalam usaha pengentasan kemiskinan, yakni berupa Studi Kasus di Kalimantan Barat, di Wamena Kabupaten Jayawijaya, Irian Jaya, serta UPT Tanjung Santan I, II, III, IV, Kalimantan Timur.

2.1. Studi Kasus di Kalimantan Barat

Penanggulangan kemiskinan di Kecamatan-Kecamatan miskin Propinsi Kalimantan Barat merupakan hal yang mendesak untuk ditangani secara mendasar. Dalam pertumbuhan ekonomi yang cepat penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Barat dapat memberikan manfaat dalam distribusi pendapatan di antara golongan masyarakat, serta substitusi impor terutama bahan makanan yang selama ini diimpor dari daerah lain.

Hal yang paling strategis dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan disusunnya suatu program kaji tindak yang mempertimbangkan tipe kemiskinan yang sedang belaku di Kalimantan Barat serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya. Dari studi sebelumnya didapatkan kenyataan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan di Kecamatan-kecamatan Propinsi Kalimantan Barat adalah letak wilayah yang terisolasi, ketrampilan dan pengetahuan sumberdaya manusia terbatas, kualitas sumberdaya alam dan manusia yang rendah, kelembagaan pertanian yang ada belum berfungsi dengan baik, dan keterbatasan modal.

Hal ini mengakibatkan sistem pertanian yang ada masih bersifat subsistem, jumlah dan mutu produksi rendah serta terbatasnya kegiatan diversifikasi usaha.

Konsep pengembangan Kecamatan miskin di Kalimantan Barat di dasarkan tipologi daerah yang mencerminkan kondisi daerah bersangkutan, yakni tipologi lahan kering, lahan sawah, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Desa miskin sebagai "target group" telah diketahui dan dipilih dari studi sebelumnya. Proses pemilihan desa miskin untuk kaji tindak didasarkan pada beberapa hal, antara lain: (1) aksesibilitas, (2) ketersediaan tenaga kerja, (3) luas usaha, (4) keterbukaan menerima inovasi dan (5) ada tidaknya proyek pemerintah. Secara konsepsional desa miskin yang dipilih sebagai lokasi kaji tindak akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan pembangunan kecamatan-kecamatan miskin. Program ini direncanakan selama lima tahun. Tahun pertama dikendalikan oleh tim Lembaga Penelitian IPB, dan secara berangsur-angsur akan diserahkan ke Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Barat.

Lokasi kegiatan kaji tindak pada masing-masing tipologi diharapkan akan menjadi Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA). Hal ini didasarkan bahwa pengembangan usaha pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat harus berorientasi pada bisnis. Dalam orientasi tersebut sistem usaha harus bersifat modern dan memberikan nilai tambah tinggi terhadap produk yang dihasilkan. Kegiatan tersebut mencakup:

- a. Pengadaan faktor input, antara lain: penyediaan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan.
- b. Proses produksi antara lain: pengaturan teknik-teknik produksi, pengaturan dan penyediaan tenaga kerja, pengaturan jadwal kegiatan.
- c. Proses pemrosesan hasil produksi.
- d. Pemasaran.

Pengembangan usaha pertanian dengan konsep agribisnis diharapkan akan menghasilkan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Usaha-usaha pertanian akan diperbaiki sehingga terjadi peningkatan produk dan peningkatan pendapatan petani.
- b. Peningkatan kualitas produksi sehingga memberikan nilai tambah yang tinggi terhadap produk yang dihasilkan.
- c. Mampu memasarkan hasil produksi dengan daya saing yang tinggi.

2.2. Studi Kasus di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Irian Jaya

Kabupaten Jayawijaya merupakan suatu kabupaten yang paling padat jumlah penduduknya di Irian Jaya. Kecamatan Wamena (Ibukota Kabupaten Jayawijaya) merupakan suatu daerah yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat produksi, khususnya hortikultura dan bunga potong. Saat ini hasil produksi hortikultura telah dipasarkan hingga ke Jayapura dan Tembagapura (PT Freeport Indonesia Incorporation/PT FII). Sarana transportasi di Wamena dengan daerah lain hanya dengan satu alternatif, yaitu pesawat terbang.

PT. Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) mempunyai tanggung jawab moral untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kerjasama dengan Lembaga Penelitian IPB (rintisan dimulai sejak bulan Nopember 1991) telah dilaksanakan Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri (Pusat P3A) di Wilayah Kecamatan Wamena dan sekitarnya, Kabupaten Jayawijaya Propinsi, Irian Jaya.

Realisasi Pusat P3A Wamena dimulai pada bulan Mei 1992 untuk jangka waktu selama 3 tahun. Tujuan Pusat P3A Wamena adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki teknik budidaya beberapa komoditi pertanian pilihan berdasarkan studi pendahuluan melalui pengembangan demplot, produksi bibit, penyuluhan dan pelatihan.
- b. Memperbaiki teknik penanganan pasca panen.
- c. Mengembangkan Pusat Produksi Pertanian dan Agroindustri (P3A) di Wamena dengan memanfaatkan secara optimal hasil pertanian di Wamena dan sekitarnya.

Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah: (a) Peningkatan efisiensi pemanfaatan lahan, (b) Peningkatan persentase kehilangan pasca panen, (c) Peningkatan penghasilan masyarakat, (d) Pengembangan wilayah Wamena dan sekitarnya.

Dalam pembinaannya Pusat P3A Wamena mempergunakan sistem Inti dan Plasma. Pusat P3A Wamena sebagai inti mengelola 5 hektar lahan milik petani. Selain itu lahan inti berfungsi sebagai: tempat petak contoh, tempat pelatihan petani, tempat pelaksanaan action research, unit terkecil penyediaan komoditi untuk unit pengolahan, serta tempat perbanyakan benih dan bibit bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan Pusat P3A Wamena fungsi PT Telkom sebagai Bapak Angkat dengan membiayai investasi, LP-IPB memberikan bimbingan teknologi, manajemen dan pemasaran hasil, masyarakat melaksanakan kegiatan produksi, serta pihak pemda sebagai pendukung dari seluruh kegiatan tersebut.

Produksi sayur-sayuran yang dihasilkan (bulan Juli 1993) akan mencapai 4 ton/minggu dengan pemasaran ke Jayapura dan Tembagapura (PT FII).

2.3. Studi Kasus di UPT Tanjung Santan I, II, III, IV Kalimantan Timur

UPT Tanjung Santan I, II, III dan IV terletak di lokasi yang strategis. Dengan sarana transportasi yang relatif cukup baik (jalan darat), jarak tempuh dari UPT tersebut

terhadap pusat-pusat kegiatan perekonomian (Bontang, Samarinda dan Balikpapan) dapat dicapai dengan waktu yang relatif singkat dan lancar.

Mengingat sumberdaya manusia belum dimanfaatkan secara penuh, maka Departemen Transmigrasi (Direktorat Binusek) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian IPB telah memberikan ketrampilan budidaya jamur kayu diberikan dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan bahan baku, tenaga kerja dan pemasaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan budidaya jamur kayu tersebut, secara garis besar telah mengikutsertakan lembaga-lembaga berikut:

1. Departemen Transmigrasi sebagai penyandang dana supervisi.
2. Lembaga Penelitian IPB memberikan bimbingan teknologi, manajemen serta pemasaran.
3. Pihak swasta sebagai Bapak Angkat, antara lain PT Pupuk Kaltim.
4. Warga transmigrasi sebagai pelaksana kegiatan secara langsung meliputi pembibitan, perawatan, panen dan pemasaran.
5. Koperasi Unit Desa sebagai wadah bagi para warga transmigran. Kegiatan budidaya jamur kayu telah dijadikan sebagai salah satu unit usaha KUD.

Proyek ini telah berhasil memberikan bimbingan budidaya jamur kayu kepada 62 orang warga transmigran. Produksi yang telah berhasil dicapai adalah sebesar 16 kg per minggu jamur kayu dalam bentuk segar dengan harga Rp 20.000,- per kg.

III. Pelajaran-pelajaran yang Dapat Diambil

Ada beberapa pelajaran yang mampu diserap dari beberapa studi pengentasan kemiskinan pada tiga lokasi tersebut. Pelajaran tersebut mencakup aspek fisik, aspek ekonomi, aspek kelembagaan, aspek teknologi, aspek sosial dan aspek politik.

3.1. Aspek Fisik

Program pengentasan kemiskinan secara fisik alam harus mempertimbangkan hal berikut:

- a. Lokasi sebagai "target group" dipilih pada tempat yang mempunyai aksesibilitas yang tinggi. Lokasi yang strategi akan menunjang kegiatan ekonomi yang lebih mantab, dibandingkan pada lokasi yang sangat terpencil.

- b. Lokasi yang berfungsi untuk pengembangan kegiatan pertanian khususnya harus dipilih secara representatif. Artinya lokasi sebagai pusat pengembangan tidak selalu dipilih yang paling subur, namun lebih dipertimbangkan pada kondisi yang terbanyak pada tempat tersebut. Sehingga lebih mudah diaplikasikan oleh masyarakat.
- c. Dalam perkembangan awal harus dihindari penggunaan modal fisik yang besar. Misalnya tidaklah perlu meruntuhkan gunung agar dibuka lahan-lahan pertanian pada saat awal, namun digunakan lahan-lahan yang ada.

3.2. Aspek Ekonomi

Program pengentasan kemiskinan secara finansial dan ekonomi harus menguntungkan. Agar usaha-usaha tersebut menguntungkan harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a. Produk yang dihasilkan harus mempunyai keunggulan komparatif. Untuk itu perlu dilakukan penekanan terhadap biaya produksi, yang secara alamiah dapat ditempuh melalui pengolahan komoditas yang sesuai dengan kondisi alam.
- b. Produk yang dihasilkan harus mempunyai keunggulan daya saing. Tentunya pada produk tersebut dituntut penyesuaian terhadap permintaan pasar, sesuai mutu, kontinuitas, serta keseragaman mutu (kebakuan mutu).

Dari kedua hal diatas berarti kegiatan ekonomi harus dilakukan secara agribisnis. Dalam proses Agribisnis setiap usaha dilakukan secara bisnis. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan mulai dari input produksi, proses produksi, pasca panen serta pemasaran. Kegiatan Agribisnis ini menuntut sumber kapital dari luar.

3.3. Aspek Kelembagaan

Perlu dilakukan kegiatan inovasi kelembagaan melalui:

- a. Mengembangkan partisipasi dan kreatifitas anggotanya melalui pembangian hak dan kewajiban yang jelas para anggotanya. Hal ini melalui pemberian insentive baik material maupun non material. Dengan mengembangkan partisipasi dan kreatifitas anggotanya, akhirnya diharapkan para anggota dapat mandiri dalam mengelola usahanya.
- b. Kelembagaan harus dapat mendistribusikan nilai tambah secara adil kepada para anggotanya.
- c. Kelembagaan harus fleksibel dan sebaiknya berstruktur sistemik bukan komoditas.
- d. Kelembagaan harus lentur sehingga dapat tanggap terhadap perubahan sosial ekonomi.

3.4. Aspek Teknologi

Teknologi yang perlu diintrodusir dalam pengentasan kemiskinan adalah:

- a. Harus ada jaminan teknologi yang digunakan tepat guna. Dinamika perkembangan teknologi sesuai dengan dinamika pasar, sehingga memungkinkan diversifikasi usaha.
- b. Harus sesuai dengan kemampuan masyarakat. Adopsi teknologi tidak tunduk pada perubahan sosial walaupun perubahan sosial sampai batas tertentu dapat direkayasa.
- c. Pengembangan teknologi harus memungkinkan tenaga kerja melatih diri sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya.
- d. Teknologi tersebut harus dapat mensubstitusi sumberdaya lokal yang langka.

3.5. Aspek Sosial

Program pengentasan kemiskinan secara sosial harus mempunyai sifat-sifat berikut:

- a. Program pengentasan kemiskinan harus memanfaatkan pranata sosial yang ada. Bila tidak sangat perlu, tidak perlu membentuk institusi baru.
- b. Kegiatan tidak melanggar tata nilai dan norma-norma masyarakat lokal.
- c. Pengembangan kegiatan tersebut harus mendorong transformasi budaya ke arah yang lebih disiplin dan produktif.

3.6. Aspek Politik

Program pengentasan kemiskinan secara politik harus mempunyai sifat-sifat berikut:

- a. Partisipasi anggota harus memberikan peluang pada peserta untuk ikut mengambil keputusan secara "mufakat".
- b. Pengembangan usaha tersebut tidak membentuk elit politik lokal yang baru. Dengan perkataan lain perlu memanfaatkan sumber-sumber politik lokal.
- c. Usaha-usaha yang dikembangkan harus mempunyai koordinasi yang kuat dengan pemerintah lokal.

IV. Penutup

Penanggulangan kemiskinan mempunyai implikasi sosial ekonomi yang luas. Pertama-tama, pada suatu sistem ekonomi yang sedang tumbuh penanggulangan kemiskinan dapat meningkatkan permintaan agregat domestik. Peningkatan permintaan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya penanggulangan kemiskinan dapat memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya lahan yang pada gilirannya mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan perlu segera dijabarkan dan diimplementasikan pada tindakan yang nyata demi kemakmuran bangsa.

V. Daftar Pustaka

- LP-IPB, 1991. Studi Pendahuluan Pembangunan Pusat Pengembangan Produksi Pertanian dan Agroindustri di Wilayah Kecamatan Wamena dan Sekitarnya, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Irian Jaya. Kerjasama LP-IPB dan PT Telkom Indonesia.
- LP-IPB. 1993. Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kecamatan Miskin pada Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat. Kerjasama LP-IPB dan Bappeda Kalimantan Barat.
- LP-IPB. 1993. Bimbingan Budidaya Jamur Kayu di Lokasi UPT Tanjung Santan I, II, III dan IV Propinsi Kalimantan Timur. Kerjasama LP-IPB dan Direktorat Bina Usaha Ekonomi Direktorat Jenderal Pengerahan dan Pembinaan Departemen Transmigrasi.

**PELUANG BISNIS MELALUI USAHA TERNAK AYAM BUKAN RAS
KASUS KELURAHAN JAGAKARSA JAKARTA SELATAN ¹⁾**

Oleh

R. Kurnia Achjadi ²⁾
Abdulgani A. Siregar ³⁾
Amiruddin Saleh ⁴⁾

I. PENDAHULUAN

Pembangunan peternakan terus dilanjutkan melalui peningkatan usaha diversifikasi, intensifikasi ternak, didukung oleh usaha pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Perhatian khusus perlu diberikan pada pengembangan peternakan rakyat dengan meningkatkan peran koperasi serta keikutsertaan swasta. Pembangunan peternakan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani peternak, mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat serta mengembangkan ekspor (GBHN 1993).

Ayam bukan ras atau ayam lokal merupakan plasma nutfah Indonesia yang sangat potensial untuk dikembangkan, secara geografis populasinya menyebar hampir di seluruh pedesaan.

Tujuan pemeliharaan ayam buras di pedesaan hingga saat ini masih beragam bergantung kepada keadaan sosial ekonomi pemelihara serta keadaan lingkungan sekitarnya. Dari berbagai pengalaman selama ini terlihat bahwa berbagai pengaruh lingkungan melakukan interaksi membentuk kreativitas, sikap dan motivasi pemeliharaan ayam buras.

Telah banyak dilakukan upaya pengembangan ayam buras oleh Instansi terkait baik melalui INTAB, PKT, PPWT dan sebagainya, yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat serta peningkatan pendapatan. Namun dalam pelaksanaannya sulit untuk dilakukan monitoring dan evaluasi keberhasilannya, walaupun program tersebut menggunakan sistem bergulir (revolving).

-
- 1) Disampaikan pada Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, LPM IPB, 10 Juli 1993.
 - 2) Staf Pengajar Jurusan Reproduksi dan Kebidanan Fakultas Kedokteran Hewan IPB dan Sekretaris Pusat Pengembangan Wilayah LPM IPB.
 - 3) Staf Pengajar Jurusan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan IPB dan Kepala Pusat P3M LPM IPB
 - 4) Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan dan Sekretaris Pusat P3M LPM IPB

Dalam upaya menelusuri potensi produksi serta aspek ekonomi ternak ayam buras sebagai bagian dari program perbaikan gizi masyarakat sekaligus pengentasan kemiskinan, perlu dikaji sampai sejauh mana ternak ayam buras dapat diandalkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kecil, keterpaduan antara komponen petani peternak, proses produksi dan pemasaran dalam wadah Unit Ekonomi Desa yang mengarah ke bentuk koperasi.

**II. GAMBARAN PROGRAM PENGEMBANGAN AYAM BURAS
YANG DILAKUKAN LPM IPB SELAMA PELITA V**

Kegiatan usaha ayam buras yang dilakukan oleh LPM IPB merupakan kegiatan penunjang dalam dinamika kegiatan pertanian atau masyarakat desa/kota lainnya, yang diarahkan kepada perbaikan teknologi, perbaikan sumberdaya manusia melalui pendekatan skala usaha yang lebih ekonomis, dan merupakan pengisian program kerjasama terutama dengan Pemerintah DT II Kabupaten Bogor, Sukabumi dan DKI Jakarta.

2.1. Lokasi Program

Perkembangan lokasi (wilayah) program pemeliharaan ayam buras sejak tahun 1987 sampai tahun 1992 terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Lokasi Pemeliharaan Ayam Buras 1987-1992

Tahun Anggaran	Lokasi
1987/1988	Kecamatan Parungpanjang, Kab. Bogor
1988/1989	Kecamatan Sagaranten, Kab. Sukabumi
	Kecamatan Kalapanunggal, Kab. Sukabumi
1989/1990	Kecamatan Sagaranten, Kab. Sukabumi
1990/1991	Kecamatan Sagaranten, Kab. Sukabumi
1991/1992	Kecamatan Cisolok, Kab. Sukabumi
1992/1993	Kecamatan Jagakarsa, DKI Jakarta
1992/1993	Kecamatan Dramaga, Kab. Bogor

2.2. Keterkaitan Program

Program usaha ayam buras terkait dengan wawasan program, antara lain:

- a. Program Pengembangan Wilayah Lahan Kering Secara Terpadu
- b. Program Pengembangan Desa Pantai
- c. Program Pasca KKN

2.3. Pendekatan Program

Sebagai modifikasi dari bentuk program ayam buras yang telah dilakukan oleh instansi terkait, maka LPM IPB mencoba melakukan upaya pemeliharaan ayam buras melalui berbagai pendekatan, antara lain:

2.3.1. Pendekatan Teknis

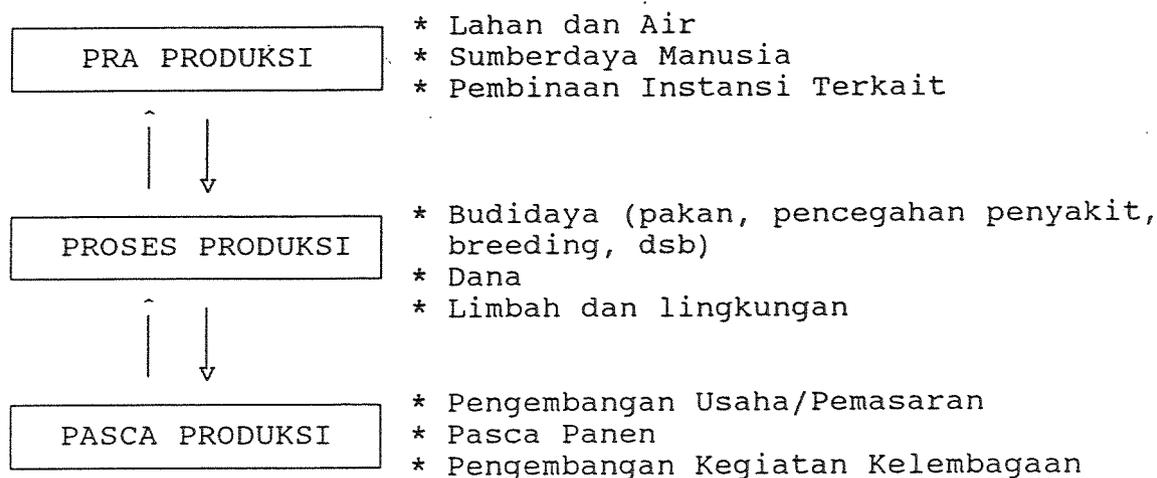
Perbaikan pola pemeliharaan ayam buras melalui aspek pemilihan bibit, bentuk kandang, pola pemberian pakan, manajemen pemeliharaan anak ayam dengan teknologi pisah dini, pemanfaatan teknologi induk buatan (mesin tetas) dan aspek pencegahan penyakit.

2.3.2. Pendekatan Agribisnis

- Penerapan skala usaha yang efisien dan Pembinaan pelembagaan. Dalam hal ini diperlukan hitungan yang cermat dengan nilai tambah yang tidak utopi. Melalui pendekatan ini secara utuh dilakukan perubahan ratio penyebaran bantuan ayam buras yaitu 100 ekor betina dan 10 ekor jantan, yang dikelola oleh 5 orang anggota warga masyarakat dalam bentuk kelompok.
- Bantuan sarana produksi terutama kandang, pakan selama 2-3 bulan dan pencegahan penyakit terutama ND selama 2 periode vaksinasi.
- Aspek pemasaran melalui petani peternak yang telah maju mengusahakan ayam buras, atau langsung ke konsumen masyarakat pengguna sebagai konsumen akhir, baik berupa konsumen lembaga (seperti: jamu gendong, penjual bubur ayam, dan sebagainya) maupun konsumen individu (rumah tangga).

Bila perhitungan butir (1) dan (2) sudah ada standarnya, pihak Bank atau sponsor lain (kalangan Pemerintah/Swasta) meyakini standar itu, tentunya harus bisa mengeluarkan kredit/bantuan permodalan.

Secara umum Tahap pembinaan kepada kelompok ternak ayam buras mengikuti alur Pola Pemeliharaan Ayam Buras, yang ilustrasinya adalah sebagai berikut:



Gambar: Alur Pola Pemeliharaan Ayam Buras

2.3.3. Pendekatan Terpadu

Dari berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pemeliharaan ayam buras dari segi teknis saja tidaklah cukup, sehingga memerlukan aspek pendekatan lain baik berupa ekonomi, sosial dan kelembagaan. Unsur manusia dalam kelembagaan mengarah kepada kerjasama kelompok dalam berbagai bentuk, seperti kelompok tani, pemuda, PKK, Pesantren dan sebagainya, yang diharapkan dapat mengkait dengan wadah formal yang telah lama ada di desa melalui azas kerjasama dan kekeluargaan (koperasi).

2.4. Evaluasi Program

Bentuk evaluasi program ayam buras yang dilakukan oleh LPM IPB selama ini berdasarkan kepada tujuan yang telah ditetapkan, meliputi evaluasi proses, evaluasi hasil serta dampak.

Namun dalam pelaksanaannya bentuk evaluasi ketiga di atas sulit dilakukan secara utuh oleh berbagai faktor, baik teknis maupun non teknis.

Dari segi dampak yang mudah terlihat adanya perubahan dalam cara pemeliharaan ayam buras, terutama aspek perubahan bentuk kandang yang sudah mulai tertata baik, pemberian pakan, penerapan teknologi pisah dini dan teknologi alat penetasan buatan yang telah diadopsi, serta keinginan membayar program vaksinasi ND secara teratur.

Peningkatan serta penurunan populasi ayam buras di setiap anggota kelompok mudah diamati, hanya saja berapa besar pertumbuhan pendapatan (segi ekonomi) terutama untuk setiap individu anggota kelompok memerlukan waktu dan kecermatan perhitungan.

III. KASUS BERUSAHA TERNAK AYAM BURAS DI JAGAKARSA

Implementasi program pembinaan berusaha ternak ayam bukan Ras (buras) yang dilakukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor dilokasi binaan di kabupaten DT. II Bogor, Sukabumi, dan wilayah DKI Jakarta secara umum telah menerapkan pola pendekatan program terpadu seperti yang dijelaskan di atas. Berikut ini akan dipaparkan lebih detail Upaya Membina Karang Taruna melalui Pemeliharaan Ayam Buras di kelurahan Jagakarsa kotamadya Jakarta Selatan, sebagai contoh kasus. Proyek PPM (Pengabdian kepada Masyarakat) di Jagakarsa ini merupakan kerjasama Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB dengan Biro Bina Pemerintahan Pemda DKI Jakarta.

Pertama-tama dilakukan upaya penjajagan ke Pemda DKI Jakarta untuk menentukan lokasi mana yang memungkinkan dilakukannya paket program pembinaan berusaha ternak ayam buras tersebut, dilihat dari segi potensi dan peluang yang menunjang usaha itu, serta dilihat dari segi tata ruang pembangunan wilayah.

3.1. Perumusan masalah

Setelah terpilih kelurahan Jagakarsa kecamatan Jagakarsa sebagai lokasi binaan, maka upaya identifikasi dan perumusan masalah mulai dilakukan. Studi penjajagan kedua berupa analisa potensi daerah (lahan dan sumberdaya manusia) serta wawancara tokoh dan masyarakat (Formal dan Informal) di kelurahan Jagakarsa diperoleh informasi sebagai berikut:

- (1) banyaknya anggota keluarga yang putus sekolah (lepas SLTP/SLTA) yang belum tertampung oleh lapangan pekerjaan yang ada,
- (2) potensi lahan (tanah pekarangan) yang belum dimanfaatkan optimal,
- (3) peluang pasar yang memungkinkan berusaha ternak ayam buras,
- (4) kualitas sumberdaya manusia (kelompok anggota keluarga usia produktif) yang relatif rendah, tercermin dari tingkat pengetahuan, keterampilan dan kemampuan penguasaan teknologi dan berusaha ternak ayam buras yang

- rendah (terlihat dari data pre-test saat dilakukannya Penyuluhan dan Pelatihan Beternak Ayam Buras tanggal 24 Desember 1992),
- (5) pembinaan kelompok dan kelembagaan pemuda (Karang Taruna) masih terasa kurang, yang terlihat dari belum terorganisasi atau terbentuknya kelompok tersebut.

Dari perumusan masalah di atas, kemudian disusun suatu program kegiatan usaha peternakan ayam buras sebagai salah satu cabang usaha kelompok.

Pembinaan awal berupa upaya pembentukan dan pembinaan kelompok pemuda putus sekolah ke dalam wadah kelompok karang taruna tani *Jaya Satria Muda*. Kelompok karang taruna tani yang telah disahkan oleh Sudin Peternakan Jakarta Selatan ini beranggotakan 19 orang, dengan karakteristik sebagai berikut: sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (79%), berusia rata-rata 21 tahun, kedudukan dalam keluarga umumnya sebagai anak (95%). Hanya 37% peserta yang belum memiliki pengalaman beternak ayam buras, sedangkan 63 persen lainnya pernah beternak ayam buras walaupun yang mengurusnya adalah orang tua mereka atau saudara. Sifat usaha umumnya masih sambilan (95%), dimana cara pemeliharaannya umumnya dilepas dan masuk kandang jika malam atau ayam dilepas tanpa kandang sama sekali (83%). Lalu kebiasaan memberi makan ayam, umumnya hanya dilakukan pagi hari saja (86%).

3.2. Tujuan dan manfaat kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kegiatan usaha peternakan ayam bukan ras bagi khalayak sasaran strategis yakni pemuda putus sekolah sehingga mereka akan terdorong untuk membuka bisnis usaha peternakan ayam buras sebagai sumber pendapatan.

Beberapa manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan populasi ayam buras sehingga dapat memenuhi kebutuhan komoditi hasil ternak lokal atau lintas wilayah.
2. Terbentuknya kelompok peternak ayam buras yang menguasai IPTEK dalam rangka peningkatan kualitas pengelola usaha tani.
3. Terkelolanya lahan usaha tani lebih produktif dan efisien dan atau tertatanya kawasan usaha tani yang akan memudahkan melakukan pembinaan.
4. Terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha melalui usaha peternakan ayam buras yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3.3. Inovasi Teknologi yang diperkenalkan

Inovasi teknologi usaha peternakan ayam buras yang diperkenalkan kepada anggota kelompok karang taruna tani *Jaya Satria Muda*, meliputi:

- a. teknologi pemilihan bibit ayam buras yang baik.
- b. teknologi pisah dini dalam penanganan pemeliharaan anak ayam.
- c. pola pemberian pakan dengan memanfaatkan ransum komersial dan juga nasi sisa limbah rumah tangga.
- d. pemberian pakan dan air minum secara *at libitum*.
- e. model perkandangan yang semi terkurung (semi intensif).
- f. sistem perkawinan yang periodik dengan menempatkan ayam pejantan dan betina dalam satu kandang, dengan rasio Jantan dan Betina = 1 : 10; dan memandikan induk ayam yang telah menjalani fase bertelur.
- g. sistem penetasan dengan alat bantu penetasan buatan; dan
- h. pencegahan penyakit terutama Tetelo/ND, dengan mengajarkan cara vaksinasi ND serta pengambilan spesimen darah.

Dalam merubah perilaku sasaran pembinaan yang meliputi upaya peningkatan kawasan kognitif, afektif dan psikomotorik dilakukan dengan cara penyuluhan dalam bentuk kursus di rumah Pembina karang taruna tani *Jaya Satria Muda* (rumah Pak Damai), pelatihan cara vaksinasi dan pengambilan spesimen darah ayam untuk menguji kadar antibodi dalam darah ayam tersebut, serta demonstrasi pembuatan dan penggunaan alat bantu penetasan buatan.

Pembinaan dan pengembangan lebih lanjut adalah merencanakan secara rutin untuk menghadiri pertemuan kelompok karang taruna tani Binaan, yang diselenggarakan setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk memberikan konsultasi, bila kelompok karang taruna tersebut mengalami kesulitan dalam berusaha ternak ayam buras.

3.4. Hasil yang telah dicapai

Beberapa hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Bertambahnya pengetahuan peserta dalam usaha peternakan ayam buras.
2. Terbentuknya wadah berkumpul pemuda putus sekolah dalam organisasi Karang Taruna Tani Jaya Satria Muda.
3. Adanya satu unit usaha peternakan ayam buras sebagai sumber pendapatan bagi anggota/organisasi Karang Taruna.
4. Terbinanya hubungan kelembagaan antara Karang Taruna dengan Dinas terkait.
5. Pemanfaatan waktu para pemuda untuk kegiatan-kegiatan yang produktif.

Adanya penambahan pengetahuan peserta Binaan yang diungkapkan pada butir 1 di atas, dapat dilihat dari perilaku mereka dalam beternak ayam buras. Dimana sebelum dilakukan pembinaan terungkap bahwa persepsi mereka terhadap berusaha ternak ayam buras adalah:

- (1) hanya sebagai usaha sampingan,
- (2) sebagian besar menganggap bahwa ternak ayam (buras) tidak perlu diberi minum, dan makanan bisa dicari sendiri dengan jalan ayam dilepas (dikencarkan),
- (3) mengenai penyakit ayam, hanya 22 persen peserta Binaan yang menyatakan mengerti tentang hal itu, dan umumnya hanya tahu penyakit berak kapur dan tetelo, dengan ciri-ciri lemas atau lumpuh.
- (4) bila ditanya lebih jauh tentang pernah melakukan vaksinasi ND, maka hanya 16% yang pernah melakukan; dan itu-pun dilakukan oleh petugas dari Sudin Peternakan atau oleh Pak Eko sebagai KTNA Peternakan di kelurahan mereka.

Setelah dilakukan penyuluhan dan pelatihan ternyata minat dan motivasi mereka cukup tinggi untuk berusaha ternak ayam buras, lebih-lebih setelah memahami pasar dan prospeknya.

Keterampilan mereka dalam melakukan vaksinasi ND pun baik. Mereka tidak perlu lagi menunggu petugas atau Pak Eko untuk melakukan vaksinasi, tetapi mereka cukup menghubungi Sudin Peternakan atau mengontak LPM-IPB untuk mendapatkan vaksin dan kemudian mereka melakukan vaksinasi sendiri.

Setelah tujuh bulan pembinaan berjalan hasil usaha beternak ayam buras tersebut sudah menggembirakan. Dimana hasil produksi telur setiap bulan mulai bulan April 1993 sudah mencapai 35%. ini berarti kelompok sudah mulai bisa memanfaatkan keuntungan berusaha ternak ayam buras, untuk membantu kelancaran program-program kegiatan karang taruna lainnya. Analisis usaha beternak ayam buras tersebut bisa dilihat pada tabel 2.

3.5. Rekomendasi

Agar pembinaan dan pengembangan kelompok karang taruna tani Binaan tersebut dapat terus bersinambung serta semakin mantap dan dinamis, maka upaya pembinaan kelompok oleh Petugas (PPL) setempat harus terus digalakkan dan selalu dipantau, tetapi jangan sampai menciptakan ketergantungan kelompok dengan pembina kelompoknya.

Aspek modal memegang peranan penting dalam pengadaan sarana proses produksi dan perluasan usaha bisnis peternakan ayam buras. Untuk itu perlu uluran tangan Pemerintah/Swasta dalam membantu permodalan bagi peternak/kelompok ternak yang termasuk kategori miskin.

Aspek pemasaran telur hasil usaha peternakan ayam buras di kelurahan Jagakarsa ini pun perlu pula mendapatkan perhatian serius. Ada baiknya "Jamu gendong" sebagai kelompok konsumen lembaga turut dikenai penyuluhan dan pembinaan.

Tabel 2. Analisis Biaya Usaha Peternakan Ayam Buras (Skala 100 ekor) tiap bulan

No. Uraian	Jumlah (Rupiah)
A. Pengeluaran:	
1. Pembelian 100 ekor @ Rp 10.000,-	=Rp 1.000.000,-
2. Biaya kandang @ Rp 4.000,-	=Rp 400.000,-
3. Biaya pakan @ Rp 30/hari/ekor	=Rp 90.000,-
4. Tenaga @ Rp 6/hari/ekor	=Rp 18.000,-
5. Penyusutan kandang @ Rp 1/hari/ekor	=Rp 3.000,-
Jumlah Modal Awal	=Rp 1.511.000,- (Satujuta limaratus sebelas ribu rupiah)
B. Pendapatan:	
Hasil produksi telur tiap bulan (35%) dengan harga telur per butir Rp 230,- : 30 x 5 x Rp 230,-	=Rp. 241.500,-
C. Penerimaan:	
Hasil produksi bersih tiap bulan adalah : Rp. 241.500,-	
- Rp 111.000,- (Biaya pakan, tenaga dan penyusutan kandang)	=Rp. 130.500,- =====

IV. PROSPEK DAN ANTISIPASI PROGRAM PENGEMBANGAN AYAM BURAS PADA PELITA VI (PJPT II)

Strategi Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II), dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan tetap memanfaatkan potensi sumberdaya alam serta pelaksanaan program secara berkesinambungan.

Peningkatan kualitas tersebut antara lain ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan serta meningkatnya tingkat pendidikan usaha sekolah dan pemuda. Untuk itu orientasi pembangunan di Pelita VI, masih dititikberatkan pada peningkatan pendapatan masyarakat (petani) yang ada di pedesaan.

Dari berbagai pengalaman selama Pelita V, memperlihatkan kepada kita bahwa ayam buras masih merupakan komoditi ternak yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Namun berbagai hal yang menyangkut aspek agribisnis, bioteknologi serta kelembagaan memerlukan perhatian kita semua.

Beberapa hal yang memerlukan penataan dalam usaha ayam buras, antara lain:

1. Populasi per anggota keluarga/kelompok (ratio pemilikan).
2. Bentuk bantuan dan kerjasama antara pemerintah/swasta dan kelembagaan terkait, dalam menyediakan aspek permodalan.
3. Aspek budidaya.
4. Aspek pengolahan dan pemasaran.
5. Peranan Organisasi Fungsional dan Wadah Koperasi.
6. Penelitian bioteknologi (bibit, pakan, dsb).

**PENDAPATAN PENDUDUK KABUPATEN TANGERANG
(Evaluasi Keadaan Tahun 1976 Sampai dengan 1986) 1)**

oleh

H. Arie Lastario K. 2)

PENDAHULUAN

Pada waktu yang lalu, Direktorat Tata Guna Tanah Ditjen Agraria telah mengadakan pemantauan pendapatan penduduk ditingkat desa/kecamatan dalam rangka menentukan lokasi kecamatan miskin untuk menetapkan macam kegiatan pembangunan pada lokasi tertentu. Pemantauan telah dilakukan pada tahun 1976, 1981 dan 1986, yaitu dengan maksud juga untuk melihat hasil-hasil pembangunan pada Pelita I, II, dan III.

Pada kesempatan ini maka dicoba untuk membandingkan ketiga angka hasil pemantauan tersebut, juga membandingkan variabel-variabel apa yang pernah berperan strategis didalam peningkatan pendapatan penduduk setempat. Dilihat pula seberapa jauh pemerataan pendapatan dikalangan penduduk setempat. Dilihat pula seberapa jauh pemerataan pendapatan dikalangan penduduk kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Pemantauan pendapatan per kapita yang telah digunakan oleh Direktorat Tata Guna Tanah, yaitu menggunakan data sample dari penghitungan Gross Domestic Product Desa (dari kecamatan sample), kemudian dengan menggunakan berbagai variabel di tingkat kecamatan dilakukan perkiraan (prediksi) pendapatan dengan menggunakan metoda regresi.

Pendapatan per kapita penduduk sebagai dependent variabel dari berbagai independent variabel yang telah dipilih ditingkat kecamatan. Ketepatan dari metoda regresi ini ditentukan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 .

Adapun kriteria kemiskinan yang digunakan berlaku untuk seluruh kecamatan di propinsi Jawa Barat, artinya bahwa suatu kecamatan di Kabupaten Tangerang dapat dibandingkan keadaannya, tidak hanya dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Tangerang saja, tetapi bahkan dapat dengan kecamatan lain yang ada di Jawa Barat.

-
- 1). Disampaikan pada "Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan" LPM IPB Bogor, 10 Juli 1993. (Makalah sumbangan)
 - 2). Staf Pengajar Universitas Nusa Bangsa, Bogor.

HASIL-HASIL PEMANTAUAN

Pada tahun 1976, Kabupaten Tangerang terdiri atas 17 kecamatan. Pendapatan per kapita penduduk berkisar antara Rp 9.780,- (di kecamatan dengan mayoritas tanah keringnya, yakni kecamatan Ciledug) sampai sebesar Rp 57.296,- (di kecamatan dengan mayoritas tanah sawah yaitu kecamatan Teluknaga). Rata-rata pendapatan per kapita untuk seluruh kabupaten Tangerang sebesar Rp 20.653,- dengan gini ratio 0,2335.

Pada waktu itu, ditetapkan besarnya standar kebutuhan hidup minimum untuk harga sembilan bahan pokok adalah Rp 28.445,- (harga beras Rp 120,- per kilogram) sehingga dari 17 kecamatan terdapat :

- 13 kecamatan (76 %) miskin sekali
- 2 kecamatan (12 %) miskin
- 1 kecamatan (6 %) hampir miskin dan
- 1 kecamatan (6 %) tidak miskin

Untuk keperluan prediksi pendapatan per kapita pada tahun 1976, digunakan 18 variabel yang dapat menerangkan besarnya pendapatan per kapita penduduk sebesar lebih kurang 60 % (R^2). Adapun kedelapan variabel tersebut dan besarnya koefisien regresi baku dapat dilihat sebagai berikut :

1. Ratio anak SD terhadap anak usia sekolah	(0,58)
2. Tingkat pengangguran	(0,44)
3. Persentase tanah kering dari luas daerah	(-0,28)
4. Produktivitas tanah	(0,20)
5. Jumlah anak per kepala keluarga	(0,20)
6. Ratio panjang jalan terhadap luas daerah	(0,16)
7. Rata-rata luas pekarangan per kepala keluarga	(-0,12)
8. Luas tanah rusak per luas daerah	(-0,05)

Secara kualitatif maka keadaan di kabupaten Tangerang dan Jawa Barat pada umumnya adalah : belum semua anak usia sekolah masuk sekolah dasar, tingkat pengangguran relatif masih rendah, artinya bahwa sektor pertanian masih mampu menyerap tenaga kerja, produktivitas tanah masih dapat ditingkatkan, jumlah anak dalam setiap keluarga belum melampaui keseimbangan yang dimungkinkan, panjang jalan per satuan luas daerah masih dapat ditambah, luas pekarangan dari tiap keluarga sudah terlalu luas dan tidak tertangani lagi, tanah rusak (erosi) dalam satuan daerah sudah terlalu luas.

Pada tahun 1981, maka kabupaten Tangerang masih terdiri atas 17 kecamatan. Pendapatan per kapita penduduk, dengan harga yang berlaku, berkisar antara Rp 32.632,- (di kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten, yakni kecamatan Tangerang/Cipondoh) sampai sebesar Rp 99.670,- (di kecamatan

dengan mayoritas tanah kering, dan dewasa ini disiapkan untuk calon ibukota kabupaten, yaitu kecamatan Tigaraksa). Rata-rata pendapatan per kapita untuk seluruh kabupaten Tangerang sebesar Rp 73.633,- dengan gini ratio 0,1628. Hal ini menunjukkan makin menurunnya ketimpangan pemerataan pendapatan antar kecamatan.

Pada waktu itu, ditetapkan besarnya standard kebutuhan hidup minimum untuk harga sembilan bahan pokok adalah Rp 58.550,- (harga beras Rp 230,- per kilogram) sehingga dari 17 kecamatan yang ada di Tangerang terdapat :

- 2 kecamatan (12 %) miskin sekali
- 5 kecamatan (29 %) miskin
- 10 kecamatan (59 %) hampir miskin dan
- 0 kecamatan (0%) tidak miskin

Untuk keperluan prediksi pendapatan per kapita, pada tahun 1981 digunakan 12 variabel, dan dari padanya keluar 6 variabel yang dapat menerangkan besarnya pendapatan per kapita penduduk sebesar lebih kurang 82 % (R^2). Adapun keenam variabel tersebut dan besarnya koefisien regresi dapat dilihat sebagai berikut :

- | | |
|---|---------|
| 1. kepadatan penduduk | (-0,70) |
| 2. rata-rata pengusaha tanah | (0,50) |
| 3. ratio tegalan terhadap tanah diusahakan | (0,40) |
| 4. ratio nilai ternak terhadap jumlah kepala keluarga | (0,32) |
| 5. ratio petani terhadap jumlah kepala keluarga | (0,31) |
| 6. ratio anak terhadap jumlah penduduk | (-0,01) |

Secara kualitatif maka keadaan di kabupaten Tangerang dan Jawa Barat pada umumnya dapat dikatakan bahwa, kepadatan penduduknya sudah cukup tinggi, terutama karena arus perpindahan penduduk dalam mencari pekerjaan, rata-rata luas pengusaha tanah di sektor pertanian masih memungkinkan memberikan hasil yang optimal, luas tegalan terhadap tanah yang diusahakan dalam proporsi yang berimbang, banyaknya ternak yang dipelihara oleh tiap keluarga masih dapat ditingkatkan, jumlah petani belum melampaui batas artinya bahwa sumber daya alam masih dapat mendukung sektor pertanian, perbandingan jumlah anak terhadap jumlah penduduk sudah menampakkan kurang seimbang.

Pada tahun 1986, kabupaten Tangerang telah memekarkan jumlah kecamatan, yaitu dari 17 menjadi 21 kecamatan. Pendapatan per kapita penduduk, dengan harga yang berlaku pada waktu itu berkisar antara Rp 213.133,- (di kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten Tangerang; kecamatan Tangerang) sampai Rp 342.721,- (di kecamatan yang tumbuh menjadi kota satelit disebelah Selatan dari ibukota Jakarta Raya; kecamatan Ciputat). Rata-rata pendapatan per kapita untuk seluruh kabupaten Tangerang sebesar Rp 261.002,- dengan gini ratio 0,0654. Ketimpangan pemerataan pendapatan semakin mengecil.

Pada waktu itu, diperoleh besarnya standar kebutuhan hidup minimum untuk harga sembilan bahan pokok adalah Rp 102.362,- (harga beras Rp 325,- per kilogram) sehingga dari 21 kecamatan terdapat :

0 kecamatan	(0 %)	miskin sekali
0 kecamatan	(0 %)	miskin
0 kecamatan	(0 %)	hampir miskin dan
21 kecamatan	(100 %)	tidak miskin

Untuk keperluan prediksi pendapatan per kapita, pada tahun 1986, menggunakan 18 variabel, dan dari padanya keluar 10 variabel yang dapat menerangkan besarnya pendapatan per kapita penduduk sebesar lebih kurang 64 % (R^2). Adapun kesepuluh variabel tersebut dan besarnya koefisien regresi dapat dilihat sebagai berikut :

1. ratio peternakan terhadap penduduk	(0,45)
2. ratio jumlah rumah terhadap jumlah kepala keluarga	(-0,37)
3. ratio luas tanah usaha terhadap luas kecamatan	(0,34)
4. produktivitas tanah	(0,29)
5. ratio perikanan terhadap penduduk	(-0,29)
6. ratio luas tanah kering terhadap luas tanah usaha	(-0,20)
7. ratio jumlah anak usia sekolah terhadap jumlah anak	(-0,17)
8. ratio luas tanah rusak terhadap luas kecamatan	(-0,16)
9. rata-rata pemilikan tanah	(-0,14)

Secara kualitatif maka keadaan kabupaten Tangerang dan Jawa Barat pada umumnya dapat dikatakan bahwa : sektor peternakan masih dapat ditingkatkan, mengingat bahwa masih terbuka peluang di sektor ini; jumlah rumah sudah memadai, tinggal ditingkatkan kualitasnya yaitu : tanah usaha disektor pertanian umum masih mencukupi dan perlu dikembangkan; produktivitas tanah masih dapat ditingkatkan karena belum mencapai maksimum; sektor perikanan perlu ditingkatkan intensitasnya; perluasan usaha tanah kering sudah perlu dikendalikan, ditingkatkan intensitasnya; cukup banyak anak usia sekolah sehingga perlu diperluas sarana pendidikan; tanah rusak (erosi dan sebagainya) sudah meluas dan perlu diambil langkah-langkah rehabilitasi; rata-rata luas pemilikan tanah sudah kurang dari unit usaha tani.

PERUBAHAN PENDAPATAN PER KAPITA

Nilai rupiah selama tahun 1976 sampai dengan tahun 1986 (12 tahun) berubah terus, karena itu dicoba untuk membandingkan pendapatan penduduk kabupaten Tangerang selama tiga kali pemantauan tersebut dengan harga konstan 1976, dan berdasarkan angka indeks harga BPS diperoleh bahwa apabila pada tahun 1976 = 100, maka pada tahun 1981 = 241 dan pada tahun 1986 = 358 (lihat lampiran 6).

Berdasarkan harga konstan 1976, maka rata-rata pendapatan perkapita penduduk kabupaten Tangerang pada tahun 1976 sebesar Rp 20.653,- (miskin sekali), dan kemudian pada tahun 1981 berubah menjadi Rp 30.553,- (hampir miskin), sehingga selama periode 5-6 tahun tersebut mengalami kenaikan absolut sebesar 48 %. Kemudian pada tahun 1986 berubah menjadi Rp 72.906,- (tidak miskin) dan selama periode 1981 sampai dengan 1986 mengalami kenaikan absolut sebesar 139 %. Sedangkan kenaikan absolut pendapatan per kapita dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1986 sebesar Rp 53.353,- atau 253 %.

Apabila dilihat dari harga konstan 1976, maka standard kebutuhan hidup minimum dari tahun 1976 dibandingkan dengan tahun 1981 mengalami penurunan dari Rp 28.445,- menjadi Rp 24.295,- atau 15 %. Sedangkan pada tahun 1986 standard kebutuhan hidup minimum kembali menjadi kurang lebih sama dengan keadaan pada tahun 1976. Karena itu dapat juga ditarik implikasi bahwa ukuran tingkat kesejahteraan penduduk pada tahun 1981 berkurang 10 % dari pada tahun 1976, meskipun dalam 5-6 tahun kemudian (1986) ukuran tingkat kesejahteraan tersebut dapat dikembalikan seperti keadaan tahun 1976.

Apabila dilihat dari harga beras per kilogram, maka keadaan pada tahun 1976 mencapai harga tertinggi Rp 120,-, pada tahun 1981 turun kurang lebih dari 20 % (Rp 95,-), dan kemudian pada tahun 1986 naik lagi tak seberapa (Rp 98,-) dan belum dapat kembali pada keadaan harga tahun 1976.

Meskipun secara umum terjadi peningkatan pendapatan per kapita bagi penduduk kabupaten Tangerang, tetapi untuk beberapa kecamatan seperti : Kronjo, Teluknaga, Cisoka, Tangerang, dan Cipondoh, tidak mengalami peningkatan pendapatan (bahkan secara absolut menurun dari 26 % sampai 53 %). Untuk daerah-daerah tersebut memerlukan penelitian tersendiri.

Selama periode satu dekade, terjadi pemerataan yang terus meningkat dengan menurunnya ketimpangan penyebarannya. Hal ini ditunjukkan oleh indeks gini yang terus mengecil.

KESIMPULAN

Pemantauan telah dilakukan untuk kurun waktu lebih dari 12 tahun dengan tiga kali pengukuran besarnya pendapatan per kapita. Setiap kali pengukuran maka telah diperoleh tingkat kepercayaan yang cukup tinggi, karena meskipun dengan metoda prediksi, maka variabel-variabel yang dipakai dapat menjelaskan lebih dari 60 % tentang besarnya pendapatan per

kapita penduduk. Setidaknya, perbandingan pendapatan penduduk setempat secara relatif dapat ditunjukkan.

Selama kurun waktu tersebut di atas, secara relatif telah terjadi peningkatan pendapatan per kapita dari penduduk pedesaan di kabupaten Tangerang. Apabila dipakai angka rata-rata dari seluruh kecamatan dengan menggunakan angka harga yang berlaku, maka pada tahun 1981 (Rp 73.633,-) telah naik hampir empat kali dari pada keadaan tahun 1976 (Rp 20.653,-) keadaan tahun 1986 (Rp 261.002,-) dibandingkan dengan keadaan tahun 1981 (Rp 73.633,-), maka untuk kurun waktu yang kurang lebih sama (lebih kurang 5 tahun) juga telah mengalami kenaikan hampir empat kali. Selama 10-12 tahun maka telah mengalami kenaikan sebesar hampir 13 kali.

Namun, apabila dihitung berdasarkan harga konstan 1976, maka kenaikan absolut pendapatan per kapita penduduk kabupaten Tangerang, dari tahun 1976 sampai tahun 1981 hanya dibawah 50 %, kemudian dari tahun 1981 sampai tahun 1986 kenaikan absolut kurang lebih 14 %, dan untuk selama periode 10-12 tahun kenaikan absolut pendapatan perkapita penduduk mencapai lebih dari 250 persen.

Adapun pengurangan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan dilihat dari segi region kecamatan, maka dapat dilihat dari jumlah dan perubahan status kecamatan; dari status miskin sekali berubah menjadi miskin dan seterusnya ataupun sebaliknya mengalami penurunan kesejahteraan. Apabila bagi setiap status diberikan pembobotan (score)*, maka keadaan pada tahun 1976 (score 24) dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1981 (score 42), maka kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan 75 %. Sedang keadaan pada tahun 1981 (score 42) dibandingkan dengan keadaan tahun 1986 (score 68), maka selama kurun waktu tersebut kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan 62 %. Apabila dijumlahkan selama kurun waktu 10-12 tahun maka peningkatan kesejahteraan sebesar 183 % (dari score 24 menjadi score 68).

Sedangkan perubahan tingkat pemerataan geografis bagi penduduk kecamatan di kabupaten Tangerang, dapat dilihat dari besarnya gini ratio pada kurva Lorenz dari hasil pemantauan pada tahun 1976, 1981, dan 1986. Dari tahun 1976 ke tahun 1981 telah mengalami peningkatan pemerataan, dari gini ratio 0,2335 menjadi 0,1628 atau peningkatan pemerataan lebih kurang 30 %, sedangkan dari tahun 1981 (gini ratio 0,1628) ke tahun 1986 (gini ratio 0,0654 telah mengalami peningkatan pemerataan lebih kurang 60 %. Selama 10-12 tahun maka peningkatan pemerataan sebesar lebih kurang 72 %.

* Miskin sekali diberi score 1, miskin diberi score 2, hampir miskin diberi score 3, dan tidak miskin diberi score 4.

Selama tiga kali pemantauan, maka variabel demografi selalu muncul, terutama variabel anak dan kaitannya dengan sarana pendidikan dan pengajaran. Kiranya peningkatan kualitas manusia dan sarana pendidikannya selalu penting dan masih akan terus penting dalam peningkatan kesejahteraan. Potensi fisik juga selalu muncul, terutama Variabel tanah kering, tegalan ataupun pekarangan. Pengusahaan yang intensif pada tanah kering (termasuk pekarangan dan tegalan) perlu dilakukan agar sub sektor ini tidak menjadi beban negatif terhadap pendapatan. Variabel tanah rusak (erosi) masih tetap mengancam, sehingga perlu diberikan perhatian terhadap perbaikan lingkungan di daerah hulu. Produktivitas tanah usaha pertanian masih dapat ditingkatkan, termasuk sub sektor peternakan masih perlu dikembangkan. Jumlah rumah untuk sementara sudah memadai, dan yang perlu adalah peningkatan kualitasnya. Rata-rata luas pemilikan tanah menurun, dan perlu dicegah agar minimum unit usaha tani masih dapat dipertahankan untuk kelangsungan produksi di sektor pertanian umum.

S A R A N

Pemantauan yang tepat waktu (setidaknya pada tahun ke 3 dari setiap pelita), pemrosesan data yang cepat (sudah makin mudah dengan menggunakan personal computer) dapat selalu dilakukan pada tingkat kabupaten dan hasilnya dapat digunakan setidaknya untuk :

1. menilai hasil-hasil pembangunan pada 5 tahun yang telah lampau
2. menyusun program kegiatan pembangunan yang specific locational bagi pembangunan lima tahun berikutnya.

Pengumpulan data dapat dilakukan oleh kantor Statistik kabupaten bersama kantor Pembangunan Desa Kabupaten. Perhitungan Gross Domestic Product tingkat desa/kecamatan sample dapat dilakukan dengan tenaga yang ada di kabupaten. Bilamana perlu, maka dapat dilangsungkan bersama survei potensi desa yang secara rutin telah pernah dilakukan setiap tiga tahun sekali.

Lampiran : 1
Tabel :

VARIABEL YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA
PENDUDUK KABUPATEN TANGERANG, Tahun 1976

Dari 18 variabel yang diolah dengan metoda regresi, maka keluar 8 variabel yang berpengaruh nyata. Koefisien determinasi $R^2 = 0,77$

No.	Variabel	Besarnya Beta koefisien
1.	Jumlah anak SD dari usia anak sekolah	(0,58)
2.	Besarnya "tingkat pengangguran"	(0,44)
3.	Luas tanah kering terhadap luas daerah	(-0,28)
4.	Tingkat produktivitas tanah	(0,20)
5.	Jumlah anak setiap rumah tangga	(0,20)
6.	Panjang jalan terhadap luas daerah	(0,16)
7.	Ratio luas pekarangan setiap rumah tangga	(-0,12)
8.	Luas tanah rusak terhadap luas daerah	(-0,05)

Sumber : Publikasi No. 125

Direktorat Tata Guna Tanah Ditjen Agraria, Depdagri
"Penentuan Lokasi Kecamatan Miskin, Propinsi Jawa Barat.

Lampiran : 2

Tabel :

VARIABEL YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA
PENDUDUK KABUPATEN TANGERANG, Tahun 1981

Dari 12 variabel yang diolah dengan metoda regresi, maka keluar 6 variabel yang berpengaruh nyata. Koefisien determinasi $R^2 = 0,82$

No.	Variabel	Besarnya Beta koefisien
1.	Kepadatan penduduk	(-0,70)
2.	Rata-rata luas pengusahaan tanah	(0,50)
3.	Ratio luas tegalan terhadap luas tanah yang diusahakan	(0,40)
4.	Ratio nilai ternak terhadap jumlah rumah tangga	(0,32)
5.	Ratio jumlah petani terhadap jumlah rumah tangga	(0,31)
6.	Ratio jumlah anak terhadap jumlah penduduk	(-0,01)

Sumber : Publikasi No. 235

Direktorat Tata Guna Tanah Ditjen Agraria, Depdagri
"Penentuan Lokasi Kecamatan Miskin, Propinsi Jawa Barat.

Lampiran : 3
Tabel :

**VARIABEL YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA
PENDUDUK KABUPATEN TANGERANG, Tahun 1986**

Dari 18 variabel yang diolah dengan metoda regresi, maka keluar 9 variabel yang berpengaruh nyata. Koefisien determinasi $R^2 = 0,64$

No.	Variabel	Besarnya Beta koefisien
1.	Ratio nilai peternakan terhadap jumlah penduduk	(0,45)
2.	Ratio jumlah rumah terhadap rumah tangga	(-0,37)
3.	Ratio luas tanah usaha terhadap luas daerah	(0,34)
4.	Tingkat produktivitas tanah	(0,29)
5.	Ratio nilai Sektor perikanan terhadap jumlah penduduk	(-0,29)
6.	Ratio luas tanah kering terhadap luas tanah yang diusahakan	(-0,20)
7.	Jumlah anak usia sekolah dari jumlah anak	(-0,17)
8.	Luas tanah rusak terhadap luas daerah	(-0,16)
9.	Rata-rata luas pemilikan tanah	(-0,14)

Sumber : Laporan yang belum dipublikasikan dari Direktorat Tata Guna Tanah (1987) Ditjen Agraria, Depdagri

Lampiran : 5

Tabel :

PENDAPATAN PERKAPITA PENDUDUK KABUPATEN TANGERANG
(Pendekatan prediksi/regresi dengan harga yang berlaku)
(dalam rupiah)

Tahun	1976	kriteria	1981	kriteria	1986	kriteria
Kecamatan	$(R^2=0,60)$		$(R^2=0,82)$		$(R^2=0,64)$	
1. Tigaraksa	13.919	(ms)	99.670	(hm)	230.702	(tm)
2. Cikupa	12.437	(ms)	86.186	(hm)	271.549	(tm)
3. Curug	16.133	(ms)	93.731	(hm)	272.839	(tm)
4. Legok	14.739	(ms)	81.378	(hm)	275.875	(tm)
5. Serpong	18.521	(ms)	62.706	(m)	252.874	(tm)
6. Ciputat	17.925	(ms)	58.583	(m)	342.721	(tm)
7. Pasarkemis	17.698	(ms)	90.047	(hm)	266.660	(tm)
8. Balaraja	17.668	(ms)	83.690	(hm)	242.670	(tm)
9. Kresek	21.075	(ms)	75.794	(hm)	225.164	(tm)
10. Kronjoksa	39.961	(ms)	70.837	(m)	236.443	(tm)
11. Mauk	23.486	(m)	71.081	(m)	282.980	(tm)
12. Rajeg	15.896	(ms)	85.577	(hm)	244.089	(tm)
13. Sepatan	23.021	(m)	74.372	(hm)	257.471	(tm)
14. Teluknaga	57.296	(tm)	65.392	(m)	239.118	(tm)
15. Pondok Aren	*17.925	(ms)	*58.583	(m)	288.859	(tm)
16. Cisoka	*39.961	(hs)	*70.837	(m)	263.648	(tm)
17. Ciledugsa	9.780	(ms)	86.631	(hm)	303.106	(tm)
18. Tangerang	20.178	(ms)	32.632	(ms)	213.133	(tm)
19. Batuceper	13.067	(ms)	33.446	(ms)	258.742	(tm)
20. Cipondoh	*20.178	(ms)	*32.632	(ms)	237.495	(tm)
21. Jatiuwung	*16.133	(ms)	*93.731	(hm)	274.611	(tm)
Rata-rata kabupaten	20.653		73.633		261.002	
(ms)	:	<21.334	<43.912		<76.770	
(m)	:	21.334-35.556	43.912-73.187		76.772-127.953	
(hm)	:	35.557-56.890	73.188-117.100		127.954-204.724	
(tm)	:	>56.890	>117.000		>204.724	
SKHM	:	28.445	58.550		102.362	
Harga beras/kg		120	230		352	

Keterangan

- * = Kecamatan pemekaran, data diambil dari kecamatan induknya
- ms = miskin sekali
- m = miskin
- hm = hampir miskin
- tm = tidak miskin
- skhm = standart kebutuhan hidup minimum

Lampiran : 6

Tabel :

PENDAPATAN PERKAPITA ABSOLUT PENDUDUK KABUPATEN TANGERANG
(Pendekatan prediksi/regresi harga konstan 1976)
(dalam rupiah)

Tahun	1976	1981	1986
Kecamatan			
1. Tigaraksa	13.919	41.357	64.442
2. Cikupa	12.437	35.762	75.852
3. Curug	16.133	38.893	76.212
4. Legok	14.739	33.767	77.060
5. Serpong	18.521	26.019	70.635
6. Ciputat	17.925	24.308	95.732
7. Pasarkemis	17.698	37.364	74.486
8. Balaraja	17.668	34.762	67.869
9. Kresek	21.075	31.450	62.895
10. Kronjoksa	39.961	29.393	66.046
11. Mauk	23.486	29.494	79.045
12. Rajeg	15.896	35.509	68.181
13. Sepatan	23.021	30.860	71.919
14. Teluknaga	57.296	27.134	66.793
15. Pondok Aren	*17.925	*24.308	80.687
16. Cisoka	*39.961	*29.393	73.645
17. Ciledugsa	9.780	35.946	84.666
18. Tangerang	20.178	13.540	59.534
19. Batuceper	13.067	13.878	72.274
20. Cipondoh	*20.178	*13.540	66.339
21. Jatiuwung	*16.133	*38.893	76.707
Rata-rata kabupaten	20.653	30.553	72.906
(ms)	: <21.334	<18.221	<21.445
(m)	: 21.334-35.556	18.221-30.368	21.445-35.741
(hm)	: 35.557-56.890	30.368-48.589	35.741-57.185
(tm)	: >56.890	>48.589	>57.185
SKHM	: 28.445	24.295	28.593
Harga beras/kg	120	95	98

Keterangan

- * = Kecamatan pemekaran, data diambil dari kecamatan induknya
- ms = miskin sekali
- m = miskin
- hm = hampir miskin
- tm = tidak miskin
- skhm = standart kebutuhan hidup minimum

Lampiran : 7

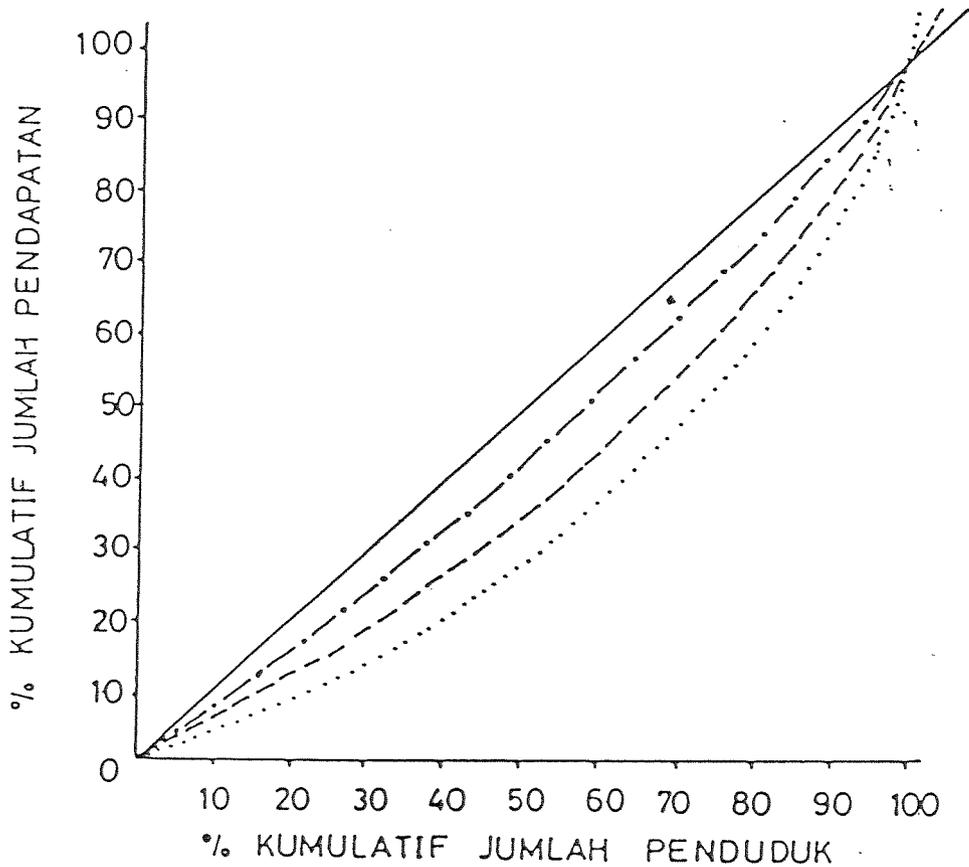
Tabel :

**SELISIH PENDAPATAN PERKAPITA ABSOLUT
PENDUDUK KABUPATEN TANGERANG THN 1986 DAN 1981 DARI THN 1976**
(Berdasarkan harga konstan 1976 = 100, perubahan
dalam lebih kurang rupiah dan lebih kurang persen)

Tahun	1976		1981		1986	
			dari thn 1976		dari thn 1976	
Kecamatan	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Tigaraksa	13.919	-	27.438	197	50.523	363
2. Cikupa	12.437	-	23.325	187	63.415	510
3. Curug	16.133	-	22.760	141	60.079	372
4. Legok	14.739	-	19.028	129	62.321	423
5. Serpong	18.521	-	7.498	40	52.114	281
6. Ciputat	17.925	-	6.383	36	77.807	434
7. Pasarkemis	17.698	-	19.666	111	56.788	321
8. Balaraja	17.668	-	17.058	96	50.201	284
9. Kresek	21.075	-	10.375	49	41.820	198
10. Kronjoksa	39.961	-	-10.568	-26	26.085	65
11. Mauk	23.486	-	6.008	26	55.559	236
12. Rajeg	15.896	-	19.613	123	52.285	329
13. Sepatan	23.021	-	7.839	34	48.898	212
14. Teluknaga	57.296	-	-30.162	-53	9.497	17
15. Pondok Aren	17.925	-	6.383	36	62.762	350
16. Cisoka	39.961	-	-10.568	-26	33.684	84
17. Ciledugsa	9.780	-	26.166	267	74.886	765
18. Tangerang	20.178	-	- 6.638	-33	39.356	195
19. Batuceper	13.067	-	811	6	59.207	453
20. Cipondoh	20.178	-	- 6.638	-33	46.161	229
21. Jatiuwung	16.133	-	22.599	140	60.574	375
Rata-rata kabupaten	20.653	-	8.494	69	51.620	309

LAMPIRAN 4

KURVA LORENZ PENDAPATAN PENDUDUK
KABUPATEN TANGGERANG
TAHUN 1976, 1981, 1986.



Keterangan :

- Kurva Lorenz 1976 indek Gini = 0,2335
- Kurva Lorenz 1981. Indek Gini = 0,1628
- . - . - . Kurva Lorenz 1986 indek Gini = 0,0654

**KEUNTUNGAN PENERAPAN KANDANG SISTEM BATERAI
UNTUK MEMELIHARAN AYAM BURAS DI DESA SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT ¹⁾**

Oleh

Drs. Ghozie Zein ²⁾

ABSTRAK

Taraf hidup dan penghasilan masyarakat, adalah salah satu kunci pokok keberhasilan pembangunan di pedesaan, yang memerlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia.

Dengan menyadari bahwa berkurangnya tenaga produktif di desa, baik karena migrasi ke kota maupun keberhasilan Program KB (Keluarga Berencana), dirasa perlu untuk segera ada tindakan dan kegiatan di desa agar dapat meningkatkan taraf hidup dan penghasilan masyarakat yang melibatkan remaja putus sekolah, pengangguran dan ibu-ibu rumah tangga.

Dengan memperhatikan faktor psikologis dan kemungkinan partisipasinya, maka kegiatan yang cenderung lebih mudah dilaksanakan dan berhasil adalah suatu kegiatan tradisional yang sudah ada dan tumbuh di dalam kehidupan masyarakat dan namun belum berkembang dan masih berpeluang untuk dapat ditingkatkan efektifitasnya maupun efisiensinya. Sebagai salah satu alternatif yang dapat dipilih di sini adalah "Pemeliharaan Ayam Buras".

Dengan cara persuasif diusahakan untuk memberikan arah dan teknik pemeliharaan ayam buras yang lebih baik, yaitu dengan pengenalan sistem baterai (intensif) yang dibandingkan dengan cara pemeliharaan sistem range (semi intensif) dan tradisional (bebas lepas mencari pakan sendiri).

Pemantauan dilakukan terhadap hasil yang secara langsung dapat dimanfaatkan (dijual) yaitu produksi telur, dan juga diamati angka kematian.

1) Makalah Sumbangan pada Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, LPM IPB, tanggal 10 Juli 1993.

2) Staf Pengajar Jurusan Biologi, Fakultas MIPA-IKIP Surabaya

PENDAHULUAN

Penelitian ini mempunyai tujuan ganda, yaitu di bidang usaha, dapat berbentuk usaha kecil yang sangat mungkin untuk dikembangkan menjadi usaha skala besar atau menjadi beberapa unit usaha lain yang saling mendukung dalam "suatu cycle usaha". Sedang di bidang ilmu pengetahuan, cara-cara penanganan di lapangan dengan berbagai tantangan, kondisi, pengaruh yang belum dapat dipastikan dan bentuk hal lain, menyebabkan kita harus peka, kreatif, berani mencoba dan bertanggung jawab. Sehingga akan diperoleh hal-hal baru yang teruji untuk dilaksanakan.

Kita mengenal ayam ras yang sudah banyak diusahakan pemeliharaannya secara efektif, efisien dan bahkan dalam skala besar dengan segala kaitannya yang serba besar, baik modal maupun pemasarannya.

Namun keberadaan ayam buras sebagai ayam lokal yang banyak dimiliki oleh masyarakat dengan skala sangat kecil dan tradisional baik di desa maupun di kota, belum banyak mendapat perhatian baik teknis maupun pemasaran hasilnya.

Adapun sesungguhnya bila dikaji dengan cermat dari ayam buras ini dapat diperoleh beberapa nilai tambah antara lain:

1. Merupakan aset nasional yang memiliki potensi yang masih mampu dikembangkan dan hampir selalu ada di setiap keluarga.
2. Pemeliharaannya mudah, murah dan tidak banyak menyita waktu.
3. Daya tahannya relatif cukup baik terhadap penyakit maupun perubahan musim dan cuaca, dibandingkan dengan ayam ras.
4. Hasil produksi telurnya disukai, bebas residu antibiotik, mudah dipasarkan dan harganya pun mendapat kedudukan yang pantas dan merangsang untuk diusahakan lebih baik.
5. Kemungkinan mengadakan pengembangan usaha dari skala kecil tidak sulit, terbuka lebar untuk semua lapisan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara bertahap pula.

Dan variasi ini pun mudah serta dapat membentuk lingkaran mata rantai (Cyclus), yang diawali dari ayam petelur yang menghasilkan telur yang dapat dijual. Selain itu dapat pula diikuti dengan menetas telur tersebut memakai alat yang sederhana dan setelah beberapa saat tertentu (\pm 18 - 21 hari), anak ayam (kutuk) hasilnya sudah mempunyai harga jual di pasar dan walaupun terus dipelihara akan naik harga jualnya sesuai dengan peningkatan umur, atau penambahan pakan dan tingkat perkembangannya. Sedangkan bila mampu dipelihara sendiri hingga dewasa dapat menambah jumlah induk ayam atau menggantikan beberapa induk yang sudah selesai masa tugasnya berproduksi.

Dengan penyuluhan teknis dan meningkatkan ketrampilan masyarakat, terutama di lokasi yang dikategorikan miskin namun masih dinilai cukup potensi maka dapat terbuka kemungkinan pemeliharaan yang praktis, efektif, efisien, berhasil dan menguntungkan.

Untuk mengarah pada maksud tujuan tersebut dapat ditempuh cara-cara sebagai berikut:

- a. Perbaiki teknik pemeliharaan ayam kampung dari bentuk tradisional menjadi bentuk baterai (sistem intensif), Range (sistem semi intensif) atau bentuk gabungan keduanya. Semua cara atau bentuk tersebut dapat disesuaikan dengan fasilitas dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap keluarga yang terlibat.
- b. Perbaiki manajemen baik pakan, tatalaksana dan pemasaran yang lebih menguntungkan baik dalam segi efisiensi dan efektivitas tenaga kerja, pakan dan modal.

Sudah dapat dipastikan keberhasilan seseorang dalam hal ini akan segera menggugah minat tetangga/keluarga yang lain, sehingga akan mempopulerkan kemajuan usaha ini lebih luas.

Dengan bantuan, petunjuk dan pengarahan yang sederhana tetapi jujur dan terbuka, maka terbuka kemungkinan membentuk wadah bersama semacam koperasi, sehingga dapat selfsupporting dan menjaga pemasaran hasil produk yang lebih bijaksana tanpa perlu bersaing.

Diharapkan keberhasilan dalam hal ini akan benar-benar mampu memberikan hasil yang dapat meningkatkan taraf hidup dan mengangkat keluarga kecil yang penuh kekurangan dan harapan di semua lokasi pedesaan yang dinilai belum maju atau belum berkembang.

MATERI PENELITIAN

Dalam penelitian ini ingin didapat keuntungan dari sistem baterai (sistem intensif) dan sistem range (semi intensif) ditinjau dari segi produksi telur dan kematian induk ayam buras. Adapun materi penelitian ini diperoleh dari data laporan harian di Pusat Pembibitan Ayam Buras di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

Keseluruhan induk ayam buras yang diamati, berjumlah awal 919 ekor ayam yang ditempatkan dalam kandang baterai (intensif) dan sejumlah 601 ekor yang dipelihara dalam kandang bersistem range (semi intensif). Semua ayam yang diamati berumur antara 7-8 bulan, dengan berat badan sekitar 1,3 - 1,4 kg/ekor dan menjelang atau baru mulai bertelur. Semua ayam penelitian ini mendapat perlakuan yang sama

dengan jumlah pakan 80 gram/ekor/hari, yang dibagikan dalam dua kali pemberian pagi dan sore hari. Pakan yang diberikan mempunyai susunan yaitu 1 (satu) bagian konsentrat yang berkadar protein sekitar 25% - 30%, 4 (empat) bagian jagung giling dan 7 (tujuh) bagian dedak/bekatul atau dari campuran seluruhnya komponen tersebut diperkirakan masih berkadar protein kasar total lebih dari 15% (Trenggono, 1993), dengan harga rata-rata sebesar Rp 270,- - Rp 300,- /kg pakan.

Peralatan dan bahan yang diperlukan adalah: ruang yang beratap di lokasi penelitian, kandang baterai, kandang range, dan perlengkapan pendukung lain misal pakan, obat, minuman serta peralatan peternakan asesoris lainnya.

Percobaan dilakukan dengan melakukan pengamatan selama 13 (tiga belas) minggu terhadap induk ayam buras terhadap parameter produksi telur per hari, jumlah kematian induk ayam per minggu, perkiraan pemasaran dan keuntungan yang dicapai dengan standar harga telur lokal yang terendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil dari percobaan ini sebagaimana diwujudkan dalam tabel 1/tabel seleksi atau tabel jumlah produksi telur dan mortality/kematian induk ayam buras dengan kandang sistem baterai/sistem intensif, adalah jumlah produksi telur rata-rata = 184,45 butir/hari dalam satu minggu atau sebesar 20,17 %/hari. Sedangkan mortality adalah 1 (satu) ekor induk ayam/minggu atau 0,14 ekor/hari atau 0,10%/hari. Juga bahwa hasil produksi telur yang maksimal adalah 230 butir/hari, dalam minggu ke 12 dan produksi telur minimal adalah 144,41 butir/hari dalam minggu ke 7, sedangkan mengenai mortality maksimal yang didapat dalam minggu ke 11 dan ke 13, yaitu sebesar 4 ekor/minggu. Sedang mortality minimal adalah pada minggu ke 1, ke 2, ke 6, ke 7, ke 9, ke 10 dan ke 12 yaitu sebesar 0 ekor/hari = 0 %.

Dari tabel 2, tentang jumlah produksi dan mortalitas induk ayam buras yang dikandangkan dengan sistem range (sistem semi intensif) dapat diketahui bahwa jumlah produksi telur rata-rata 52,12 butir telur/hari (9,3%. Sedang angka kematian yang maksimal yang didapat pada minggu ke 11 sebesar 6 ekor/minggu dan minimal pada minggu ke 1, ke 5 dan ke 8, : 2 ekor/minggu (0,33 %).

Tabel 1. Produksi telur dan kematian induk ayam yang dipelihara dalam kandang sistim baterai (intensif) .

Minggu ke-	Jumlah Induk	Produksi Telur		Kematian Induk Ayam		
		(Butir/hari)	(%/hari)	(Ekor/hari)	(Ekor/minggu)	(%/minggu)
1	919	215,5	23,44	0,00	0	0,00 %
2	918	179,5	19,55	0,14	1	0,10 %
3	918	168,4	18,34	0,00	0	0,00 %
4	917	197,1	21,48	0,14	1	0,10 %
5	915	193,9	21,19	0,29	2	0,21 %
6	915	150,7	16,47	0,00	0	0,00 %
7	915	144,4	15,74	0,00	0	0,00 %
8	914	156,0	17,06	0,14	1	0,10 %
9	914	162,6	17,77	0,00	0	0,00 %
10	914	203,0	22,21	0,00	0	0,00 %
11	910	190,2	20,90	0,57	4	0,44 %
12	910	230,1	25,27	0,00	0	0,00 %
13	906	206,5	22,80	0,57	4	0,44 %
<hr/>						
	Σ	= 2397,9		= 1.85		
	-					
	X	= 184.45		= 0.14		

Tabel 1. Produksi telur dan kematian induk ayam yang dipelihara dalam kandang sistim Range (Semi-intensif) .

Minggu ke-	Jumlah Induk	Produksi Telur		Kematian Induk Ayam		
		(Butir/hari)	(%/hari)	(Ekor/hari)	(Ekor/minggu)	(%/minggu)
1	601	61.81	10.30	0.28	2	0,33 %
2	599	48.43	8,08	0,56	4	0,66 %
3	677	44.71	6,60	0,42	3	0,44 %
4	676	50.57	7,48	0,70	5	0,74 %
5	671	46.71	6,97	0,28	2	0,29 %
6	669	27.57	4,12	0,42	3	0,45 %
7	666	21.71	3,26	0,42	3	0,45 %
8	663	36.86	5.56	0,28	2	0,30 %
9	661	52.57	7,95	0,42	3	0,45 %
10	658	65.71	9,99	0,56	2	0,60 %
11	654	57.14	8,74	0,84	6	0,60 %
12	648	74.71	11,53	0,42	3	0,46 %
13	645	89.00	13,80	0,56	4	0,62 %
<hr/>						
	Σ	= 677,57		= 6.16		
	-					
	X	= 52.12		= 0.47		

PEMBAHASAN

Hasil pada sistim baterai/seleksi yang baik dimungkinkan karena beberapa hal yaitu :

- Pakan terdistribusi lebih merata untuk tiap ekor ayam dan dapat dimakan dengan baik.
- Minum juga demikian
- Pengawasan atas tiap ayam lebih mudah terhadap makanan, minuman dan kesehatan.
- Jumlah kematian lebih kecil karena kesempatan untuk berkelahi (sifat kanibal) lebih sedikit, lebih terkolalisir, sehingga bila luka dapat segera menghindar dan tidak dikeroyok ayam lain yang biasanya menyebabkan kematiannya.

Jumlah produksi telur juga dipengaruhi oleh rasa terganggunya ayam atau disebut STRESS, sehingga akan menurun drastis, hal ini perlu dihindari yaitu dengan menjauhkan bunyi gaduh dan mengagetkan, dan adanya hewan-hewan lain di dalam atau sekitar kandang ayam, dapat pula setelah agak tenang diberikan vit B Kompleks + vit C, lebih-lebih saat terjadi perubahan cuaca (hujan, dingin atau terlalu panas udaranya).

Mortality dapat disebabkan selain oleh perkelahian ayam, juga karena terserang penyakit, misanya CRD, ND, Cacing, Semut dan lain-lain. Juga karena harus segera diatasi ataupun diadakan pencegahan dengan vaksinasi.

Dari tabel 1, didapatkan data bahwa produksi telur rata-rata adalah 184,45 butir/hari dalam satu minggu atau 20,17 %/hari, sedangkan produksi telur maksimal 230,1 butir/hari/minggu = 25,27% dalam minggu ke 12 dan produksi telur minimal = 144,4 butir/hari/minggu = 15,74 % dalam minggu ke 7. Keadaan ini kemungkinan diakibatkan oleh adanya stress akibat cuaca mendung dan hujan rintik-rintik selama minggu ke 6 dan 7 yang diikuti juga terjadi penurunan produksi telur pada sistim semi intensif seperti terlihat pada tabel 2. Sedangkan pada minggu ke 10 yang terjadi pergantian petugas kandang membuktikan kejujuran sangat berpengaruh terhadap produksi telur yang dihasilkan seperti dan dapat dilihat dengan kenaikan produksi telur pada minggu ke 10 (203 butir/hari), ke 11 (190,2 butir/hari), ke 12 (230,1 butir/hari) dan ke 13 (206,5 butir/hari) seperti terlihat pada tabel 1. Sedangkan di kandang semi intensif nampak baik pada minggu ke 10 (65,71 butir/hari), ke 11 (57,14 butir/hari), ke 12 (74,71 butir/hari) dan ke 13 (89,0 butir/hari) seperti terlihat pada tabel 2.

Pada minggu ke 11, ke 12, ke 13 terjadi mortality yang cukup tinggi baik dalam kandang dengan sistim intensif maupun semi intensif karena beberapa ekor ayam terkena CRD. Walaupun segera diadakan isolasi dan pengobatan (teramicin dan vitamin B kompleks + vitamin C = Air gula) ternyata sebagian ayam tidak tertolong.

Dari Tabel seleksi didapatkan bahwa:

Hasil Produksi Telur rata-rata adalah 184,5 butir/hari = 20,17 %/hari yang setara dengan nilai jual :	
185 x Rp 200/butir rata-rata	=Rp 36.900,-
Biaya pakan untuk pakan rata-rata:	
919 x $\frac{80 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}}$ x Rp 300/kg	=Rp 22.100,-

	=Rp 14.800,-
Biaya Pemeliharaan/hari (2 orang pegawai)	=Rp 2.000,-

Hasil bersih	=Rp 12.800,-/hari

Dari Range didapat bahwa:

Hasil Produksi Telur rata-rata 9,3%/hari = 52,12 butir/hari yang setara dengan nilai jual:	
52,12 x Rp 200,-/butir	=Rp 10.424,-
Biaya pakan rata-rata:	
625 x Rp 300 x $\frac{80 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}}$	=Rp 15.000,-

Rugi	=Rp 5.424/hari
(Belum termasuk pengeluaran untuk pemeliharaan)	

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kandang dengan sistem baterai memberikan hasil produksi telur yang lebih baik dengan jumlah kematian induk ayam yang lebih kecil.

Dan hal ini memberikan dorongan bagi peternak untuk mengikuti sistem kandang baterai.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Usaha pemeliharaan ayam buras (terutama dengan sistem baterai) sangat menguntungkan, dapat mendatangkan peningkatan penghidupan masyarakat terutama di desa. hal ini dapat merupakan daya tarik tersendiri sehingga akan dapat :

1. Mengurangi migrasi penduduk ke kota
2. Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang memerlukan.
3. Meningkatkan persatuan dengan pembentukan koperasi, yang menjamin suply kebutuhan dan pengamanan pemasaran telur.

Meningkatkan daya dan kemampuan desa dan masyarakatnya, sehingga memperkuat tulang punggung tujuan pembangunan nasional di desa dalam PJPT II nanti disamping industri.

Menjadikan peternakan sebagai wiraswasta yang dapat meraih kemajuan dan nantinya mempunyai usaha yang dapat diperbesar sehingga jadi pencipta lapangan kerja yang meningkatkan ilmu dan ketrampilannya.

SARAN

Usaha yang baik ini perlu didukung dan dibantu, agar pengembangannya dapat lebih merata, lebih cepat dan lebih dapat dipantau untuk kemajuannya. Tentunya diperlukan koordinasi, sumbangan dan penyuluhan serta bantuan modal dan hal ini dapat dipenuhi bilamana instansi terkait ikut dalam program ini, yaitu:

- Dinas Peternakan membantu penyuluhan, bimbingan dan evaluasi
- Departemen koperasi membantu pendirian, pembinaan dan penyediaan modal (lebih perlu dengan dukungan pihak bank) dan pemasaran hasil.
- Pemda dengan perangkatnya di Tingkat II (Kabupaten) Tingkat Kecamatan sampai di perangkat desa.
- Pendidikan Tinggi, dengan usaha-usaha penelitian yang pasti ikut membantu instansi terkait dalam program.

Dengan keberhasilan usaha ini maka kebutuhan masyarakat akan gizi yang memadai, akan ikut dibantu sebab, telur adalah salah satu bahan utama dengan kandungan protein dan lemak yang tinggi dan amat dibutuhkan kesehatan kita.

Amat menggembirakan bila sampai dapat diusahakan terbentuknya Desa Telur (Desa Penghasil Telur Utama), kemudian berkembang menjadi Kabupaten Penghasil Utama Telur dan Unggas.

DAFTAR PUSTAKA

- Mogiyono, S., Sukardi Riswantiyah dan S. Mulyowati, 1988. Pengembangan Ayam Buras di Pedesaan.
- Nordskog, A.W, 1980. Breedings for eggs and Poultry Meats, San Fransisco: W N Freeman and Company.
- Oluyemi, J A dan F A Roberts, 1979. Poultry Production in Warm Wet Climates, London: The Mac Millan Prods ltd.
- Sudarmiyono, 1981. "Ayam Kedu, Ayam Kampung Unggul" Trubus, No 191 Oktober.



IV. LAMPIRAN-LAMPIRAN

**SAMBUTAN KETUA PANITIA
LOKAKARYA PENGALAMAN EMPIRIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
BOGOR, 10 JULI 1993**

Yth. Bapak Rektor IPB

Yang kami hormati Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Yth. Para Ketua Bappeda Kabupaten Kerjasama, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta serta Staf Departemen terkait.

Yth. Para Pimpinan IPB, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan IPB

Yth. Para Anggota Tim Pengelola Kerjasama dan Forum Komunikasi LPM IPB serta hadirin lainnya.

Assalammu 'alaikum Wr. Wb.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur Kepada Allah SWT yang atas ridhoNYA, Kita dapat berkumpul untuk menghadiri Lokakarya "**Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan**" yang insya Allah akan berlangsung satu hari penuh sampai pukul 17.45.

Bapak Rektor dan hadirin, perkenankanlah kami melaporkan penyelenggaraan Lokakarya ini.

Peserta Lokakarya yang tercatat hadir seluruhnya 67 orang, Instansi asal para peserta adalah Perguruan Tinggi yaitu :

- Univ. Indonesia
- Univ. Brawijaya
- Univ. Sebelas Maret Surakarta
- Univ. Pajajaran Bandung
- Univ. Gajah Mada, Yogyakarta
- Univ. Airlangga Surabaya
- Univ. Diponegoro
- IKIP Bandung dan, Semarang.
- UNISULA Semarang
- Univ. Juanda Bogor, Univ. Ibnu Khaldun, Universitas Pakuan, Universitas Nusa Bangsa Bogor.
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pemda Tk I dan Kabupaten DT II Kerjasama Jawa Barat dan DKI.
- Departemen terkait : Departemen Pertanian dan Media Massa.
- Institut Teknologi Surabaya

Pada Lokakarya ini akan ditelaah sepuluh (10) buah Makalah yang terdiri atas : (1) Makalah Undangan "PENDEKATAN PENGENTASAN KEMISKINAN OLEH PERGURUAN TINGGI" oleh Dr.Ir. H. Sjafri Mangkuprawira, Ketua LPM IPB, sembilan (9) makalah Bahasan yang merupakan Empirik IPB dalam upaya Pengentasan Kemiskinan Yaitu :

1. Proyek Pengembangan Sistem Agribisnis Terpadu di Wilayah Lingkar Kampus IPB Darmaga (oleh Dr.Ir. Aida Vitayala S. Hubeis)
2. Pengembangan Desa Pantai secara Terpadu di Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten DT II Sukabumi (oleh Ir. Sunatmo Sardono)
3. Pengembangan Pasar Lelang Lokal Salah Satu Pengalaman IPB dalam Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan (oleh Ir. Yayok Bayu Krisnamurthi, MS).
4. Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Lahan Kering (Kasus Kabupaten DT II Sukabumi (oleh Ir. Moentoha Selari, MS)
5. Pembinaan Pengusaha Industri Kecil melalui Sistem Inkubator (oleh Dr.Ir. Rizal Syarief)
6. Peranan Proyek Makanan Jajanan IPB dalam upaya Pengentasan Kemiskinan (oleh Dr.Ir. Aida Vitayala S. Hubeis)
7. Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Kuliah Kerja Nyata (oleh Dr.Ir.H. Surdiding Ruhendi, M.Sc dan Dr.Ir. Oteng Haridjaja, M.Sc)
8. Identifikasi masalah dan Pendekatan Pengentasan Kemiskinan suatu Restrospeksi (oleh Dr.Ir. H. Lutfi I. Nasoetion)
9. Peluang Bisnis melalui Usaha Ternak Ayam Bukan Ras (kasus Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan). (oleh Drh. R. Kurnia Achyadi, MS Drh. Abdulgani Amri Siregar, MS dan Ir. Amiruddin Saleh, MS)

Disamping itu Panitia juga menerima dua buah makalah sumbangan dari Universitas Nusa Bangsa Bogor dan IKIP Surabaya, untuk ini kami sampaikan terima kasih.

Pada kesempatan ini pula perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan moril-materiil pada panitia sehingga lokakarya ini terselenggara dengan baik.

Kepada para penyaji makalah secara khusus kami sampaikan terima kasih atas kerjasama yang sangat baik sehingga

semua makalah dapat tersaji di tangan para peserta sebelum lokakarya ini dimulai.

Pada kesempatan ini juga kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila terjadi kekurangan dalam penyelenggaraan lokakarya ini.

Akhirnya kepada Bapak Rektor kami mohonkan perkenannya untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi lokakarya ini.

Wabillahittaufig Walhidayah, Wassalammu ,alaikum Wr. Wb.

Ketua Panitia,

Drh. ABDULGANI A. SIREGAR, MS

SAMBUTAN

**DIREKTUR PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PADA "LOKAKARYA
PENGALAMAN EMPIRIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN", TANGGAL 10 JULI 1993**

Bapak Rektor IPB Yth.

Saudara Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Yth.
Saudara-saudara peserta lokakarya dan seluruh undangan dan
hadirin Yth.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mendiskusikan dan mengambil manfaat dari "Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan".

Bila kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka entas dengan kata kerjanya mengentas dapat berarti mengangkut (dari suatu tempat ke tempat lain), mengeluarkan (dari lingkungan cairan) atau menyadarkan (misalnya terjerumus kelembah kenistaan). Pengentasan kemiskinan bila diartikan kemiskinan absolut menurut Profesor Mubyarto, berarti kemiskinan yang diukur dengan ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari (makan, tidur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dll). Tidak sulit mencari orang miskin absolut, karena dari penampilan fisik, dari lingkungan hunian dari jenis makanan dan dari sumber pencaharian dengan mudah dapat kita kenali. Namun demikian kemiskinan absolut dapat disebabkan atau merupakan resultante dari kemiskinan yang sukar diukur, seperti miskinnya ilmu pengetahuan karena kurangnya pendidikan sehingga tidak mempunyai pilihan dalam memperoleh kesempatan bekerja. Lemahnya kesehatan perlu pengobatan, tidak bisa bekerja, rendahnya etos kerja, kurangnya ketaqwaan kepada Tuhan YME, lama-lama menjadi tergantung dengan yang lain kemudian memilih jalan pintas sehingga terjerumus pada keadaan miskin.

Permasalahan kemiskinan yang dapat berputar-putar seperti lingkaran inilah yang perlu diputuskan lingkarannya dan diangkat taraf hidup dan kehidupannya.

Penyebab kemiskinan absolut di atas berpangkal pada diri simiskin tadi. Banyak lagi penyebab kemiskinan yang diakibatkan oleh pengaruh dari luar. Misalnya sumberdaya alam yang tidak mendukung (tanah yang gersang, kekeringan

atau gangguan banjir), kesempatan yang tidak tersedia (daerah terpencil atau terisolir, dilahirkan sebagai orang miskin) anak tidak dapat memilih orang tua, kalah prioritas (tergusur real estate/lapangan golf), dll.

Program pengentasan kemiskinan hendaknya dapat menangani masalah kemiskinan secara tuntas, sehingga kemiskinan nenek, kakek, ayah, ibu tidak terus turun ke anak cucu (teman sekasur, sedapur, sesumur, segubernur hingga planet bumi tercinta). Demikian pula penyebab terjadinya kemiskinan absolut hendaknya dapat ditangani secara sistematis dengan menangani penyebabnya yang paling hakiki. Jangan sampai selesai satu tumbuh seribu, seperti memberi pendidikan tetapi terbentur lapangan kerja, keterampilan yang hendaknya sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, memperbaiki sarana transportasi malahan mungkin menambah mengalirnya calo-calo tanah karena rumah mewah sehingga kemudahan untuk pembangunan dan menggusur sawah berproduksi tinggi, menambah petani berdasi.

Bila program pengentasan kemiskinan mendapat perhatian luar biasa pada akhir Pelita V ini, memang sangat wajar sekali. Menjelang dimulainya PJPT II sudah pada tempatnya ada terobosan-terobosan yang sifatnya spesifik pada sasaran dan mampu menjangkau 27 juta penduduk yang dikategorikan miskin tersebut secara berkesinambungan.

Peran IPB tentunya sangat diharapkan, mengingat sebagian besar dari sasaran 27 juta adalah mereka yang hidup dari pekerjaan bertani, nelayan atau sejenisnya yang terkait erat dengan masalah pertanian dalam arti luas. Bila kita baca materi diskusi panel yang nanti akan disajikan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan IPB terutama dalam 10 tahun terakhir mungkin dapat diangkat menjadi kebijakan nasional atau regional atau dalam upaya membantu penanganan masyarakat miskin tadi. Minimal adanya lokakarya hari ini tidak dari titik nol, tetapi justru mengkaji kegiatan yang dilakukan selama paling tidak 10 tahun terakhir dibiayai dari berbagai sumber. Terobosan-terobosan yang diharapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan tentunya tidak bisa muncul begitu saja tanpa dilakukan suatu pendalaman ilmu yang empiris sifatnya melalui kajian ilmiah berbagai bidang secara serentak antar disiplin maupun multi disiplin secara berkesinambungan dan berjangka panjang. Forum lokakarya seperti yang diadakan hari ini sangat tepat untuk dapat mengkaji keterkaitan satu sama lain agar dapat dihasilkan suatu rekomendasi penanganan permasalahan yang sifatnya lebih utuh.

Misi tri darma Perguruan Tinggi, khususnya keterkaitan penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat bukan semata-mata meningkatkan kesejahteraan pedagang asongan di Kodya

Bogor, atau petani di Sukabumi Selatan, tetapi penelitian dan kegiatan yang dilakukan dapat menghasilkan pola-pola kebijakan untuk diterapkan secara nasional oleh instansi terkait lain.

Dalam kaitan inilah saya menyampaikan selamat kepada IPB yang mencoba menghimpun hasil-hasil penelitian maupun penerapannya kepada masyarakat luas dari berbagai tingkatan yang ada kaitannya dan berperan besar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan lokakarya hari ini dapat menghasilkan langkah maju nyata yang dapat membantu kita sekalian untuk menjalankan program yang realistis dalam memerangi dan menuntaskan kemiskinan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**SAMBUTAN REKTOR IPB
PADA LOKAKARYA PENGALAMAN EMPIRIK IPB
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
Tanggal 10 Juli 1993**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yth. Sdr. Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdikbud
Yth. Sdr. Para Ketua Bappeda, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta Staf Departemen terkait,
Yth. Sdr. Para Pimpinan IPB, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala-kepala Pusat di lingkungan IPB serta hadirin lainnya.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. yang atas ridho-Nya, kita dapat berkumpul untuk menghadiri Lokakarya "Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan". Sekaligus pula kami ingin mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin dan saya gembira kehadiran Saudara-saudara merupakan bukti nyata besarnya kepedulian kita akan masalah kemiskinan.

Masalah penduduk miskin dan upaya pengentasan kemiskinan telah menjadi isu sentral baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan pakar pengamat pembangunan dan masyarakat luas. Isyu tersebut berangkat dari keberhasilan pemerintah Orde Baru memperkecil jumlah penduduk miskin absolut dari 70 juta penduduk (60%) pada tahun 1970 menjadi 27,7 juta penduduk (15%) pada tahun 1990. Namun secara absolut angka tersebut masih cukup besar dimana sebagian besar dari mereka hidup di daerah pedesaan yang marginal, terpencil dan di daerah-daerah kumuh perkotaan. Belum lagi dimensi kemiskinan tersebut diperinci lagi menjadi dimensi kebodohan dan keterbelakangan yang satu sama lainnya saling mengait. Fenomena tersebut tentu saja sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penguasaan dan pemilikan aset, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, modal, budaya, tingkat pendidikan dan tersedianya lapangan kerja disamping sistem/tatanan nilai yang berkembang di tingkat makro.

Hadirin Yth, Dari uraian singkat di atas maka tampak masalah kemiskinan bersifat multidimensi, dan sangat kompleks. Dia tidak berdiri sendiri. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya dan saling terkait satu sama lainnya. Karena itu dalam upaya pengentasan kemiskinan yang patut dipertanyakan lebih dahulu adalah siapa yang digolongkan miskin, apa indikator-indikatornya, faktor-faktor apa saja yang signifikan menyebabkan kemiskinan dan pilihan strategi

dan program apa yang perlu diambil untuk mengurangi kemiskinan. Dengan perkataan lain setiap upaya pengentasan kemiskinan lebih-lebih oleh kalangan perguruan tinggi diperlukan suatu telaahan yang cermat dan sistematis berdasarkan penguasaan disiplin ilmu, profesionalisme, pengalaman empirik dan moral kepedulian sosial yang tinggi serta bersinambung. Tanpa itu maka saya kurang yakin bahwa program pengentasan kemiskinan akan efektif dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Hadirin Yth.

Saya percaya, penyelenggaraan lokakarya hari ini bukanlah karena kelatahan kita untuk ikut-ikutan secara sporadis membicarakan isu kemiskinan. Akan tetapi memang berdasarkan sejarahnya IPB telah lama berkiprah baik langsung maupun tidak langsung mengatasi kemiskinan khususnya di daerah pedesaan. Pada hari ini tentunya IPB juga terpenggil untuk menginformasikan sebagian saja dari program-program tri darma khususnya pengabdian kepada masyarakat kepada berbagai pihak untuk menunjukkan besarnya perhatian dan kepedulian IPB terhadap golongan miskin. Sekaligus pula kami ingin memperoleh masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan konsep-konsep program dan pendekatan yang selama ini digunakan.

Saya menyadari beberapa program yang akan diinformasikan dalam lokakarya ini bukanlah suatu komedi tuntas pengentasan kemiskinan selama ini. Dan bukanlah suatu konsep final yang optimal yang siap untuk diterapkan. Namun suatu penerapan konsep yang masih perlu terus menerus dievaluasi kelayakannya baik dalam metode analisis situasi masyarakat, analisis pemecahan masalah, bentuk program/kegiatan, indikator perubahan, personalia, dana, dan dalam bentuk alokasi waktu. Seperti telah dikemukakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara bersinambung. Karena itulah aspek-aspek tadi perlu diperhatikan secara lebih cermat lagi dalam menerapkan program-program pengentasan kemiskinan di masa-masa datang.

Hadirin Yth.

Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada pimpinan dan Staf Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB yang telah memprakarsai lokakarya ini. Semoga tidak hanya berhenti pada lokakarya ini saja dan diharapkan hasil lokakarya ini dapat dilanjutkan dalam bentuk-bentuk yang lebih nyata dan lebih operasional lagi. Saya menghimbau semua pimpinan unit-unit akademik di lingkungan IPB pun dapat memanfaatkan hasil lokakarya ini untuk makin meningkatkan, peranan unit Saudara dalam ikut aktif mengentaskan kemiskinan.

Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam lokakarya ini saya mengucapkan terimakasih dan selamat berlokakarya.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, maka Lokakarya Pengalaman Empirik IPB dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan secara resmi dibuka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wbr.

Rektor,

Prof.Dr.Ir.H. Sitanala Arsyad

DAFTAR PESERTA

**LOKAKARYA PENGALAMAN EMPIRIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
BOGOR, 10 JULI 1993**

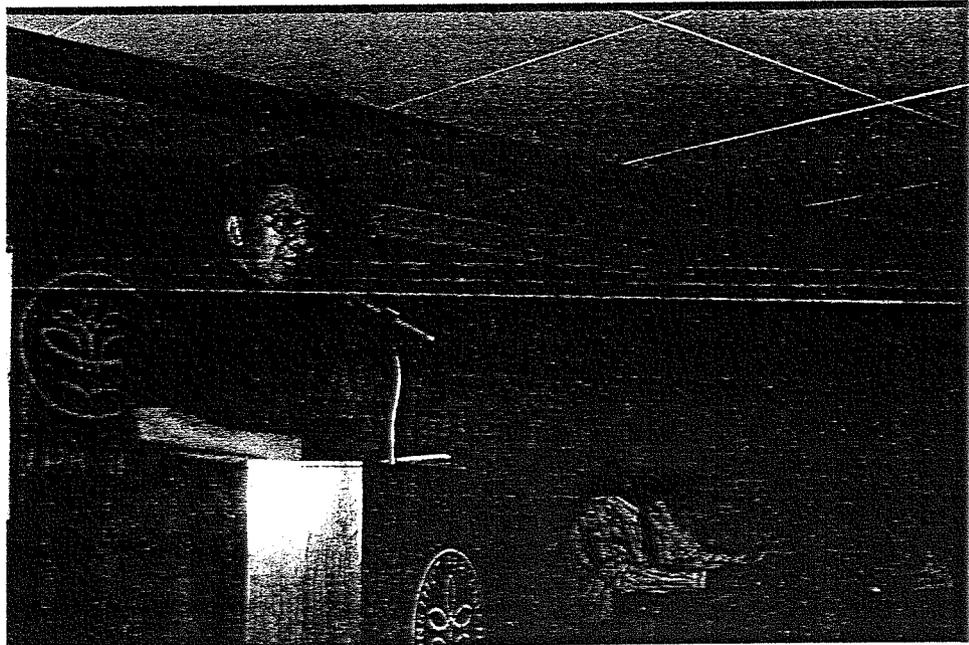
NO.	NAMA PESERTA	ALAMAT INSTANSI/ JABATAN
1	2	3
1.	Drs. Subyakto A. MPA	Sekretaris LPM UI Depok Bogor
2	Dr.Ir. Syafrida Manuwoto	Faperta IPB
3	Dr.Ir. Darnas Dana	Faperikan IPB
4	Dr.Ir. M. Aman Wirakarta- kusumah	Fateta IPB
5	Dr.Ir. Dudung Darusman	Fahutan IPB
6	Dr.Ir. Tantan R. Wiradar- ya	Fapet IPB
7	Drs. Tantawi HS., MS	LPM Universitas Brawi- jaya
8	Ir. Amar Machruf	Universitas Djuanda Bgr
9	Ir. A. Djamir Hasjmy, MS	Fapet IPB
10	dr. Yekti H. Effendi	GMSK Faperta IPB
11	Ir. Marcelinus Molo, MS	Universitas Sebelas Maret Surakarta
12	Dr.H.A.Djadja Saefullah,MA	Ketua LPM Universitas Padjadjaran Bandung
13	Dr.Ir. Iding Padlinurdja- dji	Universitas Ibnu Khal- dun Bogor

1	2	3
14	Dr. Achmad Munandar	IKIP Bandung
15	Ir. Henny Nuraini	Fapet IPB Bogor
16	Dr.Ir. Sri Supraptini M.	Fapet IPB Bogor
17	Ir. Sri Rahayu	Fapet IPB Bogor
18	Ir. Mohamad Yamin	Fapet IPB Bogor
19	Ir. Warsidi Swastomo	Ketua Bappeda Kabupaten Sukabumi
20	Ir. Toha Nursalam	IPB
21	Drs. Agus Salim, MS	IKIP Semarang
22	Ir.Uha Suhardja Satari,MS	LPM IPB
23	Drs. Zainal Abidin	Kepala Balai Pengabdian pada Masyarakat (P3M) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
24	Zaki Muchtar, SH	Universitas Pakuan Bgr
25	Drs. M. Muchlis M.	Universitas Pakuan Bgr
26	Dr.H. Emir A. Siregar	FKH IPB Bogor
27	Dr. FX. Koesharto	FKH IPB Bogor
28	Dr.Ir. M.F. Rahardjo	Tim Forum Komunikasi LPM IPB
29	Ir. Yusman Syaukat, M.Ec	Tim Pengelola Kerjasama
30	Ir. Sawarni	Universitas Djuanda Bgr
31	Ir. Yayuk Nurmiyati	Universitas Djuanda Bgr
32	Drs. Zuharnen	UGM Yogyakarta
33	Dr.Ir. Dodi Nandika	Fahutan IPB
34	Ir. Yayok Bayu K., MS	Sosek Faperta IPB

1	2	3
35	Drs. Achmad Inoni, APT	Univ.Airlangga Surabaya
36	Drh. Deddy Sugiyanto Nazar, MSc	Univ.Airlangga Surabaya
37	Drr. Nisyamhuri	Univ. Diponegoro
38	Drs. Endang S.W.	Bidang Perekonomian Bappeda DT I Jabar
39	Ir. Tientje	Bidang Perekonomian Bappeda DT I Jabar
40	Drs. Agus Sutanto, M.Sc	UGM Yogyakarta
41	Ir. Ma'mun Sarma, MS M.Ec	Jurusan Sosek Faperta IPB Bogor
42	Ir. Supriyanto, M.Sc	Sosek Faperta UGM Yogyakarta
43	Ir. Wiwik Widyastuti	LPM IKIP Bandung
44	Ir. Dirdjosoemarto	Kepala Pusat Pengembang an Masyarakat LPM UGM Yogyakarta
45	Dr.Ir. Budiатman	Fateta IPB
46	Ratna Kusumah Dewi	Departemen Pertanian Jakarta
47	Ir. Yunus Arifin	Univ. Nusa Bangsa Bgr.
48	Drs. Iman Munadjat, MS	UNISULA Semarang
49	Ir. Bambang Siswanto	Pusat Studi Satwa Pri - mata LP IPB Bogor
50	Prof.Dr.Ir.H. Sitanala Arsyad	Rektor IPB
51	Dr.Ir.H.Sjafri Mangku- Prawira	Ketua LPM IPB
52	Dr.Ir.H.Lutfi I.Nasoetion	Ketua LP IPB
53	Dr.Ir.H.Surdiding R., MSc	Kapus P2KKN LPM IPB

1	2	3
54	Dr.Ir.Aida Vitayala S. Hubeis	Kapus P2M LPM IPB
55	drh.Abdulgani Amri Siregar, MS	Kapus P3M LPM IPB
56	Ir. Moentoha Selari, MS	Kapus PWD LPM IPB
57	Dr.Ir.Oteng Haridjaja, MSc	Sekpus P2KKN LPM IPB
58	Ir. Ida Yuhana F.T., MA	Sekpus P2M LPM IPB
59	Ir. Amiruddin Saleh, MS	Sekpus P3M LPM IPB
60	drh.R.Kurnia Achyadi, MS	Sekpus PWD LPM IPB
61	Wartawan Humas IPB	IPB Bogor
62	Lana Fauziah	RRI Bogor
63	Firkah Fansuri	Wartawan Republika
64	Ir. Nurarifin S. Muhsat	Univ. Nusa Bangsa Bgr. (Rektor)
65	Dr.Ir.H. Arie Lastario K. M.Sc	Universitas Nusa bangsa
66	IGB Tanaya, SH	FTDC LP IPB
67	Ir. Imam Santosa, MS	FMIPA IPB
68	Ir. I Made Yasa, MS	Fasca Sarjana IPB Bgr.
69	Maryoto HS	Bappeda Banjarnegara
70	Pinardi K	ITS Surabaya
71	Ir. Ismail Pulungan, MSc	Tim Pengelola Kabupaten Kerjasama
72	Ir. Lala M. Kolopaking, MS	IPB
73	Teddy Supardi, SH	Bappeda Bogor
74	Mursito	IKIP Surabaya
75	Bana G. Kartasasmita	LPM ITB Bandung

1	2	3
76	Soeratmo Partoatmodjo	PPLH LP IPB
77	Prof.Dr.Ir.Jajah Koswara	DIKTI
78	Apiandri	Konsultan
79	Agus Sundarian	Bappeda Karawang
80	Asep Heri Sunjaya	Bappeda Karawang
81	Dedi J.	Wartawan Republika
82	Suhardjo	PSKPG
83	Rachmat R.	RRI Bogor
84	Ratiman S.	Wartawan Kompas
85	Sunarru Samsi H.	LPM UGM Yogyakarta
86	Arie Lastario K.	Univ. Nusa Bangsa Bgr.
87	Yasa	PPS IPB
88	Ghozie Zein	IKIP Surabaya
89	Ir. Suprihatin Guhardja	GMSK IPB



Sambutan dan Pembukaan secara Resmi oleh rektor IPB (Prof.Dr.Ir.H.Sitanala Arsyad) pada "Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan" tanggal 10 Juli 1993.



Sambutan Direktur Binlitabmas, Dikti oleh Prof.Dr.Ir. Yayah Koswara saat acara Lokakarya dimulai.



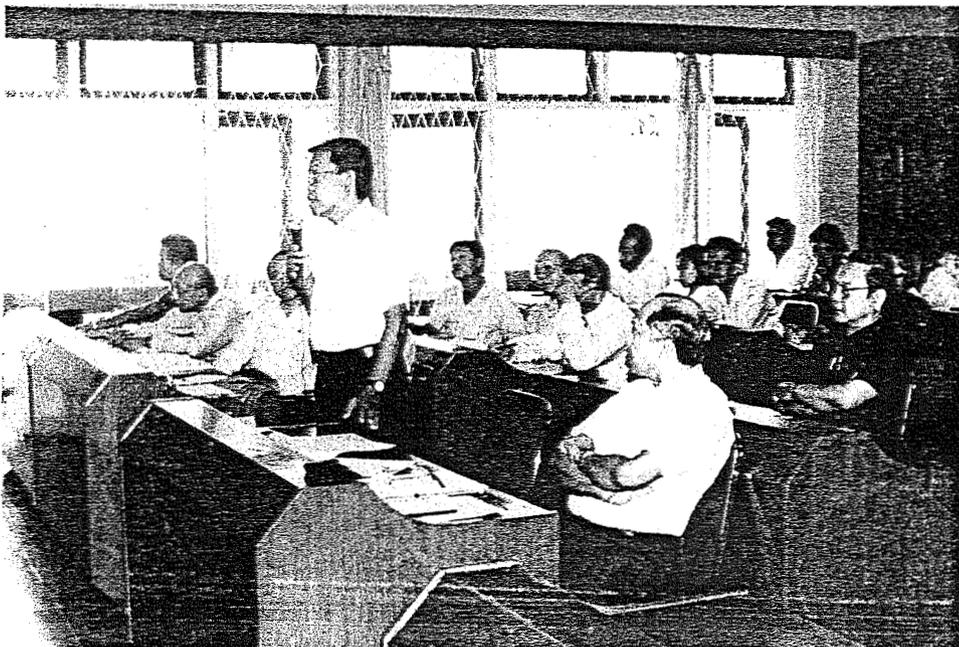
Laporan Ketua Panitia Pelaksana (drh. Abdulgani A. Siregar, MS dalam rangka "Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan" tanggal 10 Juli 1993.



Dr.Ir.H. Sjafri Mangkuprawira (Ketua LPM IPB) didampingi oleh Dr.Ir. Doddi Nandika (sebagai moderator) dan drh. Abdulgani A. Siregar, MS saat menyampaikan makalah undangan pada "Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan" tanggal 10 Juli 1993.



Para Pemakalah pada Session Pertama, tampak Dr.Ir. Aida V.S. Hubeis tengah menyampaikan materi Proyek Pengembangan Terpadu Desa Lingkar Kampus IPB Darmaga.



Saat acara tanya jawab (diskusi) oleh peserta "Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan" tanggal 10 Juli 1993.



Sambutan penutupan oleh PR. I IPB (Prof.Dr.Ir.H. Sadan Widarmana) dalam rangka "Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan" tanggal 10 Juli 1993.



Pembantu Rektor I IPB (Prof.Dr.Ir.H.Sadan Widarmana) didampingi Ketua LPM IPB (Dr.Ir.H. Sjafri Mangkuprawira, saat memberikan cenderamata berupa Piagam Penghargaan kepada salah seorang peserta.

**I. BERITA RRI BRADA REGIONAL II BOGOR
TANGGAL 10-17-1993, PUKUL 18.30 WIB.**

Rektor Institut Pertanian Bogor (Prof.Dr.Ir.H. Sitanala Arsyad), tadi pagi membuka Lokakarya sehari tentang "Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam upaya Pengentasan Kemiskinan" di Bogor.

Rektor IPB mengatakan, faktor-faktor penguasaan dan pemilikan asset, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, modal, budaya, tingkat pendidikan dan tersedianya lapangan serta sistem tatanan nilai yang berkembang di tingkat makro sangat mempengaruhi kemiskinan yang berdimensi dari kebodohan dan keterbelakangan yang satu sama lain saling berkait.

Karena itu setiap upaya pengentasan kemiskinan oleh perguruan tinggi diperlukan suatu telaahan yang cermat dan sistematis berdasarkan penguasaan disiplin ilmu, profesionalisme, pengalaman empirik dan moral kepedulian sosial yang tinggi secara bersinambung, sehingga program pengentasan kemiskinan akan efektif dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Lokakarya diikuti 67 peserta dari perguruan tinggi negeri dan swasta, Pemerintah Daerah Tingkat Satu Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta instansi terkait, dengan mengetengahkan 9 makalah pokok, 2 makalah sumbangan dan 1 makalah pendekatan pengentasan kemiskinan.

**II. BERITA RRI BRADA REGIONAL II BOGOR
TANGGAL 10-07-1993 PUKUL 18.30 WIB**

Kemiskinan sering disebut juga ketidak berdayaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, baik materi maupun bukan materi. Demikiaan diungkapkan oleh Dr.Ir.H. Sjafri Mangkuprawira dalam Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Aula LPM Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya Dr.Ir.H. Sjafri Mangkuprawira menegaskan masalah kemiskinan identik dengan keterbatasan dalam pemilihan dan penguasaan sumberdaya fisik dan non fisik.

Lampiran V.

JADWAL ACARA
LOKAKARYA PENGALAMAN EMPIRIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN. BOGOR, 10 JULI 1993

W a k t u	Materi/Penyaji/Moderator
(1)	(2)
08.30 - 09.00	Pembukaan - Laporan Ketua Panitia - Sambutan Direktur Binlitabmas, Dikti - Sambutan dan Peresmian oleh Rektor IPB
09.00 - 09.20	Model Pendekatan Pengentasan Kemiskinan Oleh: Dr.Ir. H. Sjafri Mangkuprawira
09.20 - 11.35	Diskusi Panel I - Panelis 1 : Dr.Ir. Aida Vitayala S. Hubeis <i>Materi : Proyek Pengembangan Sistem Agribisnis Terpadu di Wilayah Lingkar Kampus IPB Darmaga.</i> - Panelis 2 : Ir. Sunatmo Sardono <i>Materi : Pengembangan Desa Pantai secara Terpadu di Desa Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten DT. II Sukabumi.</i> - Panelis 3 : Ir. Yayok Bayu Krisnamurti, MS <i>Materi : Pengembangan Pasar Lelang Lokal Salah Satu Pengalaman IPB dalam Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan</i> - Moderator : Dr.Ir. Dodi Nandika - Pelapor : Ir. Ida Yuhana F.T, MA
11.35 - 12.35	Diskusi Panel II - Panelis 1 : Ir. Moentoha Selari, MS <i>Materi : Pengembangan sistem pertanian terpadu di daerah lahan kering (kasus Kabupaten Sukabumi</i> - Panelis 2 : Dr.Ir.Rizal Sarief(Pusbangtepa) <i>Materi : Pembinaan Pengusaha Industri Kecil melalui Sistem Inkubator</i> - Panelis 3 : Dr.Ir. Aida V. S. Hubeis dan Tim Street Food (IPB) <i>Materi : Peranan Proyek Makanan Jajanan IPB dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan</i> - Moderator : Prof.Dr.Ir. Sarsidi Sastrosumardjo Pelapor : Ir. Uha S. Satari, MS.

(1)	(2)
12.35 - 13.30	ISTIRAHAT (makan siang)
13.30 - 14.45	Diskusi Panel II Lanjutan
14.45 - 15.15	ISTIRAHAT
15.15 - 17.30	DISKUSI PANEL III
	- Panelis 1 : Dr.Ir. H. Surdiding Ruhendi MSc. dan Dr.Ir. Oteng Haridjaja, MSc
	<i>Materi</i> : <i>Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Kuliah Kerja Nyata.</i>
	- Panelis 2 : Dr.Ir. H. Lutfi I. Nasution
	<i>Materi</i> : <i>Identifikasi masalah dan Pendekatan Pengentasan Kemiskinan: Suatu Restros- peksi.</i>
	- Panelis 3 : Drh. R.Kurnia Achyadi, MS/ Drh. Abdulgani A. Siregar, MS
	<i>Materi</i> : <i>Peluang Bisnis melalui Usaha Ternak Ayam Bukan ras (Kasus Kelurahan Jaga- karsa, Jakarta Selatan).</i>
	- Moderator : Prof.Dr.Ir. Kuntjoro
	- Pelapor : Dr.Ir. Oteng Haridjaja, MSc.
17.30 - 17.45	P e n u t u p a n 1. Penyampaian Rumusan 2. Sambutan/Penutupan oleh Rektor IPB

